

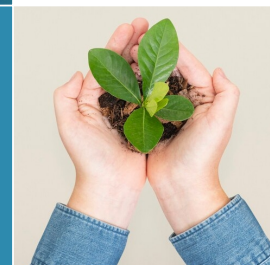
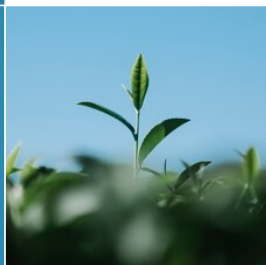
Prosiding Auditing and Accounting Conference (AAC)



“

*Elevating Trust and Transparency: The
Expanding Role of Assurance Services in
Validating Corporate Sustainability
Efforts and Enhancing Stakeholder
Confidence in Environmental, Social, and
Governance Reporting*

” 2024



Daftar Isi

Prosiding CPA Days IAPI 2024

Prosedur dan Efektivitas “ <i>Remote Auditing</i> ” Kas & Setara Kas, Persediaan dan Aset Tetap (Studi Kasus KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti) <i>Alexander Alley Retta Buana Putra, Shafira Mega Ayumi, Mercy Anastasia, Mustamu Akhmad Ali Sodikin, Sarah Widiyana Putri</i>	1-9
Pengaruh Pengungkapan ESG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Pada Perusahaan Subsektor Industri yang Terdaftar BEI pada Tahun 2019–2021) <i>Muhammad Rifli A., Athallah Akmal, Dea Fifiani, Imam Nurcahyo Fambudi, Novita</i>	10-18
Penilaian Kinerja Berbasis <i>Balanced Scorecard</i> pada PT Blue Bird Tbk Sebelum dan Setelah Diluncurkannya Layanan Go-BlueBird (2015-2022) <i>Efraim Perjuangan</i>	19-27
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) <i>Rohmatul Khasanah, Nanik Niandari, Tio Waskito Erdi</i>	28-42
Pemahaman Mahasiswa Dalam Teknologi Informasi Terhadap Minat Penggunaan <i>Software</i> Akuntansi di Jakarta Selatan <i>Aliyah Rahmanisa, Diva Purnama Dewi, Nanda Aryana, Novita</i>	43-53
Pemahaman UMKM Mengenai Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) <i>Yulien Masruth Ndururu, Sulasmi, Noni Khairunisa, Novita</i>	54-66
Analisis Kepercayaan Generasi Z Terhadap Dompet Digital (<i>E-Wallet</i>) Berdasarkan Prinsip Tata Kelola <i>Syaufiraina Naura Nadra Rizki, Risanti Dwita Puspa Zain, Dwi Maharani Putri, Novita</i>	67-77
Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> , <i>Capital Structure</i> Terhadap <i>Firm Performance</i> dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderator <i>Nelli Novyarni, Rizkha Fadhilah, Reni Harni, Kartijo</i>	78-102
Penetapan Materialitas Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Pada Lembaga Tinggi XYZ Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI <i>Andi Wira Alamsyah, Vinola Herawaty, Ayu Aulia Oktaviani</i>	103-115
Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. <i>Nia Renita Christin, Tegar Apriansyah Wismajaya Putra, Exsa Alfika</i>	116-125

Prosedur dan Efektivitas “*Remote Auditing*” Kas & Setara Kas, Persediaan dan Aset Tetap (Studi Kasus KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti)

**Alexander Alley Retta Buana Putra¹, Shafira Mega Ayumi², Mercy Anastasia³,
Mustamu Akhmad Ali Sodikin⁴, Sarah Widiyana Putri⁵**

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa, Karawang, 41361*

⁴ *Magister Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia Membangun, Bandung, 40266*

⁵ *Magister Akuntansi, Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, 12630*

2110631030054@student.unsika.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prosedur dan efektivitas *Remote Auditing* Kas & Setara Kas, Persediaan dan Aset Tetap pada kantor Akuntan Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah prosedur *remote auditing* memiliki perbedaan atas prosedur substantif dan prosedur pengendalian pada saat kondisi normal dan pandemi yang berdasar pada SA 501 atas prosedur alternatif. *Remote auditing* memiliki kelebihan menjamin keselamatan dan prosedur yang lebih simple serta memiliki resiko kesalahan data, diperlukannya *transfer knowledge* dan prosedur tambahan. Keterbatasan *Remote auditing* adalah adanya *gap technology* antara KAP dengan perusahaan yang diaudit. Antisipasi terhadap hambatan dan keterbatasan *remote auditing* adalah menggunakan SDM yang kompeten di bidang teknologi *remote* untuk *transfer knowledge* kepada KAP dan perusahaan. Efektivitas pada audit di KAP BAMS pada kondisi normal telah memenuhi 3 dari 5 asersi pada masing-masing akun, sedangkan pada masa pandemi, tingkat efektivitas pada *remote auditing* di KAP BAMS telah dilaksanakan secara efektif jika di antisipasi hambatan dan keterbatasan.

Kata Kunci: *Remote Auditing*, Kas dan Setara Kas, Persediaan, Aset Tetap.

Pendahuluan

Dunia dihebohkan dengan merebaknya wabah yang berasal dari Wuhan pada penghujung tahun 2019, yakni virus corona atau Covid-19. Terjadinya pandemi ini telah mengubah pola hidup dan kegiatan masyarakat dikarenakan virus ini mudah menyebar kepada manusia. Hal ini mengakibatkan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bagian dari antisipasi penyebaran. Oleh karena itu juga terjadi perubahan pada pola kerja, dimana masyarakat pada sebelumnya bekerja datang ke kantor, kini harus bekerja dari rumah (Kompas, 2020).

Pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap kegiatan audit yang dilakukan auditor, dimana pada sebelumnya auditor harus ke kantor dan melakukan pengumpulan bukti audit secara langsung, kini dituntut untuk bekerja dari rumah dan mengumpulkan

bukti audit secara jarak jauh. Kondisi ini membuat auditor harus melakukan penyusunan perubahan relevan dalam kasus dengan menggunakan prosedur audit alternatif. Selain itu auditor juga harus diberikan perhatian lebih dalam rangka mendapatkan bukti audit yang tepat dan akurat di tengah masa pandemi Covid-19, sehingga berdasarkan fenomena tersebut, menjelaskan bahwa penggunaan *remote auditing* pada masa pandemi Covid-19 bertujuan untuk membantu auditor dalam menyadari bahwasanya metode audit membutuhkan pengembangan dan modifikasi dengan menggunakan perkembangan teknologi dalam penerapan prosedur alternatif serta auditor dituntut untuk mempelajari dan *transfer knowledge* kepada KAP dan perusahaan *client* (Accountancy Europe, 2020).

Sebagaimana penerapan yang diterapkan oleh CPA Kanada, auditor melakukan pertemuan secara *virtual* bersama *client* sebagai bagian dari penerapan proses audit (ICAI, 2020). *Executive Director-Professional Services and Relationship Group Australian National Audit Office (ANAO)*, Jane Meade dalam warta pemeriksa edisi 10 Oktober 2020 mengungkapkan bahwa sistem IT dan *remote audit* semasa pandemi berperan penting dalam meminimalisir risiko auditor terhadap Covid-19. Oleh karena itu, diharuskan bagi auditor menyadari bahwa metode audit lama membutuhkan modifikasi dalam merespon ketidakpastian serta tantangan yang timbul akibat dampak pandemi dan juga pelaksanaan *remote audit* juga dijamin oleh Inspektur Jenderal selaku aparat pengendalian internal Kementerian Kesehatan.

Pada kondisi pandemi, auditor internal dituntut untuk selaku mempertahankan kualitas pengawasannya, tidak terkecuali terkait kualitas audit dan bukti cukup dalam rangka membuktikan hasil audit dan sejatinya *remote audit* dapat membantu auditor dalam melaksanakan proses audit secara lebih efisien dan efektif sekaligus mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19 dari klien ke auditor dan sebaliknya. Namun demikian, tidak semua prosedur audit mampu difasilitasi dan dilakukan dengan teknik *remote audit*, seperti *stock opname* dan observasi *fixed asset*. Maka dari itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti dilakukan dengan secara parsial.

Studi Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Pada penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori diantaranya sebagai berikut :

Teori Audit Digital dan Automasi

Menurut Michael Alles, Alex Kogan, dan Miklos Vasarhelyi (2018) menyatakan peran audit digital dan penggunaan teknologi dalam proses audit membantu auditor untuk menangani jumlah data skala besar agar dapat dikelola secara efisien dan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam audit jarak jauh.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik dan manajemen dalam suatu perusahaan. *Remote auditing* bertujuan untuk meminimalisir masalah keagenan dan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik meski audit dilakukan secara jarak jauh.

Teori Kepercayaan (Trust Theory)

Teori ini menjelaskan mengenai kepercayaan antara auditor dengan klien (perusahaan) dalam proses *remote auditing* dimana data yang diberikan oleh klien harus akurat, sehingga auditor dapat melaksanakan prosedur audit dengan baik dan menghasilkan keputusan yang baik meski audit dilakukan secara jarak jauh.

Teori Pengendalian Internal (Internal Control Theory)

Teori ini menjelaskan bahwa *remote auditing* memerlukan pengendalian internal dari pihak klien dikarenakan dibutuhkan penekanan pentingnya kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk tindakan pencegahan dan pendeteksian kesalahan ketika audit jarak jauh dilakukan.

Teori Risiko (Risk Theory)

Teori ini menjelaskan bahwa dalam penerapan *remote auditing* melibatkan pemahaman tentang sistem yang terintegrasi antara pihak auditor, klien serta teknologi yang digunakan. Teori ini bertujuan untuk memastikan bagaimana teknologi ini mampu mendukung pekerjaan auditor, agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Maka dari itu, dalam penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian yang ditulis dengan:

- P1 : Bagaimana pelaksanaan penerapan *remote auditing* kas & setara kas, persediaan, dan aset tetap?
- P2 : Bagaimana prosedur audit kas dan setara kas, persediaan, dan aset tetap?
- P3 : Bagaimana kelebihan dalam prosedur *remote auditing* kas & setara kas, persediaan, dan aset tetap?
- P4 : Bagaimana kelemahan dalam prosedur *remote auditing* kas & setara kas, persediaan, dan aset tetap?
- P5 : Bagaimana risiko dalam prosedur *remote auditing* kas & setara kas, persediaan, dan aset tetap?
- P6 : Bagaimana peluang dalam prosedur *remote auditing* kas & setara kas, persediaan, dan aset tetap?
- P7 : Bagaimana hambatan dalam prosedur *remote auditing* kas & setara kas, persediaan, dan aset tetap?
- P8 : Bagaimana langkah antisipasi dalam prosedur *remote auditing* kas & setara kas, persediaan, dan aset tetap?
- P9 : Bagaimana Efektivitas dalam prosedur *remote auditing* kas & setara kas, persediaan, dan aset tetap?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kuantitatif yaitu metode yang dilandaskan pada filsafat positivisme atau interpretatif yang dipergunakan untuk mengkaji keadaan objek alam, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi (menggabungkan metode

wawancara, observasi, dan dokumentasi). Hasil penelitian kualitatif digunakan untuk memahami keunikan, memahami makna dan mengkontruksi fenomena dan mengungkapkan hipotesis (Sugiyono, 2020:9)

Informan Populasi dan Sampel

Moleong (2018) memaparkan bahwasanya informan merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi serta kondisi latar belakang dari penelitian dan juga dapat memberikan masukan-masukan sebagai sumber bukti pendukung. Informan terdiri dari 3 jenis, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan kunci merupakan orang yang memiliki informasi umum dan mengetahui secara konseptual terkait topik penelitian. Informan utama adalah orang yang melaksanakan *remote audit* dan mampu menyajikan informasi secara detail. Informan tambahan ialah orang yang bisa memberikan informasi tambahan dan terkait dengan informan utama (Robinson, 2014). Pada penelitian ini, informan utama yaitu supervisor dan junior auditor yang memiliki pengalaman lebih dari satu tahun dalam bidang audit dan menerapkan *remote audit*. Informan pendukung adalah junior auditor yang memiliki pengalaman kurang dari satu tahun dalam audit dan menerapkan *remote audit*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan responden yang memiliki kemampuan dalam memberikan informasi mengenai topik penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal terdahulu, berita dan sumber lainnya dari internet dengan tujuan untuk memperkuat argumen yang diberikan oleh responden.

Teknik dan Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan menggunakan wawancara berupa angket maupun langsung, observasi, dokumentasi dan kombinasi dari ketiganya.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Penerapan Remote Auditing Kas & Setara Kas, Persediaan dan Aset Tetap

Berdasarkan hasil observasi pada tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan dalam permintaan cek fisik kas dan setara kas dari tahun 2019–2021 yang mencerminkan adopsi *remote audit* sebagai respons terhadap kondisi pandemi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pertiwi et al. (2022) yang menekankan pentingnya *remote auditing* dalam menghadapi pandemi Covid- 19 dan implikasinya terhadap kinerja manajemen dan auditor serta dalam perencanaan biaya dan resiko. Sedangkan pada tahun 2019–2021, pada jumlah cek fisik persediaan mengalami penurunan yang cukup signifikan yang dipengaruhi adanya pandemi sehingga auditor dan klien tidak ingin mengambil risiko terkait keselamatan kedua belah pihak, sehingga permintaan *remote auditing* mengalami peningkatan dan auditor bisa

meminimalisir kegiatan kunjungan tempat *auditee*. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Pertiwi et al. (2022) yang menyoroti terkait pentingnya *remote auditing* selama pandemi Covid-19 dalam menghadapi perubahan regulasi pemerintah dan dampaknya terhadap kinerja manajemen dan auditor juga menjadi pertimbangan dalam biaya dan risiko dalam *fase* perencanaan.

Pada akun aset tetap, pada tahun 2019–2021 mengalami situasi yang fluktuasi yang diakibatkan pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 – 2021, jumlah pengecekan fisik aset tetap mengalami penurunan dan baru mengalami peningkatan 2021 yang disebabkan adanya pencegahan dan antisipasi terhadap pandemi Covid-19. Berkaca dari hal ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan *remote audit* tidak mengharuskan auditor datang ke tempat *auditee* namun tetap menjaga kualitas dan bukti audit yang kuat dan akurat. Kondisi pandemi membuat auditor harus tetap berusaha mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat sesuai dengan SA 330. Pelaksanaan *remote auditing* pada KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti berjalan dengan baik dan sesuai prosedur dan standar yang berlaku dan juga terkait dengan *budget pressure*.

Prosedur Audit Kas & Setara Kas, Persediaan dan Aset Tetap

KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti (BAMS) Memiliki 8 prosedur substantif atas kas dan setara kas dan terdapat 3 prosedur pengendalian di KAP Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti (BAMS). Dalam proses pelaksanaannya, KAP BAMS melakukan prosedur sesuai dengan Standar Audit dan menggunakan teknologi terbaru untuk menunjang performa kinerja auditor. Pada prosedur akun persediaan, terdapat 11 prosedur substantif atas persediaan dan terdapat 2 prosedur pengendalian di KAP BAMS. Dimana dalam prosedur tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit yang berlaku dan menggunakan teknologi terbaru untuk menunjang kinerja auditor. Pada prosedur akun aset tetap, terdapat 11 prosedur substantif dan 2 prosedur pengendalian di KAP BAMS, dimana prosedur tersebut dilakukan sesuai dengan audit program KAP BAMS dan dalam pelaksanaannya juga sesuai dengan prosedur SA dan menggunakan teknologi terbaru untuk menunjang performa kinerja auditor.

Kelebihan Dalam Prosedur Remote Auditing Kas & Setara Kas, Persediaan dan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di KAP BAMS, menghasilkan bahwasanya prosedur *remote auditing* pada kas & setara kas, persediaan dan aset tetap memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu menjamin keselamatan dan kesehatan auditor maupun klien dari ancaman penyebaran virus Covid-19, meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam perjalanan dinas, dan juga meningkatkan kecakapan dan kemampuan auditor dalam menguasai perkembangan teknologi yang sudah ada dan berkembang saat ini untuk menjalankan prosedur audit sesuai standar dan menghasilkan laporan yang tepat dan akurat. Salah satu penerapan *remote auditing* adalah dengan melakukan wawancara *internal control* secara *online* menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet, selain itu proses pengiriman data-data yang diperlukan juga melalui Google Drive atau Onedrive Microsoft, serta penggunaan *drone* dalam proses cek fisik.

Kekurangan Dalam Prosedur Remote Auditing Kas & Setara Kas, Persediaan dan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kami terhadap auditor di KAP BAMS, kekurangan dalam prosedur *remote auditing* pada kas & setara kas, persediaan dan aset tetap adalah adanya risiko pemalsuan bukti-bukti, adanya keterbatasan dalam eksplorasi terhadap prosedur standar operasional (SOP) di lapangan, dan auditor tidak bisa melihat situasi di lapangan secara menyeluruh.

Risiko dalam Prosedur Remote Auditing Kas & Setara Kas, Persediaan dan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan auditor di KAP BAMS, risiko yang kemungkinan akan terjadi dalam menjalankan prosedur *remote auditing* adalah dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit dikarenakan auditor harus menjalani prosedur alternatif berdasarkan kondisi auditee dan juga penyesuaian sektor dari klien tersebut. Risiko kedua yaitu adanya kemungkinan kesalahan bukti audit dikarenakan auditor tidak dapat melakukan pengecekan langsung ke pihak auditee dan ada kemungkinan *file-file* bukti sudah di rekayasa.

Peluang dalam Prosedur Remote Auditing Kas & Setara Kas, Persediaan dan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap auditor di KAP BAMS, peluang dalam prosedur *remote auditing* bagi auditor adalah memungkinkan bahwa prosedur audit yang dilakukan akan jauh lebih mudah dan simpel dikarenakan terdapat beberapa prosedur yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari klien maupun auditor itu sendiri.

Hambatan dalam Prosedur Remote Auditing Kas & Setara Kas, Persediaan dan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara terhadap auditor di KAP BAMS, hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan prosedur *remote auditing* adalah kurangnya ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi audit, sehingga prosedur audit yang dilakukan tidak maksimal. Maka dari itu dibutuhkan *transfer knowledge* terhadap keterampilan dari tenaga ahli terkait penggunaan teknologi audit tersebut agar dapat digunakan secara maksimal. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Widyastuti (2022) yang mengungkapkan bahwa prosedur *remote auditing* internal terhadap persediaan dan penjualan terdapat beberapa kelemahan dikarenakan prosedur yang dilakukan tidak sesuai.

Antisipasi Hambatan Dalam Prosedur remote auditing Kas & Setara Kas, Persediaan dan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap auditor di KAP BAMS, berpendapat bahwa setiap auditor memiliki strategi dan teknik antisipasinya masing-masing, namun secara garis besar strategi utamanya yaitu melakukan pendekatan terhadap situasi dan kondisi yang ada terkait klien yang diaudit. Contohnya seperti ketika mendapatkan klien di lokasi yang jangkauan internetnya tidak stabil dan memiliki

kesenjangan dalam hal teknologi, maka auditor akan memberikan bantuan tenaga ahli untuk membantu *auditee* dalam pelaksanaan *remote*.

Efektivitas Prosedur Remote Auditing Kas & Setara Kas, Persediaan dan Aset Tetap

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Toto Irianto selaku manajer di KAP BAMS, berpendapat bahwa faktor KAP BAMS dapat melakukan prosedur *remote* auditing adalah mampu mengatasi *gap* teknologi, mampu menyesuaikan situasi dan kondisi dari klien dan juga mampu menjalankan prosedur tambahan dalam usahanya mendapatkan sampel data yang akurat.

Kesimpulan

Penerapan *remote* auditing pada kas dan setara kas, persediaan, serta aset tetap dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengutamakan keselamatan auditor dan *auditee*, terutama dalam situasi tertentu yang mengharuskan pengurangan interaksi langsung, serta mempertimbangkan tekanan anggaran. Prosedur audit ini menggantikan metode konvensional yang biasanya dilakukan secara tatap muka dengan mengunjungi kantor *auditee* dan menggunakan dokumen fisik, dengan menggunakan pendekatan teknologi seperti video conference, soft file dokumen, dan alat pendukung lainnya. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan fisik kas dilakukan melalui video conference, sementara saldo bank diverifikasi menggunakan rekening koran yang dikirimkan dalam format digital. Penggunaan drone menjadi inovasi dalam pemeriksaan persediaan, sedangkan aset tetap diperiksa dengan mencocokkan dokumen terkait biaya perbaikan dan pemeliharaan, sesuai dengan prosedur alternatif dalam SA 501.

Keunggulan dari metode *remote* auditing ini adalah efisiensi yang dihasilkan, di mana auditor dapat mengoptimalkan kinerja mereka tanpa perlu melakukan perjalanan dinas yang intensif, sambil tetap menjaga kualitas bukti audit dan keakuratan informasi. Namun, tantangan juga muncul, seperti perlunya transfer pengetahuan teknologi audit dari auditor ke *auditee*, yang memakan waktu dan usaha lebih untuk memastikan informasi yang diterima cukup dan akurat. Selain itu, risiko manipulasi bukti audit dan kesalahan penerimaan informasi menjadi perhatian serius, sehingga membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikan audit sesuai perencanaan. Hambatan lain termasuk perbedaan tingkat pemahaman teknologi antara auditor dan *auditee*, serta kebutuhan akan tenaga ahli tambahan dalam menangani risiko akun yang tinggi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, berbagai langkah telah diambil, seperti peningkatan keterampilan auditor melalui pelatihan, transfer pengetahuan kepada *auditee*, dan penambahan prosedur tambahan yang berfokus pada penilaian atas prosedur sesuai standar SA 501 dan 705. Hal ini terbukti efektif dalam pelaksanaan *remote* auditing di KAP BAMS, di mana auditor berhasil mengatasi kendala teknologi dan melakukan transfer pengetahuan dengan baik. Dengan pendekatan yang sistematis ini, *remote* auditing mampu berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, memberikan solusi yang adaptif, serta tetap memenuhi standar audit yang tinggi.

Saran

Bagi akademisi, pada penelitian berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini

dengan menambahkan identifikasi masalah untuk dianalisis dan menambah jumlah informan guna mengetahui secara konseptual pelaksanaan *remote auditing*, seperti *partner* dan manajer.

Daftar Pustaka

- Accountancy Europe (2020). Retrieved July 27, 2022, from <https://www.accountancyeurope.eu/publications/corona-virus-crisis-implications-on-reporting-and-auditing/>
- Allami, Faez Abdulhasan Jasim. (2020). The Impact of Artificial Intelligence Applications on the Performance of the External Audit Profession. *International Journal of Innovation*. Vol 13, issues 5, e-ISSN: 1808–1819
- Amelia, E. (2021). The Effects of Remote auditing, Work Stress, Intellectual Intelligence, and Professional Skepticism on Auditor Performance (Survey on Auditors of Public Accounting Firms in Semarang, Indonesia). *International Sustainable Competitiveness Advantage*. Jenderal Soedirman University. 970–998.
- Coronavirus crisis: implications on reporting and auditing. (2020, March 20). *Islamic Banking and Finance*, 3(2), 147–154.
- Evita, Y., & HS, F. M. (2019). Pengaruh Penerapan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Terhadap Pengendalian Persediaan Bahan Baku Produksi di PT. Omron Manufacturing Of Indonesia. *Jurnal Logistik Indonesia*. E-ISSN 2621–6442
- Farcane, N. (2022). Auditors' perceptions on work adaptability in Remote Audit: a COVID-19 perspective. *Economic - Research Enomoska Istrazivanja*.
- Fatmawati, Rasyida M. N., & Yuliana, Indah. (2019). Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2015-2018 dengan Inflasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi, keuangan, perbankan, dan akuntansi*.
- Febriyana, N. (2023). Studi Literatur: *Remote Audit*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. *Termometer: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan dan Kedokteran*. e-ISSN: 2964–9676;. DOI: <https://doi.org/10.55606/termometer.v1i3.1960>
- Franita, R. (2020). Efektivitas Audit Internal di Tengah Wabah Covid. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 482–488. e-ISSN: 2550–0813.
- Fitriani, R. (2020). Pengaruh Masa Kerja, Spesialisasi Audit Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Perbankan Syariah Di Indonesia). *MALIA: Journal of Accounting*. e-ISSN 2654–8577
- Fotoh, Lazarus & Mugwira, Tatenda (2023). The Use of ChatGPT in External Audits: Implications and Future Research. <https://ssrn.com/abstract=445385> DOI: 10.2139/ssrn.4514238
- Hendra (2018). Pengaruh Penggunaan Electronics Audit dan Penerapan International Standard on Auditing Terhadap Efektivitas Kerja Auditor Dalam Proses Audit Laporan Keuangan. *Pengaruh Penggunaan Electronics dan Penerapan International Standard*, Vol. 14, No. 02, page 45 – 60. e-ISSN: 2527–8320.
- Hidayat, T., & Widyastuti, D. (2022). Audit Internal Persediaan Barang Dagang dan Penjualan Terhadap Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada PT. Cahaya Sakti Mandiri. *STIE Tri Bhakti*. ISSN 2722–9475.
- Mostafa, N. F. (2021). (n.d.). Studying accounting and audit considerations of global pandemic coronavirus (Covid-19) crisis and its effects on financial reports and auditing procedures "survey study in Egyptian market." *The Journal of Financial and Commercial Research*, 22(1), e-ISSN: 325–371.
- Haniifah, Mira Nur & Pramudyastuti, Octavia Lhaksmi (2021). Analisis Efektivitas Audit Tool and Linked Archive System dalam Menunjang Proses Audit Laporan Keuangan. *Jurnal Maneksi* Vol. 10, No. 2, 169 – 176. e-ISSN: 2597–4599

- Imanur, R., & Shauki, E. (2021). Remote audit Post Covid-19 Pandemic in Achieving Professional Skepticism Auditor: Implementation of Social Presence Theory (Case Study on the Financial and Development Supervisory Agency. Atlantis Press Advances in Economic, and Management Research.
- Litzenberg, R., & Ramirez, C. F. (2020). Remote Auditing for COVID-19 and Beyond. The Institute of Internal Auditors, 13
- Natsir, M. (2009). Analisis Empiris Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia Melalui Jalur Ekspetasi Inflasi Periode 1990:2-2007:1. EQUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 13 (3), 288-307. doi:<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2009.v13.i3.385>. ISSN: 1411-0393
- Pierson, Jason & Shandy, Cycilia Ernita (2020). Analisa Penerapan Remote Auditing Pada Auditor Eksternal di Era New Normal. JRAK, Col 16, No (1), 33-50. e-ISSN: 2964-9697.
- Rashwan, A. R. M. S., & Alhelou, E. M. S. (2020). The impact of using artificial intelligence on the accounting and auditing profession in light of the Corona pandemic. Journal of Advance Research in Business Management and Accounting, 6(9), 97-122. ISSN: 2456-3544.
- Rizki, Muhammad & Novianto, Enggar. (2023). Auditing rtificial Intellegence Menggunakan COBIT 2019. JUSIFOR. Vol 2, No.1. Pages 1-7. e-ISSN: 2830-2443
- Refitasari, Adenisa. (2019). Mengenal Tujuan dan Audit Laporan Keuangan. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6gdmz>. ISSN: 886-5543.
- Robinson, O. C. (2014). Sampling in Interview-Based Qualitative Research: A Theoretical and Practical Guide. Qualitative Research in Psychology, 11(1), 25-41
- Susanto, N. (2019). Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Divisi Penjualan PT Rembaka. Agora, 7(1), 6-12.
- Syakira, N., & Aisyaturrahmi. (2022). Dampak Covid 19 dalam Menentukan Prosedur Audit Persediaan. Universitas Negeri Surabaya. ISSN: 2086-7603
- Teeter, Ryan A., & Vasarhelyi, M. A. (2010). Remote Audit: A Review of Audit-Enhancing Information and Communication Technology Literature. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 1-23.
- Zahrawati, C. (2021). Remote audit at The Audit Board of Republic Indonesia. LPPM Universitas Pamulang. ISSN: 2746-448

Pengaruh Pengungkapan ESG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Pada Perusahaan Subsektor Industri yang Terdaftar BEI pada Tahun 2019–2021)

**Muhammad Rifli A.¹, Athallah Akmal², Dea Fifiani^{3*}, Imam Nurcahyo Fambudi⁴,
Novita⁵**

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta Selatan, 12760

**deafifiani33@gmail.com*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh praktik ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penerapan praktik ESG tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, ESG masih memiliki potensi untuk membantu perusahaan dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan reputasi, mengurangi risiko, dan membangun citra positif di mata pemangku kepentingan. Untuk mencapai ini, diperlukan kerja sama antara perusahaan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi ESG yang berkelanjutan.

Kata Kunci: ESG, Kinerja Keuangan, Sektor Industri, Keberlanjutan.

Abstract

The purpose of this study is to determine how the influence of ESG (Environmental, Social, and Governance) practices on the company's financial performance. This study shows that overall, the implementation of ESG practices does not have a significant positive impact on the company's financial performance. However, ESG still has the potential to help companies in the long run, especially in improving reputation, reducing risk, and building a positive image in the eyes of stakeholders. To achieve this, cooperation between companies, regulators and other stakeholders is needed to create an environment conducive to sustainable ESG implementation.

Keyword: ESG, Financial Performance, Industrial Sector, Sustainability.

Pendahuluan

Peningkatan penjualan atau keuntungan secara langsung berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan hasil yang baik mendapatkan stabilitas dan mampu melanjutkan bisnisnya. Namun dalam kondisi saat ini, banyak perusahaan lebih memaksimalkan keuntungan dan mengabaikan faktor lingkungan sekitar. Operasional perusahaan mempengaruhi lingkungan di mana perusahaan beroperasi, dan kerusakan lingkungan sering kali disebabkan oleh kegiatan yang tidak mengutamakan tanggung

jawab perusahaan.

Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab secara finansial, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak kerusakan lingkungan di sekitar mereka. Kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya bergantung pada peningkatan kinerja keuangan, tetapi juga pada perhatian terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk lingkungan (Triyani et al., 2020). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal atas efektivitas keberlanjutan perusahaan.

Sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menjalankan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, perusahaan saat ini menerapkan prinsip ESG (*Environmental, Social, and Governance*). ESG mengacu pada dampak keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam pengambilan keputusan untuk investasi pada bisnis atau perusahaan. Ketiga aspek tanggung jawab sosial perusahaan ini digunakan oleh investor untuk mengevaluasi kinerja keberlanjutan perusahaan secara lebih komprehensif. Saham ESG meningkatkan kinerja keuangan, likuiditas saham, mengurangi volatilitas, dan menurunkan biaya modal (Ratajczak & Mikołajewicz, 2021). Perkembangan tren ESG menjadi investasi yang menarik minat investor, karena memberikan kesinambungan investasi yang lebih baik serta manajemen yang baik. Velte (2019) menemukan adanya pengaruh *environmental, social, dan governance* terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kepedulian *stakeholder* terhadap praktik-praktik keberlanjutan.

Menurut penelitian sebelumnya yang telah menganalisis bahwa praktik bisnis berkelanjutan dan integrasi aspek ESG tidak hanya merupakan tanggung jawab sosial, tetapi juga investasi jangka panjang yang meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi keterkaitan antara praktik bisnis berkelanjutan dengan kinerja keuangan perusahaan, dengan fokus pada faktor ESG. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan, pemerintah, dan akademisi dalam merancang kebijakan dan praktik bisnis berkelanjutan yang lebih efektif, serta menyediakan landasan bagi penelitian lanjutan di bidang ini.

Studi Literatur

Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Arti dari Teori ini dapat berupa teori yang berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mempunyai ketertarikan di dalam perusahaan tersebut. Setiap orang yang mempunyai ketertarikan terhadap perusahaan bisa berasal dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Karena semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan harus mengetahui dengan jelas dan rinci bagaimana perusahaan menjalankan kegiatannya, kontribusi perusahaan dan data-data lain yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan memenuhi keinginan mitranya. Menurut Ahyani dan Puspitasari (2019), *stakeholder* memiliki peran penting dalam operasional perusahaan, karena segala sesuatu akan kembali berhubungan dengan para *stakeholder*. Oleh karena itu, komunikasi antara perusahaan dan *stakeholder* harus dijaga dengan baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai.

Menurut Deegan dalam Mulyono (2019), teori pemangku kepentingan dibagi

menjadi dua perspektif utama: normatif dan positif. Dalam perspektif normatif, semua pemangku kepentingan harus diperlakukan secara setara tanpa memandang kekuatan pengaruh mereka, dan perusahaan harus bertindak secara etis serta bertanggung jawab kepada semua pihak terkait. Sementara itu, dalam perspektif positif, manajer perusahaan dipengaruhi oleh kekuatan pemangku kepentingan yang berbeda-beda, sehingga manajemen cenderung memberikan lebih banyak informasi sesuai dengan tingkat pengaruh masing-masing pemangku kepentingan. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan adalah dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan yang mencakup kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa entitas, seperti perusahaan, harus mematuhi kontrak dan norma sosial saat beroperasi. Menurut Ghozali (2020), teori ini menekankan bahwa entitas atau organisasi, termasuk perusahaan, memiliki kewajiban untuk terus berusaha agar aktivitasnya sah dan sesuai dengan batas, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat. Dasar dari teori ini adalah konsep "kontrak sosial". Kontrak sosial ini berarti bahwa operasi perusahaan harus memenuhi harapan masyarakat, yaitu perusahaan tidak hanya beroperasi untuk keuntungan semata, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk mengatasi berbagai masalah sosial, seperti lingkungan, kesehatan, dan keselamatan karyawan. Perusahaan yang gagal memenuhi ekspektasi masyarakat tidak akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Hukuman yang akan diberikan oleh masyarakat jika perusahaan gagal memenuhi harapan mereka adalah pembatasan hukum, penyediaan sumber daya yang terbatas (modal keuangan dan tenaga kerja), serta boikot dari konsumen melalui pengurangan permintaan produk perusahaan.

Teori Signaling

Signaling theory adalah teori yang menjelaskan perilaku dua pihak ketika menerima informasi yang berbeda (Ghozali, 2020). Menurut Handayani dan Destriana (2021), *signaling theory* mendorong perusahaan untuk memberikan sinyal kepada investor atau pengguna laporan keuangan lainnya. Menurut Wulandari (2020), sinyal yang diberikan berupa informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan. Investor menggunakan sinyal ini untuk menilai apakah keadaan perusahaan baik atau buruk sebagai lokasi investasi (Anggarsari dan Aji, 2018). Menurut Mulyani (2022), fokus utama *signaling theory* adalah mengkomunikasikan aktivitas yang tidak diketahui oleh pihak eksternal. *Signaling theory* juga menunjukkan bagaimana sinyal keberhasilan dan kegagalan manajemen dikomunikasikan kepada pemilik bisnis (Fitriana et al, 2020). Perusahaan harus dapat memberikan informasi yang lengkap kepada investor sehingga investor dapat mengubah keputusannya berdasarkan sinyal yang mereka terima nantinya (Pebriani dan Sari, 2021). *Signaling theory* menjelaskan bahwa tidak hanya manajer yang memerlukan informasi tentang profitabilitas dan prospek perusahaan, tetapi investor juga menginginkan hal yang sama sebelum menanamkan modal (Reschiwati dkk, 2020). *Signaling theory* terjadi sebagai hasil pengumuman laporan keuangan yang ditangkap oleh pelaku pasar modal yang kemudian menjadi peluang atau ancaman terkait dengan

prospek investasi yang akan dilakukan (Komarudin dan Affandi, 2019). Hubungan profitabilitas dengan teori sinyal yaitu jika profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi baik untuk mengelola manajemennya. Berdasarkan investor, perusahaan yang semakin menguntungkan berarti akan memberikan sinyal positif bahwa investor juga akan mendapat manfaat dari investasi yang ditanamkan.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan sangat penting dalam dunia usaha, baik bagi internal maupun eksternal perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan tidak bisa lepas dari laporan keuangan, yang menjadi tolak ukur keberlangsungan perusahaan. Laporan tersebut mencakup semua data keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran uang, sehingga pergerakan keuangan dapat dipantau dengan jelas.

Laporan keuangan menjadi lebih bernilai bagi pihak berkepentingan jika data tersebut dapat dibandingkan antara beberapa periode untuk menganalisis kondisi perusahaan, apakah kinerja keuangannya meningkat atau menurun. Analisis ini membantu mengidentifikasi posisi, kekuatan, dan kelemahan perusahaan selama beberapa periode. Laporan keuangan menyajikan informasi standar dan bertujuan umum yang melayani berbagai pihak, yang mungkin memiliki perbedaan dalam interpretasi dan acuan terhadap informasi tersebut (Tangngisalu et al., 2020). Faktor-faktor ESG dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan. Keunggulan kompetitif yang mencakup produk dan layanan yang lebih inovatif, penghematan biaya operasi, serta aktivitas operasional yang lebih unggul, akan dihasilkan oleh perusahaan yang memenuhi standar ESG. Perusahaan yang memiliki daya saing dapat membangun reputasi dan legitimasi, yang dapat meningkatkan pendapatan dan nilai pasar (Khalil et al., 2022). Pada penelitian ini return on equity (ROE) adalah kinerja keuangan yang digunakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh ESG terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

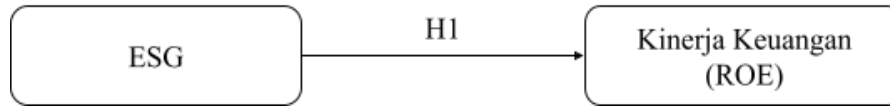
Menurut Nugroho & Hersugondo (2022), indikator perusahaan ESG bertujuan untuk memberikan informasi tambahan tentang kinerja perusahaan, yang tidak tersedia dalam laporan tahunan atau keuangan. Investor dan pihak berwenang lainnya dapat melihat kejelasan masalah dengan data yang terkait dengan ESG, ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Studi yang dilakukan oleh Bodhanwala & Bodhanwala (2018) menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara kelangsungan hidup dan profitabilitas. Selain itu, temuan studi yang dilakukan oleh Velte (2019) dan Clement (2018) menunjukkan bahwa penyebaran ESG meningkatkan profitabilitas.

H1: ESG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE)

Metode Penelitian

Populasi penelitian ini dilakukan adalah pada 63 perusahaan publik di Indonesia selama periode 2019–2021 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data pengungkapan ESG bervariasi dari tahun ke tahun. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan data. Data Perusahaan yang tidak

mengungkapkan informasi ESG secara berturut-turut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun pengamatan yang tidak akan dipilih sebagai sampel. Sampel akhir dari penelitian ini terdiri dari 10 perusahaan, menghasilkan total 30 data selama periode 2019–2021. Data tersebut secara berturut-turut mencatat informasi ESG selama periode yang sama, untuk memastikan konsistensi data dan mengurangi potensi bias.



Gambar 1. Model Penelitian

Teknik analisis data menggunakan *Moderation Regression Analysis* (MRA) dalam menguji hipotesis. Sebelum melakukan pengujian, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji asumsi klasik yang mencakup multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas sebagai persyaratan pengujian.

Hasil Analisis

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Understandardized Residual	30	-0.488	0.427	0.005	0.833
Valid N (listwise)	30				

Hasil pada tabel 1 menunjukkan nilai *skewness* $-1.14 < 1.96$ dan *kurtosis* $0.006 < 1.96$, sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang akan diolah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
ESG	1,000	1,000

Tabel 2 menunjukkan nilai toleransi semua variabel yang digunakan dalam penelitian lebih dari 0.1 serta nilai VIF di bawah 10. Oleh karena itu, model penelitian bebas dari multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil Uji Durbin Watson Didapatkan nilai DW diketahui 1.447, dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 30 (n) dan jumlah variabel independen 1 ($k = 1$), maka diperoleh nilai dL tabel sebesar 1.3520, dU tabel sebesar 1.4894, dan $4 - dU$ sebesar 2.5106. Hal ini berarti $dU < D-W < 4 - dU$

sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Std. Error Of		
			Adjusted R Square	The Estimate	Durbin Watson
1 Predictors (Constant), ESG	0.13	0.017	-0.018	0.0844474	1.447

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.036	0.025		1.461	0.155
ESG	0.048	0.039	0.025	1.223	0.322

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel tidak signifikan pada alpha 5%, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	0.13	0.017	-0.018	0,0844474

Berdasarkan Tabel 5 Adjusted R Square sebesar 0.017 atau 1.7%, menunjukkan kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Sedangkan sisanya 98.3% (100 % -1.7%), dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficient		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	2.226	0.349	6.377	0.000
ESG	-0.099	0.555	0.179	0.859

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 9 terlihat bahwa ESG memiliki nilai koefisien beta -0.099, t hitung sebesar 0.179 dengan nilai signifikansi 0.859 lebih tinggi dari 0.05 yang menunjukkan bahwa memiliki efek negatif signifikan

terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, H1 yang menyatakan bahwa ESG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan ditolak.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penerapan praktik ESG tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, namun perlu dicatat bahwa tidak menunjukkan bahwa praktik ESG tidak bermanfaat. Pengungkapan lingkungan memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal yang menjadi penyebab menurunnya kinerja keuangan meskipun perusahaan telah terlibat dalam aktivitas lingkungan adalah berkaitan dengan rendahnya pemanfaatan informasi pengungkapan lingkungan oleh investor dan pemangku kepentingan lainnya (Angela et al., 2023).

Ada sejumlah alasan mengapa praktik ESG belum menghasilkan hasil yang signifikan. Biaya implementasi merupakan komponen penting. Untuk menerapkan praktik ESG, diperlukan dana besar untuk infrastruktur, teknologi, pelatihan karyawan, dan penyesuaian prosedur bisnis. Dalam jangka pendek, biaya-biaya tersebut dapat menurunkan margin laba perusahaan, yang berdampak negatif pada kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan mungkin tidak dapat membuktikan keuntungan jangka panjang dari investasi ESG, yang membuat mereka enggan mengalokasikan sumber daya yang signifikan.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran juga menjadi kendala. Banyak pemangku kepentingan, termasuk manajemen perusahaan, karyawan, dan investor, yang belum memahami pentingnya praktik ESG dan potensi manfaatnya. Keterbatasan pemahaman ini dapat menghambat perusahaan dalam mengintegrasikan ESG secara efektif ke dalam strategi dan operasi bisnis. Kurangnya kesadaran juga dapat menyebabkan rendahnya dukungan dan komitmen dari seluruh lapisan organisasi untuk mengimplementasikan praktik ESG.

Selain dua faktor tersebut, terdapat pula potensi kendala lain yang dapat menghambat dampak positif praktik ESG terhadap kinerja keuangan. Tantangan dalam pengukuran dan pelaporan kinerja ESG yang dapat diandalkan dan dapat dibandingkan, kompleksitas dalam menyelaraskan praktik ESG dengan tujuan bisnis, resistensi budaya atau organisasi terhadap perubahan, serta kurangnya insentif atau kebijakan regulasi yang mendukung juga menjadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Kombinasi dari berbagai kendala ini dapat menghambat perusahaan dalam memanfaatkan praktik ESG secara optimal untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Meskipun demikian, ESG masih memiliki potensi untuk membantu perusahaan dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kinerja keuangan, meskipun ada beberapa hambatan untuk menerapkan praktik ESG. Peningkatan reputasi perusahaan adalah keuntungan utama. Praktik ESG yang efektif juga dapat membantu mengurangi berbagai risiko, baik operasional, hukum, maupun reputasional, dan dapat membangun citra positif di mata pemangku kepentingan, mendorong loyalitas pelanggan, dan

memudahkan akses ke pasar modal. Ini dapat meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, perusahaan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi implementasi ESG yang berkelanjutan. Dengan demikian, perusahaan dapat menuai manfaat ESG dan sekaligus meningkatkan kinerja keuangan mereka.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan ESG tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, ESG masih memiliki potensi untuk membantu perusahaan dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan reputasi perusahaan dan mengurangi berbagai risiko. Untuk memanfaatkan praktik ESG secara optimal, perusahaan perlu mengatasi berbagai kendala, termasuk biaya implementasi dan kurangnya pemahaman, serta bekerja sama dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

Daftar Pustaka

- Bodhanwala, Shernaz, and Ruzbeh Bodhanwala. "Does Corporate Sustainability Impact Firm Profitability? Evidence From India." *Management Decision*, 2018, <https://doi.org/10.1108/MD-04-2017-0381>.
- Dwianto, Agus, et al. "Praktik Bisnis Berkelanjutan: Mengevaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Pertimbangan Environmental, Social, and Governance (ESG)." *Jurnal Cahaya Mandalika*, vol. 3, 2024, <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2456>.
- Farika, Vi'en Diah, and Nurma Gupita Dewi. "Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas." vol. Volume08, No.01, 2023, <https://doi.org/10.33772/jak.v8i1.42>.
- GHOZALI, IMAM. "25 GRAND THEORY." 2020.
- Khalil, Muhammad Azhar, et al. "Environmental, social and governance (ESG) - augmented investments in innovation and firms' value: a fixed-effects panel regression of Asian economies." *China Finance review International*, vol. 14, no. 1, 2024, pp. 76-102, <https://doi.org/10.1108/CFRI-05-2022-0067>.
- Nugroho, Naufal Adi, and Hersugondo Hersugondo. "Analysis of the Effect of Environment, Social, Governance (ESG) Disclosure on the Company's Financial Performance." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2022, <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v15i2.810>.
- Ratajczak, Piotr, and Grzegorz Mikolajewicz. "The impact of environmental, social and corporate governance responsibility on the cost of short- and long-term debt." *Economics and Business Review*, vol. 21, no. 2, 2021, pp. 74-96, 10.18559/ebr.2021.2.6.
- Tangngisalu, Jannati, et al. "CSR and Firm Reputation from Employee Perspective." *Journal of Asian Finance and Business*, vol. 7, no. 10, 2020, pp. 171-182, <http://dx.doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.171>.
- Triyani, A., et al. "The Effect Of Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosure on Firm Performance: The Role of Ceo Tenure." *Reviu Akuntansi dan Keuangan*, vol. 12, no. 2, 2020, p. 261, <https://doi.org/10.22219/jrak.v10i2.11820>.
- Velte, Patrick. "The bidirectional relationship between ESG performance and earnings management – empirical evidence from Germany." *Journal of Global Responsibility*, vol. 10, no. 4, <https://doi.org/10.1108/JGR-01-2019-0001>.

Velte, Petrick. "The bidirectional relationship between ESG performance and earnings management – empirical evidence from Germany." *Journal of Global Responsibility*, vol. 10, no. 4, 2019, pp. 322-338, <https://doi.org/10.1108/JGR-01-2019-0001>.

Penilaian Kinerja Berbasis *Balanced Scorecard* pada PT Blue Bird Tbk Sebelum dan Setelah Diluncurkannya Layanan Go-BlueBird (2015-2022)

Efraim Perjuangan

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta Selatan, 12760
efraimperjuangan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak peluncuran layanan Go-BlueBird terhadap kinerja PT Blue Bird Tbk dengan menggunakan kerangka kerja *Balanced Scorecard*. Analisis dilakukan dengan membandingkan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah tahun 2017, yaitu tahun peluncuran layanan tersebut. Data sekunder yang digunakan mencakup laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan dalam periode 2015–2022. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada berbagai perspektif *Balanced Scorecard* pasca peluncuran Go-BlueBird. Kinerja keuangan perusahaan mengalami pertumbuhan signifikan, meskipun sempat terdampak pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi layanan digital telah memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan perusahaan. Dari perspektif pelanggan, peningkatan jumlah penghargaan yang diterima perusahaan menunjukkan adanya peningkatan kepuasan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Sementara itu, dari perspektif proses bisnis internal, pertumbuhan armada kendaraan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas layanan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Terakhir, dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, peningkatan biaya pelatihan mengindikasikan komitmen perusahaan dalam mengembangkan kompetensi karyawan. Meskipun sempat mengalami penurunan akibat pandemi, perusahaan tetap berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan daring.

Kata Kunci: Kinerja, Penilaian Kinerja, *Balanced Scorecard*.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat dan juga semakin berkembang dalam dunia bisnis. Perusahaan banyak menggunakan teknologi untuk proses berjalannya perusahaan. Dengan banyaknya penggunaan teknologi, maka persaingan antar perusahaan pun semakin ketat. Hal ini membuat perusahaan berlomba-lomba untuk memiliki sesuatu dalam mencari informasi, karena informasi merupakan hal dasar yang penting bagi perusahaan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk mengakses dan menganalisis informasi secara akurat menjadi sangat krusial. Perusahaan-perusahaan terkemuka menyadari hal ini dan terus mengembangkan strategi bisnis yang inovatif untuk unggul (Gunanta, 2012).

Industri transportasi, khususnya taksi, mengalami transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Munculnya layanan transportasi *online* seperti Gojek telah menciptakan persaingan yang semakin ketat di pasar. PT Blue Bird Tbk, sebagai salah satu perusahaan taksi konvensional terkemuka di Indonesia, merespons tantangan ini dengan meluncurkan layanan Go-BlueBird pada Maret 2017.

Go-BlueBird merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan taksi konvensional ternama, PT Blue Bird Tbk, dan perusahaan rintisan teknologi, Gojek, sebagai respons terhadap disrupsi digital di industri transportasi. Melalui integrasi dengan aplikasi Gojek, Blue Bird berupaya memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Kolaborasi ini mencerminkan upaya perusahaan tradisional untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas.

Melalui pengukuran kinerja akan diperoleh informasi mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja. Salah satu alat analisis kinerja perusahaan adalah analisis *Balanced Scorecard* (BSC). Penggunaan beberapa perspektif BSC dalam mengukur kinerja perusahaan diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan terbaik mengenai evaluasi dan penilaian bisnis. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Samuel & Valentine (2021), dengan hasil penelitian yang dapat dijelaskan secara rinci untuk setiap perspektif.

BSC menerjemahkan visi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan pengukuran, yang disusun dalam empat perspektif, yaitu: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis, BSC telah membantu banyak perusahaan mengukur kinerja secara efisien, sehingga mempermudah mereka dalam mencapai tujuan bisnis (Aldi, 2023).

Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas strategi inovasi yang dilakukan oleh PT Blue Bird Tbk dalam menghadapi disrupsi digital.

Studi Literatur

Kinerja

Menurut (Amstrong dan Baron, 2018) Kinerja adalah ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Baik itu perusahaan yang mencari keuntungan (*profit*) atau organisasi nirlaba (*non-profit*), kinerja menunjukkan seberapa efektif dan efisien organisasi dalam menjalankan kegiatannya dalam periode waktu tertentu. Menurut (Afandi, 2018) Kinerja adalah bukti nyata sejauh mana visi, misi, dan tujuan organisasi telah terwujud melalui tindakan nyata.

Penilaian Kinerja

Menurut (Kasmir, 2016) Penilaian kinerja adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengukur dan menilai seberapa baik seorang karyawan telah melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu tertentu. Hasil dari penilaian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk berbagai keputusan, seperti kenaikan gaji, promosi, atau pengembangan karyawan. Menurut (Hartantik, 2014) Penilaian kinerja bukan hanya sekedar menilai hasil kerja yang telah dicapai, tetapi juga melihat potensi yang dimiliki oleh karyawan.

Tujuan Penilaian Kinerja

Menurut (Kasmir, 2016) penilaian kinerja merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala. Kegiatan ini memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya untuk mengukur sejauh mana karyawan telah mencapai target yang ditetapkan, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja, serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karir, kompensasi, dan kebutuhan pelatihan. Selain itu, penilaian kinerja juga berfungsi untuk memperkuat komunikasi antara atasan dan bawahan, membangun budaya kerja yang positif, serta memastikan bahwa setiap karyawan berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut (Zainal, 2015) penilaian kinerja merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik mengenai kinerja karyawan terhadap tujuan organisasi. Menurut (Sedarmayanti, 2010) penilaian kinerja merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja individu maupun organisasi secara menyeluruh. Melalui penilaian ini, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, mengukur pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Berdasarkan acuan yang diberikan, penilaian kinerja memiliki tujuan utama untuk mengevaluasi sejauh mana karyawan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari penilaian ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja individu karyawan, merancang program pengembangan, serta mengoptimalkan strategi bisnis perusahaan.

Balanced Scorecard

Menurut (Luis dan Biromo, 2007) *Balanced Scorecard* adalah kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur kinerja perusahaan dari berbagai perspektif. Menurut (Atkinson et.al, 2012) *Balanced Scorecard* memungkinkan kita menilai kinerja organisasi tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari perspektif pelanggan, proses internal, dan kemampuan untuk terus belajar dan berkembang.

Menurut (Kaplan & Norton, 2000) *Balanced Scorecard* mencakup empat perspektif:

1. Perspektif Keuangan
Berfokus pada bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan bagaimana laporan keuangan perusahaan NPWP dinilai baik oleh pemegang saham.
2. Perspektif Pelanggan
Berfokus pada bagaimana pelanggan memandang produk dan layanan yang dihasilkan oleh perusahaan.
3. Perspektif Bisnis Internal
Berfokus pada bagaimana perusahaan mampu mempertahankan segmen pasar dan pelanggan dari inovasi produk baru yang dihasilkan oleh perusahaan.
4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Berfokus pada kemampuan perusahaan dalam mempertahankan sumber daya manusia di dalam perusahaan sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Penelitian ini akan mengukur keberhasilan PT Blue Bird Tbk sebelum dan sesudah bekerja sama dengan Gojek (melalui layanan Go-BlueBird) dari tahun 2015 hingga 2022.

Peneliti akan menggunakan laporan keuangan perusahaan serta metode *Balanced Scorecard* yang melihat dari empat sisi: keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan perusahaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, selanjutnya PT Blue Bird Tbk menjadi objek penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dari laporan keuangan perusahaan yang didapatkan dari *website* Bluebird Group. Peneliti menggunakan periodisasi sebelum dan setelah tahun 2017 dalam rentang delapan tahun terhitung sejak tahun 2015–2022.

Selain itu peneliti tidak lupa mempertimbangkan aspek lain yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini yakni masa pandemi, peneliti menetapkan periodisasi pandemi dalam rentang (2020–2021).

Tolak Ukur setiap perspektif adalah:

1. Perspektif Keuangan

a. *Return on Asset*

$$\text{ROA: } \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

b. *Return on Equity*

$$\text{ROE: } \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

c. Kenaikan/Penurunan Pertumbuhan Pendapatan

$$\frac{(\text{Pendapatan Periode Sekarang} - \text{Pendapatan Periode Lalu})}{\text{Pendapatan Periode Lalu}} \times 100\%$$

d. Kenaikan/Penurunan Pertumbuhan Laba Bersih

$$\frac{(\text{Laba Bersih Periode Sekarang} - \text{Laba Bersih Periode Lalu})}{\text{Laba Bersih Periode Lalu}} \times 100\%$$

e. Kenaikan/Penurunan Pertumbuhan Biaya Operasi

$$\frac{(\text{Biaya Operasi Periode Sekarang} - \text{Biaya Operasi Periode Lalu})}{\text{Biaya Operasi Periode Lalu}} \times 100\%$$

2. Perspektif Pelanggan

Apabila penghargaan eksternal perusahaan meningkat setelah tahun 2017 meningkat, hal tersebut mencerminkan kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan, begitu pula sebaliknya.

3. Perspektif Bisnis Internal
Apabila unit armada yang dioperasikan perusahaan setelah tahun 2017 meningkat, hal tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan dalam berinovasi, begitu pun sebaliknya.
4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Apabila biaya pelatihan yang dikeluarkan perusahaan meningkat setelah tahun 2017, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan ingin mempertahankan kompetensi SDM yang ada di Perusahaan, begitu pula sebaliknya.

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Keuangan

Perspektif keuangan menilai kinerja keuangan perusahaan menggunakan 5 tolok ukur untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik bagi pemegang saham.

Tabel 1. Peningkatan dan Penurunan pada ROA dan ROE (2015–2022)

Tahun	ROA (%)	Peningkatan/ Penurunan	ROE (%)	Peningkatan/ Penurunan
2015	11.59	-	19.15	-
2016	6.99	-39.70%	10.94	-42.87%
2017	6.56	-6.13%	8.67	-20.77%
2018	6.62	0.88%	8.74	0.83%
2019	4.25	-35.76%	5.84	-33.24%
2020	-2.25	-152.92%	-3.12	-153.41%
2021	0.13	-105.87%	0.17	-105.43%
2022	5.28	3895.95%	6.80	3916.15%

Sumber: Data Diolah Peneliti

Tabel 2. Peningkatan dan Penurunan pada Pendapatan dan Laba Bersih (2015–2022)

Tahun	Pendapatan (dalam jutaan Rp)	Peningkatan/ Penurunan	Laba Bersih (dalam jutaan Rp)	Peningkatan/ Penurunan
2015	5,472,328.00	-	828,948.00	-
2016	4,796,096.00	-12.36%	510,203.00	-38.45%
2017	4,203,846.00	-12.35%	427,495.00	-16.21%
2018	4,218,702.00	0.35%	460,273.00	7.67%
2019	4,047,691.00	-4.05%	315,622.00	-31.43%
2020	2,046,660.00	-49.44%	-163,183.00	-151.70%
2021	2,220,841.00	8.51%	8,720.00	-105.34%
2022	3,590,100.00	61.65%	364,027.00	4074.62%

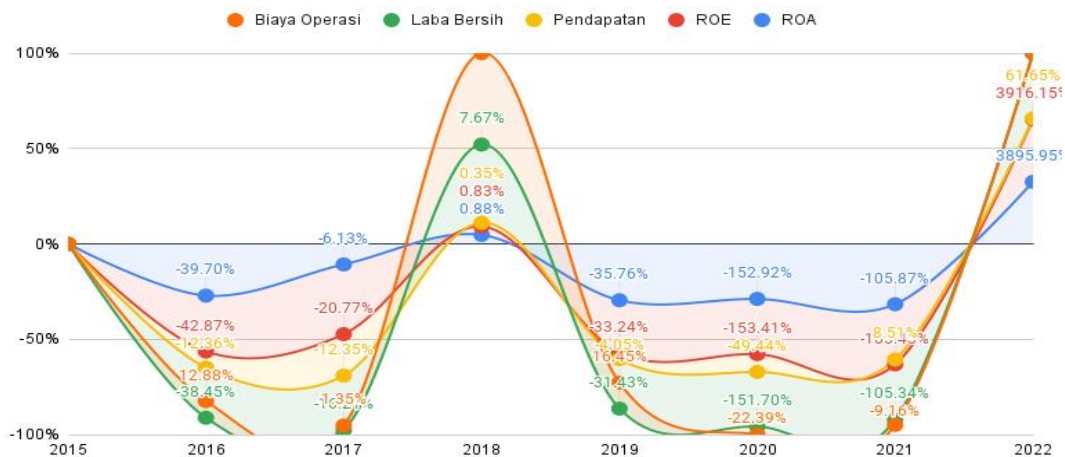
Sumber: Data Diolah Peneliti

Tabel 3. Peningkatan dan Penurunan pada Biaya Operasi (2015–2022)

Tahun	Biaya Operasi (dalam jutaan Rp)	Peningkatan/ Penurunan
2015	498,441.00	-
2016	562,622.00	12.88%
2017	570,236.00	1.35%
2018	621,300.00	8.95%
2019	723,515.00	16.45%
2020	561,547.00	-22.39%
2021	510,115.00	-9.16%
2022	652,517.00	27.92%

Sumber: Data Diolah Peneliti

Gambar 1. Peningkatan dan Penurunan pada ROA, ROE, Pendapatan, Laba Bersih, Biaya Operasi (2015–2022)



Sumber: Data Diolah Peneliti

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang ditandai sesudah dan sebelum tahun 2017, satu tahun setelah Go-BlueBird diluncurkan menunjukkan adanya peningkatan dari setiap tolok ukur yang digunakan, walaupun terjadi tren penurunan setelahnya akibat pandemi. Di tahun 2022 terjadi lonjakan yang signifikan dari rata-rata sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan kinerja keuangannya.

Perspektif Pelanggan

Perspektif pelanggan menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui layanan. Dilansir dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan PT Blue Bird Tbk di Bursa Efek Indonesia, dengan menggunakan tolok ukur jumlah penghargaan dalam perspektif pelanggan.

Hasil Pengolahan data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada jumlah penghargaan dalam rentang dua tahun pasca diluncurkannya layanan Go-BlueBird pada tahun 2017. Hal ini dapat terjadi karena hasil pelayanan yang diberikan perusahaan dapat dirasakan oleh konsumen sehingga penghargaan yang diterima perusahaan pun semakin meningkat

Tabel 4. Grafik Peningkatan dan Penurunan pada Penghargaan (2015–2022)

Tahun	Penghargaan	Peningkatan/ Penurunan
2015	23	-
2016	20	-13.04%
2017	11	-45.00%
2018	8	-27.27%
2019	12	50.00%
2020	8	-33.33%
2021	4	-50.00%
2022	4	0.00%

Sumber: Data Diolah Peneliti

Perspektif Bisnis Internal

Perspektif bisnis internal menilai kemampuan perusahaan dalam berinovasi menghasilkan produk- produk baru seiring dengan kebutuhan konsumen. Dilansir dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan PT Blue Bird Tbk di Bursa Efek Indonesia, unit armada yang dioperasikan menjadi tolok ukur dalam perspektif bisnis internal.

Tabel 5. Grafik Peningkatan dan Penurunan pada Unit Armada

Tahun	Unit Armada	Peningkatan/Penurunan
2015	33,427	-
2016	31,716	-5.12%
2017	29,001	-8.56%
2018	29,367	1.26%
2019	28,508	-2.93%
2020	23,808	-16.49%
2021	20,017	-15.92%
2022	20,830	4.06%

Sumber: Data Diolah Peneliti

Hasil Pengolahan data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada unit armada dalam rentang satu tahun pasca diluncurkannya layanan Go-BlueBird (2017), pasca pandemi (2020–2021) kembali mengalami kenaikan. Hal ini dapat terjadi karena hasil pelayanan yang diberikan perusahaan dapat dirasakan oleh konsumen sehingga kebutuhan akan armada perusahaan pun kembali meningkat.

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Perspektif ini menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kemampuan sumber daya manusia di perusahaan agar bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan di perusahaan. Dilansir dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan PT Blue Bird Tbk di Bursa Efek Indonesia, tolok ukurnya adalah besarnya biaya pelatihan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

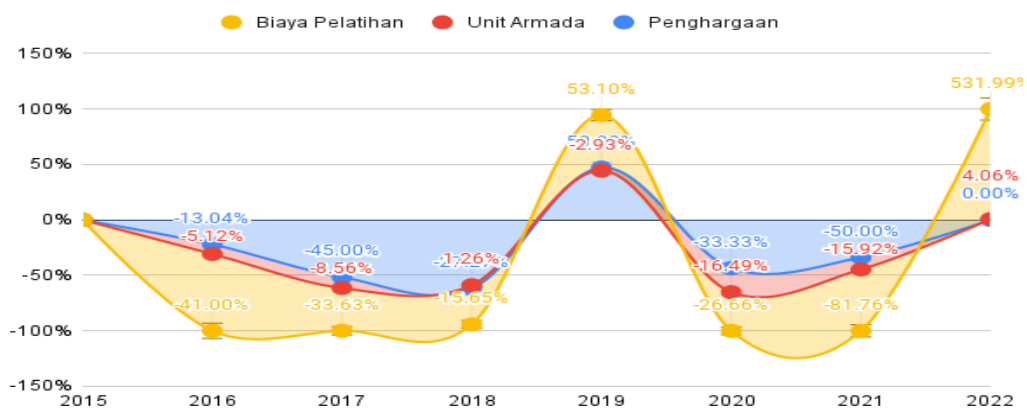
Tabel 6. Peningkatan dan Penurunan pada Biaya Pelatihan (2015–2022)

Tahun	Biaya Pelatihan (dalam jutaan Rp)	Peningkatan/Penurunan
2015	4,390	-
2016	2,590	-41.00%
2017	1,719	-33.63%
2018	1,450	-15.65%
2019	2,220	53.10%
2020	1,628.2	-26.66%
2021	297	-81.76%
2022	1,877	531.99%

Sumber: Data Diolah Peneliti

Data diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah biaya pelatihan dalam kurun tahun 2017–2019. Penurunan terjadi dalam periode 2020–2021, disebabkan oleh perusahaan pada masa pandemi yang sulit untuk melakukan pelatihan secara tatap muka sehingga perusahaan lebih memilih untuk melakukan pelatihan secara daring agar kompetensi setiap karyawan tetap meningkat walaupun di masa pandemi, selanjutnya tahun 2022 pasca pandemi, biaya pelatihan naik secara signifikan.

Gambar 2. Peningkatan dan Penurunan pada Penghargaan, Unit Armada, Biaya Pelatihan (2015–2022)



Sumber: Data Diolah Peneliti

Kesimpulan

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa *Balanced Scorecard* merupakan alat yang sangat berharga bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja secara

berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif, *Balanced Scorecard* mampu menyelaraskan tujuan strategis perusahaan dengan tindakan operasional sehari-hari, sehingga meningkatkan efektivitas pencapaian visi dan misi.

Penilaian kinerja dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* pada PT Blue Bird Tbk sebelum dan setelah diluncurkannya layanan Go-BlueBird pada Maret 2017 diperoleh hasil bahwa perspektif keuangan mengalami tren peningkatan, perspektif pelanggan mengalami tren peningkatan, perspektif bisnis internal mengalami tren peningkatan, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran mengalami tren peningkatan.

Analisis atas hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Blue Bird Tbk memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan. Strategi yang dapat diterapkan meliputi penguatan pengelolaan keuangan, khususnya pada sektor jasa, untuk mencapai target laba yang lebih tinggi. Di sisi lain, perusahaan perlu fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin beragam. Selain itu, inovasi dalam teknologi armada dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan yang terarah juga menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan benchmark yang lebih luas dan terintegrasi dengan seluruh perspektif *Balanced Scorecard*. Hal ini akan memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang efektivitas program pelatihan dalam meningkatkan kompetensi karyawan dan efisiensi biaya yang dikeluarkan.

Daftar Pustaka

- Afandi, A. (2018). Bumi Aksara. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta.
- Aldi. (2023). Widya Cipta. *Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Balanced Scorecard di PT Indofood Sukses Makmur Tbk*.
- Armstrong, M., & Baron, A. (2018). Kogan Page. *Strategic Human Resource Management*. London.
- Atkinson, A.A., Waterhouse, J.H., & Wells, R.B. (2012). Jakarta: Rajawali Pers. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*.
- Gunanta. (2012). Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama. *Pendekatan Balanced Scorecard Sebagai Penilaian Kinerja Pada Institusi Sekolah*, 1(1), 275-284.
- Hartatik, I.P. (2014). Laksana. *Buku Praktis Mengembangkan SDM*.
- Kasmir, A. (2016). Jakarta: Bumi Aksara. *Kinerja Karyawan: Teori dan Praktik*.
- Luis, S., & Biromo, P.A. (2007). PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. *Step by Step in Cascading Balanced Scorecards to Functional Scorecards*.
- Sedarmayanti. (2010). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Pengembangan Instrumen. *Evaluasi Ranah Afektif Untuk Pendidikan Agama Islam*.
- Zainal, & Veithzal Rivai. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Edisi ke-7. Depok: PT RAJAGRAFINDO.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

(Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)

Rohmatul Khasanah¹, Nanik Niandari², Tio Waskito Erdi^{3*}

^{1,2,3} *Akuntansi, Politeknik YKPN, Yogyakarta, 55222*

**tiowaskito@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini berlokasi pada Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang disebarkan kepada 80 Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Petanahan. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS) pada dasarnya terdiri atas 2 macam pengujian, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan *structural model* (*inner model*) dengan menggunakan SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Wulandari & Wahyudi, 2022). Seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi, saat ini banyak wajib pajak yang lalai dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai fungsi *budgeter* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Wulandari & Wahyudi, 2022). Hal tersebut menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tabel 1 menunjukkan bahwa sumber utama dari penerimaan Negara Indonesia terletak pada sektor pajak. Setiap tahun, nominal pendapatan pajak selalu mengalami peningkatan. Dilihat dari nilai persentasenya, pendapatan pajak selalu menduduki persentase di atas 70%. Dengan angka yang sedemikian tinggi, maka penerimaan pajak

memegang peranan yang sangatlah penting dalam roda perekonomian Indonesia (Jannah, 2016).

Tabel 1. Presentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2019–2023

Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Total	Persentase Pajak
2019	1.546.142	408.994	5.497	1.960.634	79%
2020	1.285.136	343.814	18.833	1.647.783	78%
2021	1.547.841	458.493	5.013	2.011.347	77%
2022	2.034.553	595.595	5.696	2.635.843	77%
2023	2.118.348	515.801	3.100	2.637.249	80%

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2024

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Meilita & Pohan (2022) kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi saat wajib pajak dimana dilakukan untuk pemenuhan keseluruhan kewajiban pajak mereka serta melakukan hak perpajakan. Pembayaran pajak untuk tujuan memberi kontribusi bagi pembangunan negara di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya diharap bisa membayarkan pajak dengan sukarela kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan baik dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak. Bentuk dari kepatuhan wajib pajak antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak.

Tabel 2. Target dan Realisasi PBB P2 Kecamatan Petanahan

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi	Sisa Piutang PBB	Persentase
2023	3.018.280.274	2.932.609.787	85.670.487	97%
2022	3.020.732.315	2.963.077.671	57.654.644	98%
2021	2.556.878.054	2.515.295.092	41.582.962	98%
2020	2.563.412.862	2.527.481.122	35.931.740	99%
2019	2.568.401.448	2.568.401.448	0	100%

Sumber: kebumenkab.go.id

Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa pendapatan PBB di Kecamatan Petanahan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 target pendapatan PBB sebesar Rp2.568.401.448 terealisasi 100%. Pada tahun 2020 target pendapatan PBB sebesar Rp2.563.412.862 dan pendapatan yang terealisasi sebesar 99%. Persentase pendapatan terealisasi tahun 2020 menurun sebesar 1% (100%–99%). Kemudian di tahun 2021 target pendapatan PBB sebesar Rp2.556.878.054 dan pendapatan yang terealisasinya sebesar 98%. Tahun 2021 pendapatan terealisasi juga mengalami penurunan sebesar 1% (99%–98%). Di tahun 2022 target pendapatan PBB sebesar Rp3.020.732.315 dan pendapatan yang terealisasi sama seperti di tahun sebelumnya yaitu 98%. Kemudian di tahun 2023 target pendapatan PBB sebesar Rp3.018.280.274 dan pendapatan yang terealisasi sebesar 97%. Persentase pendapatan yang terealisasi mengalami penurunan sebesar 1% (98%–97%). Dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2019–2023 jumlah realisasi PBB di Kecamatan Petanahan setiap tahun

mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Petanahan masih kurang.

Kartikasari & Estiningrum (2022) dalam penelitiannya terhadap wajib pajak Desa Domasan mengungkapkan ada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal seperti kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak ialah sosialisasi perpajakan, usia dan jenis pekerjaan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022) di Desa Mranggen Kabupaten Demak menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Begitu pula penelitian Febrian & Ristiliana (2019) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada penelitian sebelumnya, peneliti ingin menguji kepatuhan wajib pajak, karena masih terdapat fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya. Pajak bumi dan bangunan bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dimaksud adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi dan kualitas pelayanan pajak dalam membayar PBB P2.

Menurut Kartikasari & Yadnyana (2020) pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penelitian yang dilakukan Mumu et al., (2020) mengemukakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, Ainun (2022) dalam penelitian menemukan hal serupa yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Trisnawati & Sudirman (2015) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di kota Denpasar.

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Febrian & Ristiliana (2019) mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didukung penelitian Seralurin et al (2021) sosialisasi pajak tidak hanya memberikan pemahaman tentang kewajiban pajak, tetapi juga menciptakan kesadaran akan konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak.

Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia

(SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan Wulandari & Wahyudi (2022). Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan Wulandari & Wahyudi (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020), dan Cynthia & Djauhari (2020) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang mengambil objek penelitian dari sudut pandang wajib pajak di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen dan dituangkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul "Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB P2 Kecamatan Petanahan" Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusnidar (2015) dengan judul pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (studi pada wajib pajak PBB P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang) dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, kemudian variabel independen yang memengaruhi variabel dependen adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran dan sanksi.

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022) Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Subjek Pajak PBB yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Kesadaran Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakan. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. (Yanti dkk., 2021). Wajib Pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela (Yanti dkk., 2021). Penelitian yang dilakukan Mumu et al., (2020) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama disusun sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kartikasari & Yadnyana (2020) pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Menurut Mulyati & Ismanto (2021 dalam Hantono & Sianturi (2022), pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak harus meliputi, pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Wulandari & Wahyudi (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Orang yang memiliki pengetahuan pajak dianggap memiliki pemahaman akan fungsi pajak dan juga sanksi apabila tidak menjalankan kewajiban perpajakan sehingga diharapkan orang yang memiliki pengetahuan pajak akan mematuhi ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis kedua disusun sebagai berikut:

H2: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Wardani, 2018) dalam (Nofenlis dkk., 2022). Sosialisasi bisa dilakukan melalui media cetak, elektronik, spanduk, brosur serta seminar pajak. Sabat & Ismail (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang cukup dari pemerintah tentang perpajakan dan kemudahan bagi wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan diharapkan dapat memberikan persepsi dan pemahaman yang baik kepada wajib pajak sehingga meningkatkan keinginan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan atau dengan kata lain mematuhi ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga disusun sebagai berikut:

H3: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Kualitas Pelayanan Fiskus

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan perpajakan dibentuk oleh dimensi kualitas sumber daya manusia (SDM), ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan Wulandari & Wahyudi (2022). Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan Wulandari & Wahyudi (2022). Dalam penelitian Amrul et al. (2020) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik dari pegawai pajak diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang pada

akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat disusun sebagai berikut:

H4: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang akan diteliti berbentuk pengaruh variabel *independent* (kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi, dan kualitas pelayanan) dengan variabel *dependent* (kepatuhan wajib pajak). Dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung berupa pendapat dari masyarakat Kecamatan Petanahan dengan menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Serta sekunder yang diambil dari Kantor Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Kebumen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik pemilihan probabilitas secara acak *probability sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang ada di Kecamatan Petanahan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Kuesioner dibagikan pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Petanahan. Pengumpulan data dari wajib pajak dilakukan untuk memperoleh data mengenai Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi dan Pelayanan Fiskus. Setelah data diperoleh maka data akan dianalisis dengan menggunakan analisis data berupa *Partial Least Square* (PLS). Teknik dan metode analisis dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis PLS (Erdi, 2023). Metode ini digunakan untuk menguji mengembangkan teori atau membangun teori. Pengujian dengan menggunakan metode PLS pada dasarnya terdiri atas 2 macam pengujian, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan *structural model* (*inner model*) menguji hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS 4.0.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini menggunakan responden 81 orang. Dari 81 responden yang diterima, satu kuesioner diantaranya tidak dapat digunakan akibat pengisian yang kurang lengkap, sehingga total kuesioner yang memenuhi syarat dan dapat diolah berjumlah 80 kuesioner. Responden tersebut berasal dari data sebaran kuesioner dari wajib pajak PBB yang ditemui penulis. Analisis ini menyajikan data responden sesuai dengan jawaban kuesioner yang disebar dan observasi langsung penulis, dengan maksud untuk mengetahui karakteristik responden serta hasil responden secara jelas.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat response rata rata berjenis kelamin laki-laki berjumlah 42 orang, kemudian diikuti yang berjenis perempuan sejumlah 38 orang. Responden yang berumur lebih dari 50 tahun sejumlah 35 orang, kemudian diikuti responden yang berumur 41–50 tahun sejumlah 23 orang. Responden yang berpendidikan SD berjumlah 33 responden dan yang berpendidikan SMP sejumlah

masing-masing 26 orang, kemudian diikuti responden yang berpendidikan SMA/SMK sejumlah 19 orang. Responden dengan pekerjaan petani/pekebun/pedagang sejumlah 27 orang diikuti dengan pekerjaan lainnya sejumlah 11 orang.

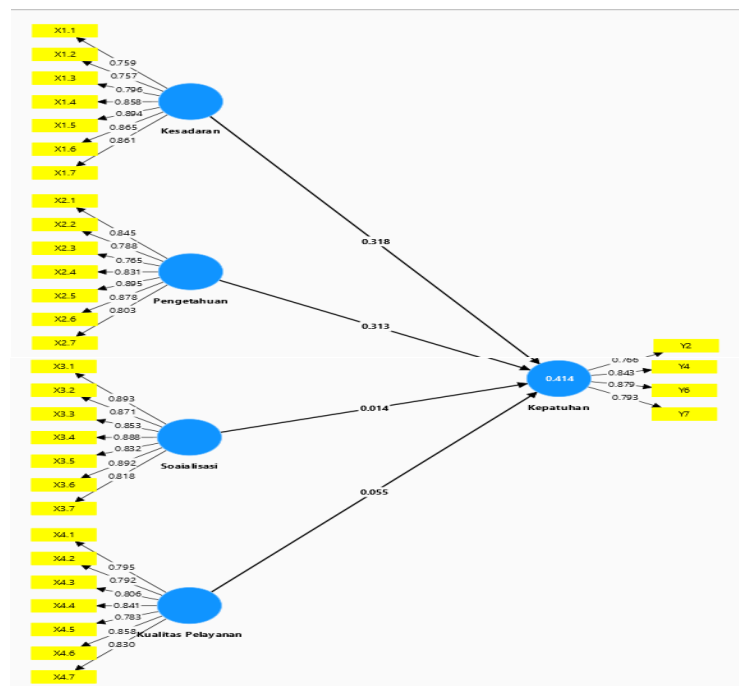
Tabel 3. Statistik Deskriptif Identitas Responden

Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki – Laki	42	53%
	Perempuan	38	48%
Umur	20–30 Tahun	3	4%
	31–40 Tahun	19	24%
	41–50 Tahun	23	29%
	>50 Tahun	35	44%
Pendidikan	SD	33	41%
	SMP	26	33%
	SMA/SMK	19	24%
	D1/D2/D3	0	0%
	S1/S2/S3	2	3%
Pekerjaan	Pegawai Negeri	1	1%
	Pegawai Swasta	7	9%
	Wirausaha	10	13%
	Petani/Pekebun/Pedagang	46	58%
	Lainnya	16	20%

Sumber : Data Primer Diolah 2024

Model Pengukuran (Outer Model)

Gambar 1. Pengukuran Outer dan Inner Model



Sumber: Olah Data (2024)

Berdasarkan hasil uji *outer model* untuk variabel kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus masing-masing nilai *loading factor* dalam indikator telah memenuhi syarat $> 0,7$. *Outer loading* merupakan nilai yang menjelaskan korelasi antara suatu indikator dengan variabel latennya . Oleh sebab itu, semakin tinggi *loading factor* dalam setiap variabel maka semakin erat hubungannya antara suatu indikator dengan variabel latennya (Erdi, 2023)

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji Validitas Konvergen

Tabel 4. Construct Reability and Validity

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan	0.839	0.851	0.892	0.674
Kesadaran	0.924	0.939	0.939	0.687
Kualitas Pelayanan	0.916	0.923	0.933	0.665
Pengetahuan	0.925	0.934	0.939	0.690
Sosialisasi	0.944	0.949	0.954	0.747

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2024

Uji validitas konvergen yang digunakan bertujuan untuk mengukur sejauh mana konstruk berkaitan dengan variabel laten dalam menilai validitas konvergen (Devi, 2024). Dalam uji validasi konvergen untuk nilai *factor loading* yang lebih dari 0.7 menandakan bahwa sebuah indikator dianggap andal dan suatu variabel dikatakan memiliki validitas apabila *Average Variance Extracted* (AVE) yang dimilikinya melebihi 0.5. Berdasarkan Tabel 4 di atas bahwa dapat dilihat nilai AVE masing-masing variabel nilainya sudah di atas 0.5 maka dikatakan valid secara konvergen. Dan untuk *outer loading* bisa dilihat di Tabel 4. Semua *outer loading* sudah diatas 0.7 makan menandakan semua indikator dianggap andal.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 5. Discriminant Validity Fornell-Larcker

	Kepatuhan	Kesadaran	Kualitas Pelayanan	Pengetahuan	Sosialisasi
Kepatuhan	0.821				
Kesadaran	0.600	0.829			
Kualitas Pelayanan	0.524	0.732	0.815		
Pengetahuan	0.598	0.739	0.718	0.831	
Sosialisasi	0.512	0.704	0.778	0.739	0.864

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2024

Uji validitas diskriminan bertujuan untuk memverifikasi bahwa konstruk reflektif menunjukkan hubungan yang lebih kuat dengan indikatornya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain (Hair et al., 2022 dalam SmartPLS, 2024), uji ini mengandalkan penilaian *Fornell-Larcker*. Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat nilai akar kuadrat variabel kesadaran, pengetahuan, sosialisasi dan kualitas pelayanan, masing-masing sebesar 0.821, 0.829, 0.815, dan 0.864. Nilai ini lebih besar dibandingkan antara nilai korelasi variabel-variabel tersebut dengan variabel lainnya di dalam model penelitian. Oleh sebab itu, variabel kesadaran, pengetahuan, sosialisasi dan kualitas pelayanan telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan pendekatan *Fornell-Larcker*.

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan	0.839	0.851	0.892	0.674
Kesadaran	0.924	0.939	0.939	0.687
Kualitas Pelayanan	0.916	0.923	0.933	0.665
Pengetahuan	0.925	0.934	0.939	0.690
Sosialisasi	0.944	0.949	0.954	0.747

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2024

Uji reliabilitas dilakukan dengan perhitungan *Alpha Cronbach*, yang menunjukkan bahwa variabel yang digunakan untuk mengukur konsep dalam penelitian ini cukup reliable. Uji reliabilitas terdiri dari *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. *Rule of thumb* uji reliabilitas adalah nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.6 dan nilai *composite reliability* lebih besar dari 0.7. Pada tabel di atas diketahui bahwa *cronbach's alpha* menunjukkan konstruk sudah memenuhi reliabilitas, konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* berada di atas 0.6. Pada umumnya, syarat nilai *cronbach's alpha* setara 0.7 atau berada di atas 0.7. Akan tetapi, menurut Hair et al, nilai *cronbach's alpha* yang berada setara dan di atas 0.6 dapat diterima dan dinyatakan reliabel (Alvin dkk., 2023). Kemudian *composite reliability* pada model ada yang menunjukkan konstruk belum memenuhi reliabilitas. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* berada di atas 0.7.

Model Pengukuran (Inner Model)

Uji hipotesis dilakukan menggunakan *Path Coefficient* kemudian dilakukan *bootstrapping* yang terdapat dalam SmartPLS 4.0. Sebuah hipotesis dapat diterima apabila uji signifikansi *two tailed dan margin of error* memiliki nilai sebesar 0.05 atau 5% dalam menguji hipotesis penelitian. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pengujian yaitu nilai *T-statistic* >1.96 dan nilai *P values* <0.05 agar dapat dikatakan signifikan atau diterima.

Tabel 7 Pengujian Hipotesis

	Hipotesis	T Statics	P Values
H1	Kesadaran=> Kepatuhan	2.096	0.036
H2	Pengetahuan => Kepatuhan	2.125	0.034
H3	Sosialisasi => Kepatuhan	0.210	0.834
H4	Kualitas Pelayanan => Kepatuhan	0.136	0.892

Sumber: Data diolah, SmartPLS 4.0, 2024

Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis satu diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *T-statistic* adalah 2.096 dimana lebih besar daripada nilai *T-table* 1.64, sehingga hipotesis satu diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Berdasarkan *theory of planned behaviour* niat seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dimana kesadaran pajak merupakan hasil evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan dimana sikap wajib pajak yang positif mereka akan didorong oleh kesadaran perilaku positif (Kusbiyatun, 2022). Menurut wajib pajak orang pribadi di Kecamatan Petanahan, bahwa dengan patuh membayar pajak dapat meningkatkan penerimaan negara yang berguna untuk membiayai sarana publik seperti jalan raya, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak. Dengan adanya kesadaran tersebut dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil uji berdasar pada angket menunjukan indikasi dari angket bahwa variabel kesadaran perpajakan bernilai tinggi, yakni dengan hasil Sangat Setuju sebanyak 274 atau 49%, Setuju sebanyak 278 atau 49%, tidak setuju sebanyak 3 atau 1%, sangat tidak setuju sebanyak 8 atau 1%, dapat disimpulkan dari pengolahan statistik bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mumu et al., (2020) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa karena pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien positif. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Mumu et al., (2020) penelitian yang dilakukan Ainun & Tasmita (2022) menemukan bahwa besaran perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Dalam konteks yang sama hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mranggen Demak.

Hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis dua diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *T-statistic* adalah 2.125 dimana lebih besar daripada nilai *T-table* 1,64, sehingga hipotesis dua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Berdasarkan *theory of planned behaviour* niat

seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dimana kesadaran pajak merupakan hasil evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan dimana sikap wajib pajak yang positif mereka akan didorong oleh kesadaran perilaku positif (Kusbiyatun, 2022). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan luas tentang perpajakan mereka didorong bertindak positif seperti melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan (Kusbiyatun, 2022). Wajib pajak Kecamatan Petanahan memiliki keyakinan bahwa dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik dan lebih memadai. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan kembali melalui penggunaan fasilitas umum yang baik dan memadai. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil uji berdasar pada angket menunjukan indikasi dari angket bahwa variabel kesadaran perpajakan bernilai tinggi, yakni dengan hasil sangat setuju sebanyak 309 atau 54%, setuju sebanyak 244 atau 43%, tidak setuju sebanyak 9 atau 2% dan sangat tidak setuju sebanyak 7 atau 1%, dapat disimpulkan dari pengolahan statistik bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh pada variabel kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrian & Ristiliana (2019) yang menyatakan bahwa Pengetahuan dan Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Kemudian pada penelitian Ainun & Tasmita (2022) secara signifikan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Tidak hanya itu pada penelitian Wulandari & Wahyudi (2022) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mranggen Demak.

Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis tiga diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai T-statistic adalah 0.210 dimana lebih kecil daripada nilai T-table 1,64, sehingga hipotesis tiga ditolak. Hasil ini menunjukan baik/tidaknya sosialisasi perpajakan tidak memengaruhi patuh/tidaknya para wajib pajak PBB dalam pembayaran pajaknya. Berdasarkan *theory of planned behaviour* niat seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dimana kesadaran pajak merupakan hasil evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan dimana sikap wajib pajak yang positif mereka akan didorong oleh kesadaran perilaku positif (Kusbiyatun, 2022). Sosialisasi perpajakan dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung pada wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan. Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun pada hasil penelitian ini sosialisasi perpajakan tidak menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di Kabupaten Kebumen khususnya Kecamatan Petanahan tingkat sosialisasi perpajakan masih minim, berdasarkan hasil observasi sosialisasi perpajakan kerap dilakukan melalui media sosial untuk sosialisasi perpajakan secara luring atau tatap muka masih jarang dilakukan, yang mana para wajib pajak masih jarang melihat media sosial untuk

mendapatkan informasi mengenai pajak, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hutani (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks yang sama hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasna & Halimatusadiah (2022) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Jalancagak. Sementara itu, Sabat & Ismail (2023) juga menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memberikan perubahan yang nyata bagi kepatuhan wajib pajak PBB di perumahan Pondok Suri, Bekasi. Tidak hanya penelitian yang dilakukan Hasna & Halimatusadiah (2022) dan Sabat & Ismail (2023) penelitian yang dilakukan Nofenlis et al., (2022) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis empat (H4) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis empat diuji dengan pengujian hipotesis *one-tailed*. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai T-statistic adalah 0.136 dimana lebih kecil daripada nilai T-table 1,64, sehingga hipotesis empat ditolak. Hasil ini menunjukkan baik/tidak pelayanan fiskus tidak memengaruhi patuh/tidaknya para wajib pajak PBB dalam pembayaran pajaknya. Berdasarkan *theory of planned behaviour* niat seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku dimana kesadaran pajak merupakan hasil evaluasi individu terkait apakah suatu perilaku dinilai positif atau negatif dan dimana sikap wajib pajak yang positif mereka akan didorong oleh kesadaran perilaku positif (Kusbiyatun, 2022). Kualitas pelayanan fiskus dijadikan sebagai salah satu faktor pendukung pada wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan. Adanya pelayanan fiskus yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun pada hasil penelitian ini pelayanan fiskus yang baik tidak menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada pengujian *Path Coefficient* dapat diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus (X4) dengan angka signifikan 0,892 lebih dari 0,05 serta nilai thitung sebesar 0,136 melebihi ttabel 1,960 diidentifikasi bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus tidak mampu mempengaruhi terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Pelayanan petugas pajak wajib pajak Kecamatan Petanahan belum mampu memengaruhi wajib pajak supaya bergerak melakukan kewajiban pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun pelayanan petugas pajak sudah baik, belum tentu akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Savira (2020) yang menjelaskan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, Dalam konteks yang sama hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari & Wahyudi (2022) dan Kartikasari & Yadnyana (2020) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Tidak hanya itu Amrul et al., (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat.

Kesimpulan

Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB di Kecamatan Petanahan. Wajib pajak sudah memiliki kesadaran tinggi membayar pajak dengan tepat waktu yang akan berdampak pada meningkatnya kemakmuran masyarakat dan peningkatan fasilitas publik. Dengan adanya kesadaran yang tinggi, wajib pajak akan mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak Kecamatan Petanahan memiliki keyakinan bahwa dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik dan lebih memadai. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan kembali melalui penggunaan fasilitas umum yang baik dan memadai. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak Kecamatan Petanahan sudah cukup tinggi. Pada hasil penelitian ini sosialisasi perpajakan tidak menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, di Kabupaten Kebumen khususnya Kecamatan Petanahan tingkat sosialisasi perpajakan masih minim, berdasarkan hasil observasi sosialisasi perpajakan kerap dilakukan melalui media sosial untuk sosialisasi perpajakan secara luring atau tatap muka masih jarang dilakukan, yang mana para wajib pajak masih jarang melihat media sosial untuk mendapatkan informasi mengenai pajak, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan petugas pajak di Kecamatan Petanahan belum mampu memengaruhi wajib pajak supaya tergerak melakukan kewajiban pajak, hal ini mengindikasikan bahwa walaupun pelayanan petugas pajak sudah baik, belum tentu akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan diantaranya sebagai berikut: (1) Variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan hanya terdapat dua buah variabel yang diterima yaitu kesadaran dan pengetahuan pajak. (2) Sampel penelitian yang diambil hanya wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Petanahan saja, sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian ini belum tentu akan mendapatkan hasil yang sama apabila dilakukan di daerah lain. (3) Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini hanya berjumlah 80 sampel karena adanya keterbatasan waktu. Mengacu pada keterbatasan di atas, maka peneliti memberikan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya (1) dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kembali variabel-variabel lain. Beberapa variabel yang dapat dikembangkan misalnya seperti, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kebijakan perpajakan, dan sanksi (2) untuk penelitian selanjutnya disarankan agar peneliti menambahkan skala daerah yang lebih besar misalnya populasi wajib pajak di daerah Kabupaten Kebumen dan daerah lain di kota-kota besar di Indonesia. (3) Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan waktu lebih lama agar dapat menambah jumlah sampel yang lebih banyak dan dapat mencerminkan populasi yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Ainun, W. O. N., & Tasmita, Y. N. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pasarwajo kabupaten buton. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72–78.
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.
- Alvin, A., Nastiti, P., & Marsella, E. (2023). Identifikasi Faktor Loyalitas Pengguna pada Shopee Games Menggunakan Expectation-Confirmation Model (ECM). *Edu Komputika Journal*, 10(1), 38–45. <https://doi.org/10.15294/edukomputika.v10i1.61821>
- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). *Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat*. 2.
- Aulia Savira. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*.
- Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Smooting*, 18(4), 352–362.
- Devi, S. (2024). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Karawaci)*.
- Erdi, T. W. (2023). Faktor-Faktor Keputusan Melakukan Pinjaman Online: Inklusi Keuangan Sebagai Pemoderasi. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 407–414.
- Febrian, W. D., & Ristiliana, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(1), 181–191.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Owner*, 6(1), 747–758. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.628>
- Hasna, N. N., & Halimatusadiah, E. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Jalancagak*. 2(1).
- Hutani, A. C. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Kota Bogor*.
- Jannah, S. Z. (2016). *Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta*.
- Kartikasari, I. A., & Estiningrum, S. D. (2022). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*.
- Kusbiyatun, K. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Inovasi Undian Doorprize Lunas PBB-P2 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)*.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.

- Meilita, S., & Pohan, H. T. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP KELAPA GADING JAKARTA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1165–1178. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14494>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184.
- Nofenlis, M. I., Putri, A. A., & Sari, D. P. P. (2022). *Pengaruh Lingkungan Sosial, Norma Subjektif, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan*. 2(1).
- Sabat, M. J., & Ismail, M. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Sanksi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 106–113. <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i1.1564>
- Saputri, E. R., & Erdi, T. W. (2023). *Perilaku keuangan, dan locus of control, memengaruhi keputusan investasi dengan literasi keuangan sebagai moderasi*. 5(12).
- Seralurin, Y. C., Kbarek, J. T., & Pattiasina, V. (2021). The effect of tax socialization and tax service quality on taxpayer compliance with tax knowledge asintervening variables. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Sciences*, 2(11).
- Trisnawati, M., & Sudirman, W. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(12), 975–1000.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak*. 6.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). *Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara*. 3(1).
- Yusnidar, J. (2015). *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. 10.

Pemahaman Mahasiswa Dalam Teknologi Informasi Terhadap Minat Penggunaan *Software* Akuntansi di Jakarta Selatan

Aliyah Rahmanisa^{1*}, Diva Purnama Dewi², Nanda Aryana³, Novita⁴

^{1,2,3,4} *Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta Selatan, 12760*

**aliyahrahmanisa14@gmail.com*

Abstrak

Penggunaan *software* akuntansi dalam pengembangan teknologi informasi memerlukan keterampilan khusus agar dapat digunakan secara efektif. Keterampilan komputer dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sikap komputer, kecemasan komputer, dan efikasi diri komputer. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan *software* akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh sikap komputer, kecemasan komputer dan efikasi diri komputer terhadap minat mahasiswa akuntansi menggunakan *software* akuntansi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini disebut Technology Acceptance Model (TAM). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Akuntansi di Universitas yang ada di Jakarta Selatan. Pertanyaan pada kuesioner dianalisis menggunakan analisis diagram lingkaran untuk menguji penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *computer anxiety*, *computer attitude*, dan *computer self efficacy* secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *software* akuntansi.

Kata Kunci: *Computer Attitude, Computer Anxiety, Computer Self Efficacy*, dan Minat Menggunakan *Software* Akuntansi.

Pendahuluan

Dalam era digital dan teknologi informasi saat ini yang semakin maju, penggunaan *software* akuntansi telah menjadi suatu keharusan dalam bisnis dan perkantoran. Hal ini ditandai dengan adanya penggunaan teknologi informasi berbasis komputer yang telah memberikan banyak manfaat kepada manusia sebagai pengguna (Suhendro, 2009). Teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang akuntansi. *Software* akuntansi adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan pencatatan keuangan akuntansi. Seluruh rangkaian kegiatan di bidang akuntansi dapat diselesaikan melalui prosedur akuntansi, seperti pembuatan jurnal, pembukuan buku besar, penyusunan neraca saldo, serta laporan keuangan. Dengan kehadiran *software* akuntansi pekerjaan pembukuan akuntansi menjadi lebih cepat (Ratnasari, 2017). Kemajuan ini menjadikan suatu keharusan bagi seseorang yang akan memasuki dunia kerja di bidang akuntansi.

Penggunaan perangkat lunak akuntansi tidak terbatas pada organisasi, tetapi juga digunakan oleh mahasiswa yang telah mempelajari *software* akuntansi pada mata kuliah Laboratorium Akuntansi, Praktikum Akuntansi, atau mata kuliah sebagai persiapan

menghadapi dunia kerja. Praktikum *software* akuntansi merupakan bagian penting dalam pembelajaran akuntansi karena memberikan pengalaman praktis kepada para pelajar dalam menggunakan *software* akuntansi secara langsung. Dengan mengintegrasikan praktikum *software* akuntansi dalam kurikulum pembelajaran, para pelajar dapat mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan *software*. Melalui praktikum *software* akuntansi, para pelajar dapat mengasah kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keputusan yang penting dalam dunia profesional akuntansi. Mereka akan terbiasa bekerja dengan data keuangan dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh dari *software* akuntansi. Pengalaman dalam menggunakan *software* akuntansi, para pelajar dapat mempersiapkan dengan baik untuk menghadapi tantangan di dunia kerja yang membutuhkan keterampilan praktis dalam menggunakan *software* akuntansi. akuntansi dalam dunia nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pentingnya tingkat pemahaman mahasiswa terhadap *software* akuntansi di Jakarta Selatan menjadi hal yang sangat relevan dan perlu dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa dan memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kemampuan dalam memahami informasi atau data dengan lebih baik dan akurat. Dengan demikian, diharapkan pengaruh positif dari tingkat pemahaman mahasiswa terhadap *software akuntansi* ini dapat membawa dampak yang positif bagi perkembangan pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat di Jakarta Selatan.

Studi Literatur

Teori Penerimaan Teknologi

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah model pendekatan lain yang disusun untuk menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi (Davis 1989 dalam Permana, 2017). *Technology Acceptance Model* (TAM) digunakan untuk menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Tujuan dari teori ini merupakan untuk mengetahui perilaku-perilaku yang terjadi pada para pengguna teknologi komputer. TAM mencakup lima konstruksi, yaitu: persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), sikap terhadap penggunaan teknologi (*attitude toward using*), minat perilaku (*behavioural intention*), dan perilaku (*behaviour*).

Software Akuntansi

Software akuntansi sesuai pendapat yang dinyatakan Patmawati dalam Karte (2017) adalah merupakan program yang dibuat untuk memudahkan aktivitas dan pencatatan akuntansi. Dengan demikian *software* akuntansi dapat diartikan sebagai perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan aktivitas dan pencatatan akuntansi dengan memanfaatkan konsep modularitas atas serangkaian aktivitas serupa ke dalam modul-modul yang lebih spesifik, seperti buku besar, piutang, hutang, penggajian, persediaan, aktiva tetap, dan lain-lain.

Computer Attitude (Sikap Komputer)

Computer Attitude (sikap komputer) merupakan reaksi atau cara pandang individu terhadap teknologi komputer berdasarkan kesenangan atau ketidaksenangan mereka terhadap teknologi komputer. Sikap senang yang muncul dalam diri seseorang untuk memanfaatkan komputer, akan membangkitkan niat dalam diri mereka untuk menggunakan teknologi komputer. Sebaliknya sikap tidak senang dalam diri seseorang terhadap teknologi komputer, membuat diri mereka tidak memiliki niat untuk menggunakan teknologi komputer (Eka & Yanti, 2018).

Terdapat tiga indikator yang ada pada *computer attitude* (Loyd & Gressard, 1984) yaitu:

- a. *Optimism*, merupakan cara pandang atau sikap positif yang ditunjukkan seseorang dalam berhadapan dengan komputer akibat adanya manfaat yang diperolehnya.
- b. *Pessimism*, merupakan cara pandang seseorang menganggap komputer tidak dapat banyak membantu dirinya dalam melakukan suatu pekerjaan dan memiliki sikap antipati akibat adanya keterbatasan penguasaan program-program komputer.
- c. *Intimidation*, merupakan sikap seseorang yang muncul atas kehadiran komputer sebagai ancaman dalam dirinya karena menganggap lambat laun kegiatan manusia akan tergantikan oleh komputer.

Computer Anxiety (Kecemasan Berkomputer)

Menurut (Schlebusch, 2018) definisi kecemasan komputer adalah "*computer anxiety* merupakan kecenderungan individu menjadi susah, khawatir, atau ketakutan menggunakan komputer dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang". Menurut (Rahayu, 2019) salah satu ahli yang mengemukakan *computer anxiety* memiliki dua aspek, sebagai berikut:

- d. *Fear* (takut) "Seseorang merasa takut dengan adanya komputer karena mereka belum banyak menguasai teknologi komputer, sehingga mereka belum bisa mendapatkan manfaat dengan kehadiran komputer."
- e. *Anticipation* "Seseorang perlu melakukan antisipasi terhadap kegelisahan yang muncul dengan adanya komputer. Antisipasi tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan ide-ide yang menyenangkan (*anticipation*) terhadap komputer."

Computer Self Efficacy (Efikasi Diri Komputer)

Computer self efficacy diartikan sebagai keyakinan atau penilaian individu terhadap kemampuan yang dimiliki mereka dalam menggunakan dan melaksanakan tugas-tugas komputasi dengan baik. *Computer self efficacy* tidak hanya menyangkut *skill* seseorang, tetapi meliputi *judgement* mengenai tindakan apa yang dapat dilakukannya untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka terkait dengan aplikasi komputer dan juga menjadi faktor yang mempengaruhi penggunaan sebuah sistem (Setyowati et al., 2017).

Dijelaskan oleh Compeau dan Higgins dalam Rustiana (2004) ada tiga dimensi *computer self efficacy*:

- a. *Magnitude*, mengacu pada level kapabilitas seseorang dalam penggunaan komputer apakah dapat menyelesaikan tugas komputasi dengan baik, dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama sekali dari orang lain.
- b. *Strength*, mengacu pada level keyakinan dirinya tentang kemampuan seseorang itu sendiri apakah mampu menyelesaikan tugas komputasinya dengan baik.
- c. *Generalibility*, mengacu pada domain perbedaan konfigurasi *software* atau sistem yang berbeda-beda dalam menyelesaikan tugas komputasi.

Minat Menggunakan Software Akuntansi

Minat berubah-ubah, minat dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Davis et al. (1989) dalam (Jogiyanto, 2007) menyatakan bahwa minat didefinisikan sebagai tingkat kekuatan keinginan atau dorongan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Teori tindakan beralasan, bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh minat atau keinginan seseorang untuk melakukannya. Dapat disimpulkan bahwa minat menggunakan *software* akuntansi merupakan keinginan dalam diri seseorang untuk menggunakan *software* akuntansi dalam membantu dirinya penyelesaian tugas-tugas akuntansi. Kharismayanti (2012) dalam Winayu (2013), menyatakan ada tiga instrumen pengukur minat menggunakan (*intention to use*), yaitu:

- b. Keinginan untuk menggunakan;
- c. Selalu mencoba menggunakan;
- d. Berlanjut pada masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pemahaman mahasiswa dalam teknologi informasi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi minat mereka dalam menggunakan *software* akuntansi di Jakarta Selatan. Metode yang digunakan adalah studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan kuesioner Google Form sebagai media pengumpulan data. Google Form dipilih sebagai *platform* untuk menyebarkan kuesioner guna mempermudah partisipasi responden dan pengumpulan data yang efisien.

Kuesioner yang disusun menggunakan Google Form mencakup aspek-aspek berikut:

1. Profil Responden: Nama dan Mahasiswa Angkatan
2. Pemahaman Teknologi Informasi: Pertanyaan terstruktur mengenai tingkat pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi.
3. Minat Penggunaan *Software* Akuntansi: Pertanyaan terkait sejauh mana mahasiswa tertarik dan berminat menggunakan *software* akuntansi dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah persiapan kuesioner, di mana instrumen penelitian disusun dengan cermat untuk memastikan relevansi dan validitasnya. Sebelum digunakan secara luas, kuesioner diuji kelayakannya oleh sejumlah responden guna mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pertanyaan yang disusun. Setelah kuesioner dianggap layak, tahap berikutnya adalah pengujian Google

Form. Google Form dipilih sebagai media pengumpulan data karena kemudahannya dalam distribusi dan pengolahan hasil. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa formulir dapat diakses dengan baik, tidak terdapat kesalahan teknis, serta mudah dipahami dan diisi oleh responden. Tahap selanjutnya adalah penyebaran Google Form, di mana tautan kuesioner disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Facebook. Target utama dari penyebaran ini adalah mahasiswa akuntansi yang berdomisili di Jakarta Selatan. Dengan strategi ini, diharapkan lebih banyak responden yang berpartisipasi dalam penelitian. Terakhir, pada tahap pengumpulan data, responden diundang untuk mengisi kuesioner secara mandiri dalam periode waktu yang telah ditentukan. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

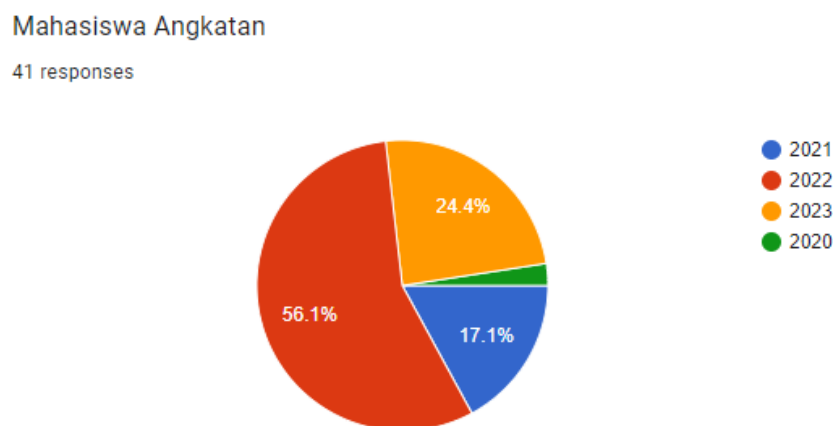
Setelah data dari kuesioner terkumpul, langkah selanjutnya adalah merangkum data tersebut dan menghitung persentase untuk setiap pertanyaan. Dari hasil rangkuman tersebut, akan dibuat analisis mengenai pemahaman mahasiswa dalam teknologi informasi dan minat mereka terhadap penggunaan *software* akuntansi di Jakarta Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Setelah peneliti menyebarkan *link* pengisian kuesioner Google Form untuk menerima data yang valid dari mahasiswa sebagai responden dalam penelitian Pemahaman Mahasiswa dalam Teknologi Informasi terhadap Minat Penggunaan *Software* Akuntansi di Jakarta Selatan, telah didapatkan kurang lebih 41 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Mayoritas responden adalah Mahasiswa Angkatan diantara 2020-2023.

Dari survei yang telah disebar, kategori angkatan terbanyak pengisi kuesioner pada survei ini diperoleh pada Angkatan 2022 dengan persentase sebesar 56.1%, yang terhitung sebanyak 23 orang. Berikut grafik hasil kuesioner terkait mahasiswa angkatan responden yang peneliti peroleh dalam bentuk diagram lingkaran di bawah ini:

Gambar 1. Data Responden Mahasiswa Angkatan

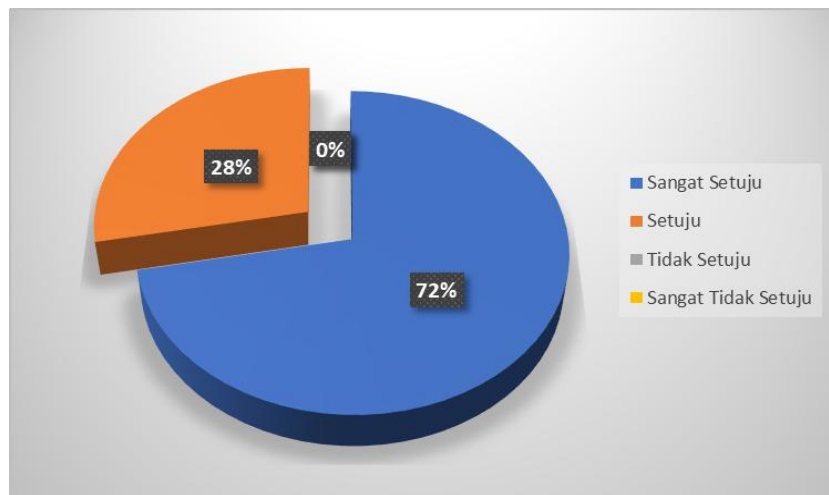


Sumber: Hasil data kuesioner, 2024

Respon mahasiswa terkait variable *Computer Attitude* yaitu 100% memiliki respon positif terhadap komputer. Hal ini menunjukkan bahwa para mahasiswa memiliki optimisme yang tinggi terhadap komputer, menganggap komputer dapat banyak

membantu mereka dalam melakukan pekerjaan. Mahasiswa tidak memiliki perasaan pesimis atau intimidasi terhadap komputer dan tidak merasa bahwa komputer akan mengganti peran manusia. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irvan Nir Sudibyanto (2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Computer Attitude* berpengaruh positif terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menggunakan *Software* Akuntansi.

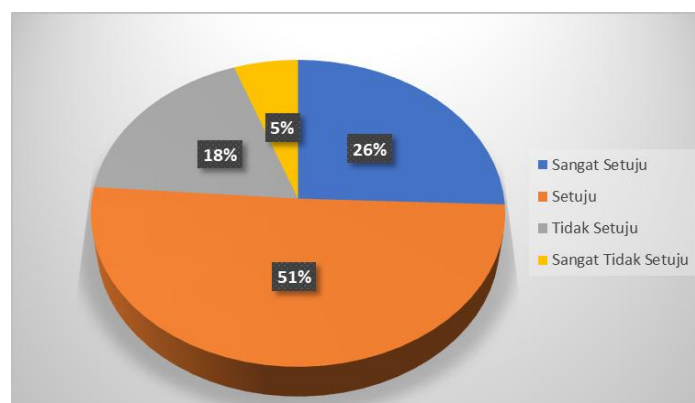
Gambar 2. Hasil Responden pada *Computer Attitude*



Sumber: Hasil data kuesioner, 2024

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa sebanyak 77% (51% + 26%), menyatakan setuju atau sangat setuju dengan pernyataan tentang *Computer Anxiety*. Hanya sedikit responden, yaitu 23% (18% + 5%), yang menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju. Dengan demikian, mayoritas mahasiswa memiliki tingkat *computer anxiety* yang relatif rendah. Mahasiswa tidak merasa takut atau cemas ketika menggunakan komputer. Mahasiswa memiliki keahlian yang cukup dalam menggunakan komputer, sehingga dapat menjalankan komputer dengan baik dan meminimalisir rasa takut atau cemas ketika menggunakannya. Hasil penelitian ini didukung oleh Putra (2016), Utomo (2012), Sudibyanto (2013), Akbar dan Hidajat (2020) yang membuktikan *computer anxiety* berpengaruh positif pada minat penggunaan *software* akuntansi.

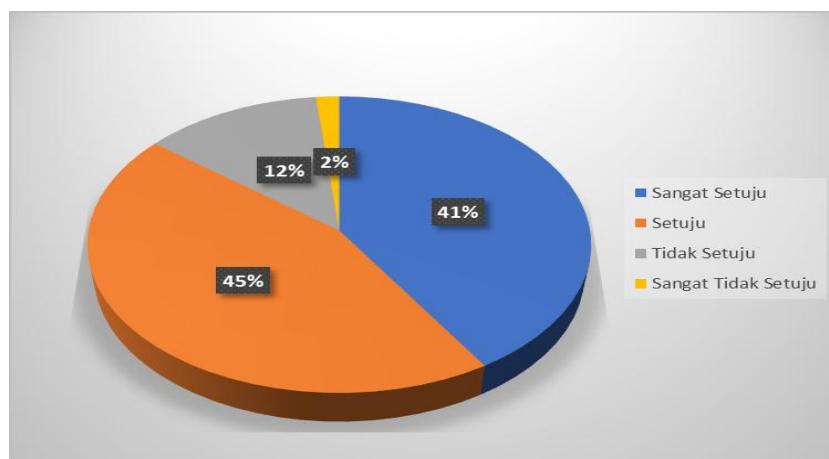
Gambar 3. Hasil Responden pada *Computer Anxiety*



Sumber: Hasil data kuesioner, 2024

Berdasarkan gambar 4, mayoritas responden 86% (41% + 45%) menyatakan setuju atau sangat setuju dengan pernyataan tentang *computer self efficacy*. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki keyakinan tinggi terhadap kemampuan dalam menggunakan komputer. Mahasiswa memiliki tingkat *computer self efficacy* yang baik dengan menyelesaikan tugas komputerisasi dan yakin dengan kemampuan mereka dan mereka percaya bahwa kemampuan tersebut dapat diterapkan dalam berbagai konfigurasi perangkat lunak atau sistem. Hasil Penelitian ini didukung oleh (Putra, 2016), (Sudibyanto, 2013), (Fiddin & Arief, 2022), (Akbar & Hidajat, 2020). *Computer self efficacy* adalah sebuah kepercayaan individu tentang kemampuannya dalam mengoperasikan komputer. Jika mahasiswa memiliki kemampuan dalam mengoperasikannya maka akan memiliki minat yang tinggi terhadap penggunaan *software* akuntansi.

Gambar 4. Hasil Responden pada *Computer Self Efficacy*

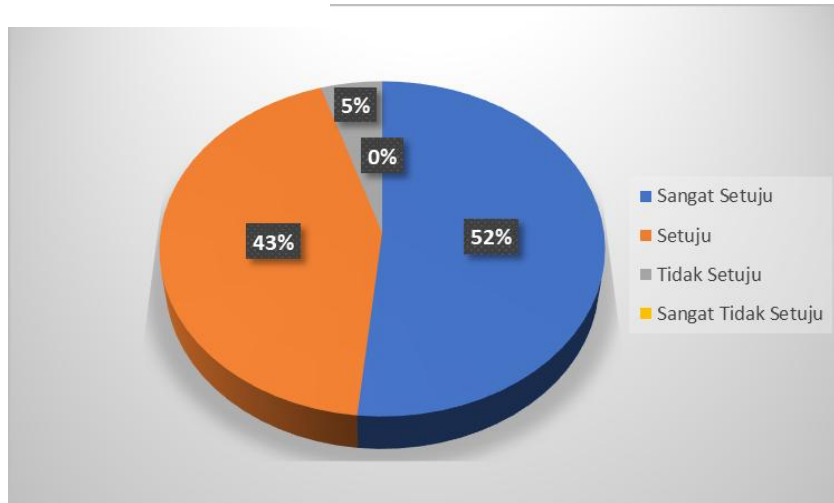


Sumber: Hasil data kuesioner, 2024

Gambar 5 menunjukkan minat mahasiswa akuntansi dalam menggunakan *software* akuntansi. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki minat yang tinggi terhadap penggunaan *software* akuntansi, dengan 95% menyatakan sangat setuju dan setuju. Hanya 5% mahasiswa yang menyatakan tidak setuju, dan tidak ada mahasiswa yang menyatakan sangat tidak setuju. Mahasiswa akuntansi memiliki keinginan yang kuat untuk menggunakan *software* akuntansi, selalu mencoba menggunakannya, dan berencana untuk terus menggunakannya di masa depan. Keinginan ini menunjukkan bahwa mereka menyadari manfaat *software* akuntansi dalam proses belajar dan bekerja mereka sebagai akuntan.

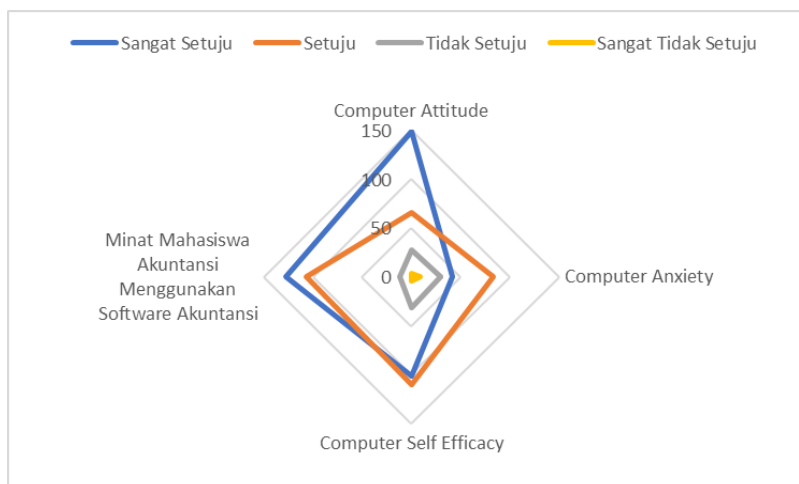
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriliam Kusuma Putra (2016). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan seseorang dalam menggunakan komputer dan menyelesaikan tugas-tugas komputasinya secara mandiri, tanpa memerlukan bantuan orang lain, dapat memengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam menggunakan *software* akuntansi. Tingkat *computer self-efficacy* (CSE) yang tinggi didapati dapat meningkatkan minat dan kemampuan seseorang dalam menggunakan komputer, yang pada akhirnya dapat mendorong minat individu tersebut dalam memanfaatkan *software* akuntansi dalam proses belajar dan karir akuntan mereka di masa depan.

Gambar 5. Hasil Responden untuk Minat Mahasiswa Akuntansi Dalam Menggunakan *Software* Akuntansi



Sumber: Hasil data kuesioner, 2024

Gambar 6. Hasil Sikap Mahasiswa Akuntansi Terhadap Penggunaan *Software* Akuntansi



Gambar 6 menunjukkan diagram hasil survei terhadap 40 mahasiswa akuntansi tentang sikap mereka terhadap penggunaan *software* akuntansi. Diagram ini terbagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Minat Mahasiswa Akuntansi Menggunakan *Software* Akuntansi menunjukkan persentase mahasiswa akuntansi yang menyatakan minatnya untuk menggunakan *software* akuntansi, Hal ini menunjukkan bahwa *software* akuntansi dianggap penting oleh mahasiswa akuntansi dalam membantu mereka belajar dan bekerja.
2. *Computer Anxiety* menunjukkan persentase mahasiswa akuntansi yang menyatakan tingkat kecemasan mereka dalam menggunakan komputer relatif rendah, Hanya 10% mahasiswa yang menyatakan tingkat kecemasan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi umumnya merasa nyaman menggunakan komputer.
3. *Computer Self Efficacy* menunjukkan persentase mahasiswa akuntansi yang menyatakan tingkat kepercayaan diri mereka dalam menggunakan komputer relatif

tinggi Hanya 10% mahasiswa yang menyatakan tingkat kepercayaan diri yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi umumnya merasa yakin dengan kemampuan mereka dalam menggunakan komputer.

4. *Computer Attitude* menunjukan mahasiswa akuntansi dalam diagram umumnya positif. Hal ini ditunjukkan dengan minat yang tinggi untuk menggunakan *software* akuntansi, tingkat kecemasan yang rendah, dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang pemahaman mahasiswa dalam teknologi informasi terhadap minat penggunaan *software* akuntansi di Jakarta Selatan terdapat pengaruh positif yang signifikan terkait pemahaman mahasiswa dalam teknologi informasi terhadap minat penggunaan *software* akuntansi di Jakarta Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Computer anxiety* tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *software* akuntansi yang dapat diidentifikasi bahwa tinggi rendahnya tingkat kecemasan tidak mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam menggunakan *software* akuntansi. Seseorang yang ahli cenderung memiliki minat untuk menggunakan *software* akuntansi, sehingga dapat disimpulkan bahwa *computer anxiety* tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan *software* akuntansi dalam penelitian ini.
2. *Computer attitude* tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *software* akuntansi. Dalam penelitian ini variabel *computer attitude* hanya fokus pada tiga indikator yaitu optimisme, pesimisme dan intimidasi. Minat mahasiswa untuk menggunakan perangkat lunak akuntansi tidak berubah meskipun memiliki sikap yang berbeda-beda ketika berkomputer.
3. *Computer self efficacy* berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *software* akuntansi. Semakin tinggi keahlian mahasiswa dalam berkomputer maka minatnya dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi juga akan semakin meningkat, begitu juga sebaliknya.
4. *Computer anxiety*, *computer attitude* dan *computer self efficacy* secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi. Mahasiswa akuntansi menunjukkan keinginan yang kuat untuk menggunakan *software* akuntansi dengan aktif mencobanya dan berencana untuk terus menggunakannya di masa depan. Kesadaran mereka akan manfaat *software* akuntansi dalam mendukung proses belajar dan pekerjaan sebagai seorang akuntan sangat terlihat

Saran

Selanjutnya, untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diambil:

1. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk memperluas cakupan responden tidak hanya pada mahasiswa satu universitas saja namun juga dari universitas lain

atau masyarakat umum yang dapat memperoleh manfaat dari penggunaan perangkat lunak akuntansi.

2. Penting bagi institusi pendidikan untuk terus merumuskan strategi yang menggabungkan aspek-aspek dari computer anxiety, computer attitude, dan computer self efficacy secara bersama-sama untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam menggunakan *software* akuntansi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan program pelatihan yang komprehensif dan peningkatan pemahaman akan manfaat *software* akuntansi dalam mendukung kegiatan belajar dan karier di bidang akuntansi.

Daftar Pustaka

- Suhendro. (2009). Pengaruh *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use* Dalam Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. 1–71.
- Adi, I. N. R., & Yanti, P. E. P. (2018). Pengaruh *Computer Attitude*, *Computer Self Efficacy*, dan *Trust* Terhadap Minat Menggunakan *Software* Akuntansi pada Karyawan LPD Se-Kota Denpasar.
- Jogiyanto. (2007). Sistem Informasi Keperilakuan. Yogyakarta: Andi Offset
- Winayu, N.Y. (2013). Pengaruh Kepercayaan, *Perceived Ease of Use* dan *Perceived Usefulness* Terhadap Minat Menggunakan *E-Commerce* Jual Beli Kaskus. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Schlebusch, C. L. (2018). Computer Anxiety, Computer Self-efficacy and Attitudes towards the Internet of First Year Students at a South African University of Technology. *Africa Education Review*, 15(3), 72–90. <https://doi.org/10.1080/18146627.2017.1341291>
- Rahayu, S. (2019). Individual Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menggunakan *Software* Akuntansi (Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara). 6(1), 1–9.
- Eka, P., & Yanti, P. (2018). Pengaruh *Computer Attitude*, *Computer Self Efficacy*, dan *Trust* Terhadap Minat Menggunakan *Software* Akuntansi Pada. 3(1), 58–70.
- Loyd, B. H., & Gressard, C. (1984). Reliability and Factorial Validity of Computer Attitude Scales. In *Journal of Educational and Psychological Measurement*, 44. 501–505.
- Permana, G. P. L. 2017. Analisis Faktor-Faktor Penerimaan *Internet Banking* dengan Menggunakan Pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan Penambahan Peran Motivasi *Extrinsic* dan *Intrinsic*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 33–41.
- Setyowati, Tri, Octavia, Elisabeth, Respati, Dyah, A. 2017. Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Pengguna Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 13, 63–75.
- Rustiana. 2004. *Computer Self Efficacy* (CSE) Mahasiswa Akuntansi Dalam Penggunaan Teknologi Informasi: Tinjauan Perspektif Gender. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 29–39.
- Karte, C. 2017. Analisis Pemilihan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android. Universitas Sanata Dharma. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280>.
- Akbar, F. S., & Hidajat, R. S. (2020). Minat mahasiswa akuntansi menggunakan *software accounting* sebagai implementasi keunggulan teknologi informasi dan komunikasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 3(2), 50–62.
- Fiddin, F. F., & Muhammad Arief. (2022). Pengaruh *Computer anxiety*, *Computer Attitude*, dan *Computer Self Efficacy*, Kondisi Yang Memfasilitasi Pemakai, dan Faktor Sosial Terhadap Minat Mahasiswa Komputerisasi Akuntansi Menggunakan *Software* Akuntansi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 86–94. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.182>

- Putra, A. K. (2016). Pengaruh *Computer Anxiety*, *Computer Attitude*, dan *Computer Self Efficacy* terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Menggunakan *Software* Akuntansi (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Angkatan 2012-2014. Skripsi.
- Utomo, D. W. (2012). Pengaruh *Computer Anxiety* dan *Computer Attitude* terhadap Keahlian Mahasiswa Akuntansi dalam Penggunaan Komputer pada Penulisan Skripsi. Skripsi.
- Irvan Nir Sudibyanto. (2013). "Pengaruh *Computer Anxiety*, *Computer Attitude*, dan *Computer Self Efficacy* Terhadap Minat dalam Berbisnis Secara *Online* Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta". Skripsi. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.

Pemahaman UMKM Mengenai Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

Yulien Masruth Ndururu¹, Sulasmi^{2*}, Noni Khairunisa³, Novita⁴

^{1,2,3,4} *Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta Selatan 12760*

**lasinii2103@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi, penerapan standar akuntansi yang baik menjadi krusial bagi UMKM untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pemahaman mendalam dari pelaku UMKM tentang penerapan SAK EMKM. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap beberapa pelaku UMKM yang menjadi subjek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan terbatasnya akses untuk mempelajari SAK EMKM. Selain itu, menurut para pelaku UMKM, penerapan SAK EMKM dianggap terlalu rumit dan mereka merasa tidak memiliki waktu untuk menerapkannya. Namun, beberapa UMKM telah mencoba menerapkannya untuk meningkatkan transparansi keuangan.

Kata kunci: Pelaku UMKM, SAK EMKM, Pemahaman, Penerapan.

Pendahuluan

Salah satu kegiatan ekonomi utama bagi banyak masyarakat Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dan memberikan kontribusi besar dalam mendukung perekonomian Indonesia. Selain itu, UMKM juga dianggap sebagai elemen penting dalam memperkuat ekonomi nasional karena memiliki karakteristik yang kuat, dinamis, dan efisien. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis aktivitas ekonomi di Indonesia yang dilakukan oleh warga secara mandiri dalam skala kecil, dikelola oleh individu, kelompok, atau keluarga. Peran UMKM sangat signifikan dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), memengaruhi perekonomian nasional secara keseluruhan (Dewi, 2019). UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Aktivitas akuntansi memiliki peranan penting dalam menggambarkan perkembangan atau kondisi keuangan UMKM, yang secara langsung memengaruhi

kelangsungan hidupnya. Hal ini memungkinkan untuk merekam dan mengevaluasi kinerja UMKM secara efektif (Diajeng dkk, 2019). SAK EMKM dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk membantu UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang informatif, transparan, dan akuntabel. Meskipun telah diterbitkan sejak tahun 2016, masih banyak UMKM yang belum memahami dan menerapkannya secara konsisten, disebabkan oleh kurangnya edukasi, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta kesulitan memahami isi dan aplikasi SAK EMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana UMKM memahami Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) serta penerapannya dalam usaha mereka dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap SAK EMKM. Manfaat penelitian ini meliputi peningkatan kesadaran dan pemahaman UMKM tentang pentingnya penerapan SAK EMKM, bantuan dalam menerapkannya secara konsisten, Mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data keuangan yang akurat dan terstandarisasi, serta dukungan terhadap pertumbuhan dan kemajuan UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi mendalam. Diharapkan kontribusi penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman UMKM tentang SAK EMKM, serta membantu UMKM dalam menerapkan SAK EMKM secara konsisten dan meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka.

Tinjauan Pustaka

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut. Entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut, IAI dalam SAK EMKM (2018:1).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dapat berbentuk perusahaan perseorangan, usaha bersama seperti firma dan CV, atau perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UMKM dibagi menjadi tiga kategori, yaitu berdasarkan jumlah aset dan omzet.

a. Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti berperan dalam mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 3 tentang UMKM, tujuan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya guna membangun perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) resmi diluncurkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, pada 8 Desember 2016, dan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018.

Menurut SAK EMKM (2018:par9) menyatakan bahwa Laporan Keuangan minimum terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut:

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Piutang
- c. Persediaan
- d. Aset Tetap
- e. Utang Usaha
- f. Utang Bank
- g. Ekuitas

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Beban Keuangan
- c. Beban Pajak

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi tambahan dari rincian akun-akun tertentu yang relevan. Catatan atas laporan keuangan memuat:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM.
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
- c. Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan memahami sesuatu. Memahami berarti mengetahui sesuatu dan mampu melihatnya dari berbagai aspek. Tingkat pemahaman SAK EMKM merupakan sejauh mana pemangku kepentingan UMKM memahami penerapan SAK EMKM baik dari segi pengukuran, asumsi yang mendasari, dan penyajian laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa para pemangku kepentingan UMKM memahami asumsi dasar akrual, kelangsungan usaha dan konsep unit usaha dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian terdahulu lainnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi SAK EMKM dilakukan oleh Pardita (Pardita et al., 2019), yang menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman akuntansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi SAK EMKM pada UMKM Menurut peneliti, semakin baik pemahaman akuntansi oleh para pelaku UMKM maka semakin tinggi pula tingkat adopsi SAK EMKM pada UMKM. Pemangku kepentingan UMKM memahami bahwa penilaian elemen laporan keuangan didasarkan pada biaya historis, misalnya biaya historis suatu aset adalah jumlah kas atau setara kas yang digunakan dalam akuisisi. Biaya historis liabilitas suatu aset adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang pemahaman pelaku UMKM terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh UMKM yang terletak di wilayah Jakarta Selatan. Metode pengambilan data melalui observasi dan wawancara.

Hasil dan Pembahasan

Pertanyaan 1:

Apakah anda membuat laporan keuangan dan memahami Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)?



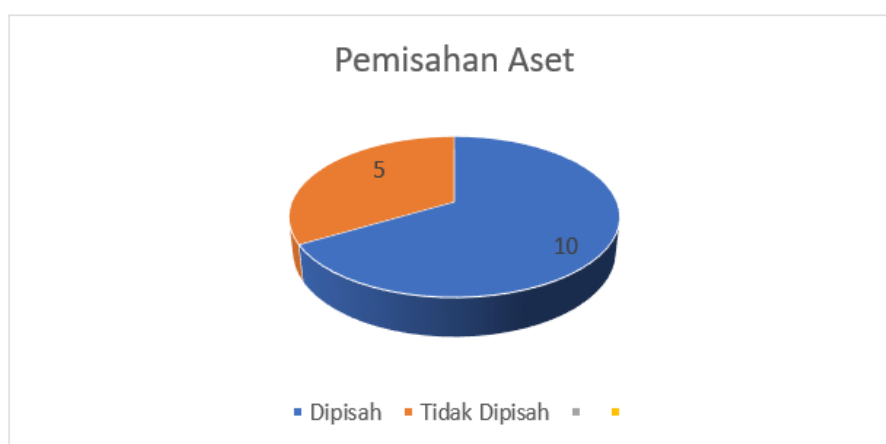
Sumber: Data diolah, 2024

Menurut SAK EMKM (2024 BAB 2), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan gambar 1 Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu 10 dari 15 UMKM, tidak menyusun laporan keuangan. Alasan utama yang diutarakan meliputi persepsi bahwa penyusunan laporan keuangan adalah aktivitas yang merepotkan, tidak bermanfaat, serta kurang relevan mengingat penggunaan uang yang bersifat langsung untuk keperluan usaha mereka. Sebaliknya, 5 UMKM yang menyusun laporan keuangan menyatakan bahwa laporan tersebut memudahkan mereka dalam memonitor pendapatan dan pengeluaran, serta mempersiapkan diri untuk kebutuhan pengajuan pinjaman ke bank. Laporan keuangan dianggap sebagai alat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan usaha mereka.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak satupun dari 15 UMKM yang memiliki pemahaman tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Pernyataan tersebut diketahui dari pemilik Toko Nasi Rames di Kecamatan Pancoran. "Bapak tidak paham apa itu SAK EMKM nak, baru dengar Bapak juga tentang standar itu" (Saipul, 2024). Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan dan penerapan standar akuntansi yang seharusnya dapat membantu mereka dalam menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Pertanyaan 2:

Apakah ada pemisahan aset antara pribadi dan usaha yang umur ekonomisnya > 5 tahun yang sesuai dengan SAK EMKM?



Sumber: Data diolah, 2024

Kieso et al. (2002:50) menyatakan bahwa konsep pengakuan dan pengukuran menjelaskan apa, kapan, dan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur dan dilaporkan oleh sistem akuntansi, profesi akuntansi terus

menggunakan konsep-konsep tersebut sebagai pedoman operasional. Salah satu konsep tersebut adalah entitas ekonomi yang mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu. Dengan kata lain aktivitas entitas bisnis dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agus Sulistiyo dan rekan (2022) menunjukkan bahwa pemilik UMKM masih membutuhkan banyak edukasi dalam memisahkan aset pribadi dan aset usaha. Banyak di antara pemilik UMKM yang tidak memisahkan aset pribadi dari aset usaha mereka.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 15 UMKM, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dari 15 pelaku usaha tersebut, 10 pelaku usaha secara konsisten memilih untuk memisahkan dengan jelas antara aset pribadi dan aset usaha mereka. Hal ini diungkapkan Bapak Ipul selaku UMKM yang telah kami wawancarai mengatakan: *"Saya memisahkan aset pribadi dan usaha saya dikarenakan agar lebih mudah dalam mengelola keuangan dan praktis ketika membuka dagangan saya, jadi saya tidak perlu bolak-balik ke rumah saya untuk mengambil barang-barang yang akan digunakan untuk dagangan"*. Keputusan ini mereka ambil dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan serta manajemen waktu. Dengan memisahkan aset tersebut, para UMKM merasa lebih mudah dalam mengelola keuangan usaha mereka, memonitor pengeluaran dan pemasukan secara terpisah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif. Selain itu, keputusan ini juga didorong oleh praktisitas dalam operasional sehari-hari. Para UMKM yang menyewa tempat untuk berdagang dapat menghindari kerepotan membawa bolak-balik perlengkapan dagangan mereka. Dengan memiliki tempat yang tetap dan terpisah untuk berdagang, mereka dapat lebih fokus pada kegiatan bisnis inti tanpa harus terganggu oleh urusan aset pribadi yang bercampur aduk dengan kegiatan usaha. Hal ini tidak hanya memungkinkan mereka untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan kejelasan dalam manajemen bisnis mereka.

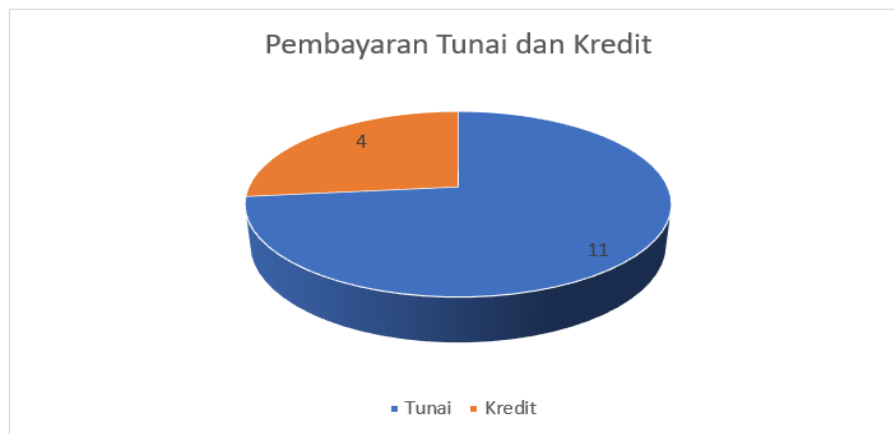
Di sisi lain, 5 pelaku usaha lainnya memilih untuk tidak memisahkan aset pribadi dan aset usaha mereka. Hal ini diungkapkan Ibu Nazwa selaku UMKM yang telah kami wawancarai mengatakan: *"aset yang saya gunakan untuk berdagang saya campur, karena selain rumah saya dekat dari sini juga agar tidak mengeluarkan lebih banyak tenaga dan uang ketika salah satu dari aset saya rusak"*. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan aset yang dimiliki mereka dampaknya mereka tidak memisahkan antara aset pribadi dan aset usaha. Selain itu, karena lokasi usaha yang dekat dengan rumah memungkinkan mereka untuk membawa perlengkapan dagang bolak-balik dengan mudah. Hal ini dianggap lebih efisien dan tidak memerlukan tempat penyimpanan tambahan yang terpisah.

Pertanyaan 3:

Apakah anda membayar kegiatan operasional secara kredit?

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasrani Maulidia (2022) bahwa Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setelah pelaku UMKM menerima kredit, usahanya mengalami peningkatan omset. Selain itu, terdapat hubungan positif antara kredit, modal, serta omset sebelum dan sesudah menerima kredit tersebut. Dengan kata lain, pemberian kredit usaha berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kinerja

keuangan UMKM. Pada penelitian ini juga menemukan bahwa 4 pelaku usaha lainnya memilih untuk membayar sebagian biaya operasional mereka secara kredit. Menurut mereka, membayar secara kredit membantu mereka dalam pengoperasian usaha, terutama dalam situasi ketika usaha mereka mengalami kerugian. salah satunya diungkapkan Ibu Siti selaku UMKM yang telah kami wawancarai mengatakan: *“Kadang-kadang usaha saya tidak selalu menghasilkan keuntungan, ada saja saat-saat dimana saya mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian tersebut dan menjaga kelangsungan usaha, saya memilih menggunakan pembayaran secara kredit”*. Dengan menggunakan kredit, mereka masih dapat membayar karyawan dan menutupi biaya operasional lainnya, sehingga bisnis mereka tetap berjalan meskipun sedang dalam kondisi keuangan yang sulit.

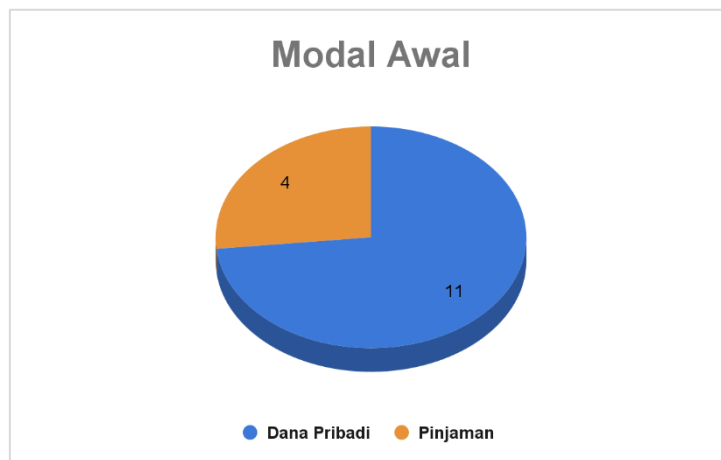


Sumber: Data diolah, 2024

Di sisi lain, 11 pelaku usaha UMKM memilih untuk membayar kegiatan operasional yang meliputi pembelian bahan baku, penyewaan tempat, dan pembayaran listrik sepenuhnya dibayar secara tunai. Hal ini diungkapkan Ibu Nazwa selaku UMKM yang telah kami wawancarai mengatakan: *“Karena agar tidak terlilit utang dan mengalami kesulitan keuangan di masa depan, saya memutuskan untuk tidak mengambil kredit dan lebih memilih mengelola keuangan dengan dana yang ada”*. Para pelaku UMKM ini memilih untuk menghindari penggunaan kredit dalam menjalankan usahanya. Dengan membayar semua biaya operasional secara tunai, mereka dapat menjaga kesehatan keuangan bisnis mereka, menghindari risiko utang yang dapat membebani usaha, dan memastikan kelancaran arus kas. Selain itu, pembayaran tunai untuk biaya operasional memberikan mereka fleksibilitas lebih dalam mengelola dana dan mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal. Keputusan ini juga memungkinkan UMKM untuk lebih fokus pada pertumbuhan dan pengembangan usaha mereka tanpa harus khawatir tentang cicilan atau bunga pinjaman. Dengan tidak adanya utang, para pelaku usaha dapat lebih tenang dan yakin dalam mengambil keputusan strategis untuk masa depan bisnis mereka. Praktik ini juga menunjukkan disiplin dan komitmen tinggi terhadap pengelolaan keuangan yang sehat, yang merupakan faktor penting dalam mencapai keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang bagi UMKM.

Pertanyaan 4:

Apakah usaha anda didanai Pribadi atau bank?



Sumber: Data diolah, 2024

Kegiatan usaha tidak akan berjalan jika tidak ada modal usaha, modal Kegiatan usaha tidak akan berjalan jika tidak ada modal usaha, modal (Sonya Ameinia Sarendra, 2018) ada alasan UMKM memilih sumber pembiayaan pinjaman dan modal awal. Pertama, modal ekuitas adalah pilihan paling logis bagi usaha kecil dan menengah yang baru didirikan. Sebab, usaha kecil dan menengah yang baru terjun ke dunia usaha belum memiliki kekuatan finansial yang besar. Yang kedua adalah modal pinjaman dari bank. Jika UMKM membutuhkan tambahan modal dalam usahanya. UMKM melakukan pinjaman karena ada beberapa faktor diantaranya promosi yang ada dimana-mana dan bunga yang cenderung kecil yang mana hal tersebut menggiurkan para UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian kami yang dilakukan dengan 15 UMKM, kesimpulan yang dapat diambil bahwa ada 11 UMKM menggunakan dana pribadi sebagai modal usaha mereka dimana hasil dari tabungan pribadi, dana dari keluarga, atau modal dari penjualan aset pribadi karena penggunaan dana pribadi sering kali menjadi pilihan awal karena tidak melibatkan proses aplikasi pinjaman yang kompleks dan tidak menimbulkan beban bunga. Seperti dengan hasil wawancara bersama bapak udin yang mengatakan bahwa *"alhamdulillah saya memakai dana pribadi untuk modal awal usaha, dana saya ambil dari tabungan saya, saya tidak melakukan peminjaman karena saya takut awal usaha nya tidak berjalan dengan baik sehingga utang saya tidak bisa di bayar"* Karena mereka beranggapan jika meminjam para UMKM harus mempertimbangkan kemampuan keuangan mereka untuk membayar kembali pinjaman sebelum memutuskan untuk mengambil pinjaman dan memiliki resiko yang tinggi.

Sedangkan 4 lainnya menggunakan pinjaman di bank karena modal pribadi seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan awal dalam memulai dan menjalankan usaha. sehingga mendorong UMKM untuk mencari sumber modal lain, seperti pinjaman dan juga jenis usaha memerlukan modal yang besar di awal, seperti usaha manufaktur atau usaha yang membutuhkan infrastruktur khusus. Pinjaman dapat membantu pengusaha UMKM untuk mendapatkan modal yang mereka butuhkan untuk memulai usaha mereka. Para UMKM melakukan pinjam untuk modal usaha dengan menggunakan pinjaman ke bank. karena mendapatkan bunga yang kecil

sehingga menjadi peluang bagi UMKM untuk membuka usaha. Sesuai dengan yang kami wawancarai ibu andin mengatakan bahwa: *"saya memakai peminjaman karena pada saat itu uang saya sangat kurang jadi saya ambil resiko untuk melakukan pinjaman pada bank tapi alhamdulillah bisa terbayarkan sekarang karena kebetulan juga bunga yang ada peminjaman saya itu kecil mbak"*.

Pertanyaan 5:

Apakah Anda memiliki pendapatan lain dan memiliki rencana untuk membesarkan usaha Anda (*going concern*)?



Sumber: data diolah, 2024

Going concern merupakan sebuah konsep di dalam akuntansi yang menyatakan bahwa sebuah usaha didirikan dengan maksud bahwa usaha tersebut akan terus menjalankan aktivitasnya pada setiap periode atau dalam jangka waktu yang lama [8]. Konsep ini umumnya kurang dipahami oleh para pelaku usaha mikro. Mereka (pelaku usaha mikro) menjalankan usaha untuk tujuan dapat bertahan hidup (membiayai kebutuhan primer) setiap harinya, bagaimana mempertahankan agar dapur tetap berasap. Konsep *going concern* terkesan "mewah" dan "eksklusif" bahkan untuk sekadar diketahui dan dipahami oleh mereka (Wa Ode Rayyani, 2021). Berdasarkan gambar 5 hasil penelitian, terungkap bahwa mayoritas UMKM (12 dari 15) tidak memiliki pendapatan lain. Alasan utama yang diungkapkan meliputi keterbatasan modal, kenyamanan dengan usaha yang sudah ada, serta ketidakmampuan untuk mengidentifikasi peluang usaha baru. Sebaliknya, 3 UMKM memiliki pendapatan lain yang bersumber dari pembukaan cabang baru atau inovasi dengan usaha yang berbeda dari usaha pertama mereka. Motivasi utama mereka adalah keuntungan yang belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, keinginan untuk memperluas usaha, serta mencari pengalaman baru.

Selain itu, ditemukan bahwa 12 UMKM tidak memiliki rencana untuk memperbesar usaha mereka. Pernyataan tersebut diketahui dari pemilik Warung Kopi di Kecamatan Pancoran. *"Ibu mah ga punya modal neng buat ngededein usaha, bisa jualan buat besok aja udah syukur."* (Marni, 2024). Faktor penghambat utama yang disebutkan adalah keterbatasan waktu, kurangnya inovasi, dan kendala biaya. Sebaliknya, 3 UMKM lainnya memiliki rencana untuk mengembangkan usaha mereka. Alasan utama yang mendorong mereka adalah keinginan untuk menambah pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, serta melakukan investasi yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Pertanyaan 6:

Apakah dalam usaha anda menerima utang (piutang)?



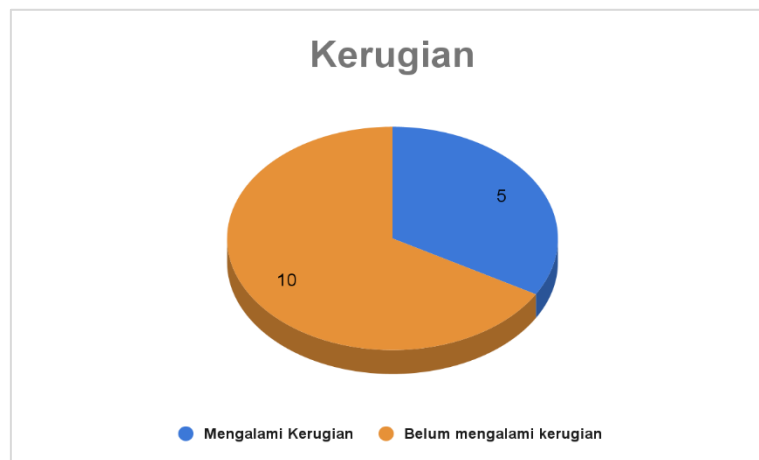
Sumber: Data diolah, 2024

Dari indikator yang ada dalam pengelolaan keuangan yaitu penggunaan anggaran, pencatatan, pelaporan dan pengendalian, hanya tiga indikator yang digunakan oleh pelaku ekonomi. Namun banyak usaha kecil dan menengah yang tidak menerapkan ini dalam kegiatan usahanya. Kegagalan memahami akuntansi dapat mengakibatkan buruknya kinerja perusahaan (Khadijah & Purba, 2020,) seperti pada pencatatan piutang, piutang dagang biasanya yang timbul dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30 hingga 60 hari.

Berdasarkan hasil penelitian kami yang dilakukan dengan 15 UMKM, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa 9 UMKM menerima hutang karena mereka menganggap dengan menggunakan hutang dapat mendorong pelanggan yang mungkin tidak memiliki dana tunai saat itu untuk tetap melakukan pembelian sehingga meningkatkan *volume* penjualan dan membantu UMKM mencapai target penjualan mereka dengan menggunakan faktur penjualan untuk menulis hutang meskipun ada resiko penagihan, Hal ini diungkapkan ibu Yuli selaku UMKM yang telah kami wawancarai mengatakan: *"saya menerima bon karena agar pelanggan bisa membeli barang saya, dan selama saya berdagang saya tidak pernah ada pelanggan yang tidak bayar utang"*. Sedangkan 6 UMKM lainnya tidak menerapkan bon kepada pelanggan karena para UMKM beranggapan bahwa menerima hutang dari pelanggan berarti mereka harus siap menanggung risiko keuangan jika pelanggan tersebut berhutang tidak dapat membayar hutang. Hal ini terungkap dari jawaban Ibu lulu yang mengatakan bahwa: *"kalau saya tidak menerima utang karena saya takut pelanggan yang utang tidak membayar utang mereka yang ada nanti saya rugi"*. Namun, meskipun banyak keuntungan, UMKM harus mengelola risiko yang terkait dengan memberikan bon. Ini termasuk menetapkan kebijakan kredit yang jelas, melakukan evaluasi pelanggan, dan memiliki sistem penagihan yang efektif untuk memastikan pembayaran tepat waktu.

Pertanyaan 7:

Apakah di dalam usaha anda pernah mengalami kerugian?



Sumber: data diolah, 2024

Faktor penghambat dan permasalahan kerugian usaha mikro adalah permasalahan dalam pemasaran produk adalah meskipun sebagian besar pemilik usaha kecil di industri mengutamakan sisi produksi, namun sebagian besar dari mereka hanya berfungsi sebagai perajin karena kurangnya akses terhadap fungsi pemasaran, khususnya informasi pasar dan jaringan pasar. (Aditya, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian kami yang dilakukan dengan 15 UMKM, kesimpulan yang dapat diambil adalah 5 dari 15 UMKM mengalami kerugian dan penyebab kerugian tersebut bermacam macam seperti karena pandemi Covid 19, persaingan yang sangat ketat dan juga modal yang sangat terbatas. ketika pandemi Covid 19 terjadi penurunan daya beli masyarakat turut memperparah kondisi ini, sehingga konsumen cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok dan menunda pembelian barang atau jasa yang tidak esensial dan juga kenaikan harga bahan baku akibat kelangkaan dan disrupsi logistik juga menambah beban biaya bagi UMKM. Sesuai dengan hasil wawancara bersama Ibu Tuti yang mengatakan bahwa *"Saya juga pernah mengalami kerugian pas tahun 2020 jaman covid, soalnya pada dirumah semua neng usaha saya juga pernah tidak buka itu pas covid"*. Persaingan juga dapat membuat kerugian pada UMKM karena persaingan yang ketat di pasar, terutama dengan perusahaan besar yang memiliki modal dan sumber daya lebih banyak dan juga Kesulitan dalam membedakan produk atau layanan mereka. Modal yang sangat terbatas dapat mempengaruhi kerugian karena kurangnya modal awal untuk memulai atau mengembangkan usaha sehingga menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan, seperti beban biaya operasional yang tinggi, seperti sewa tempat, dan biaya bahan baku. Sedangkan 10 dari 15 UMKM yang kami wawancarai mereka tidak mengalami kerugian karena mereka memiliki strategi marketing seperti mereka menentukan target pasar yang jelas dan fokus pada pemenuhan kebutuhan mereka dengan tepat dan juga para UMKM membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu umkm yaitu Bapak Romi yang mengungkapkan bahwa: *"saya tidak pernah mengalami kerugian sih alhamdulillahnya ya usaha saya lancar terus ya karena biasanya kalau sudah malam banyak anak-anak yang nongkrong di warung saya jadi tidak pernah*

sepi dan juga usaha saya juga sesuai yang dibutuhkan anak-anak disini”.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman UMKM mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas UMKM tidak menyusun laporan keuangan dan tidak memahami SAK EMKM. Selain itu, sebagian besar UMKM memisahkan aset pribadi dan usaha untuk efisiensi manajemen keuangan. Pembayaran operasional umumnya dilakukan secara tunai untuk menjaga kesehatan keuangan dan menghindari hutang. Dana pribadi adalah sumber modal utama, meskipun beberapa UMKM menggunakan pinjaman bank. Mayoritas UMKM tidak memiliki pendapatan tambahan dan tidak berencana memperbesar usaha mereka karena keterbatasan sumber daya. Penerimaan utang dari pelanggan dilakukan oleh sebagian UMKM untuk meningkatkan penjualan, meskipun ada resiko finansial. Beberapa UMKM mengalami kerugian akibat faktor eksternal seperti pandemi dan persaingan ketat, namun sebagian lainnya berhasil menghindari kerugian melalui strategi pemasaran yang efektif.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan standar akuntansi dan manajemen keuangan. Kurangnya pemahaman dan penerapan SAK EMKM serta keterbatasan modal menjadi hambatan utama. Namun, beberapa UMKM mampu mengatasi tantangan tersebut dengan strategi manajemen yang baik.

Saran

Terdapat beberapa saran dari penelitian yang telah dilakukan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Perluasan lingkup penelitian penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melibatkan UMKM dari berbagai wilayah yang berbeda di Indonesia untuk memperoleh hasil yang lebih representatif mengenai pemahaman UMKM terhadap penerapan SAK EMKM di berbagai daerah.
2. Penelitian kuantitatif atau campuran disarankan agar peneliti selanjutnya mempertimbangkan untuk menggunakan metode kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna memperoleh data yang lebih beragam dan dapat digeneralisasikan, serta untuk melengkapi data kualitatif dengan analisis statistik yang lebih komprehensif.
3. Penelitian *longitudinal* mengingat perubahan regulasi dan dinamika bisnis UMKM, penelitian *longitudinal* dapat dilakukan untuk memantau bagaimana pemahaman dan penerapan SAK EMKM oleh UMKM berkembang dari waktu ke waktu, serta untuk melihat dampak jangka panjang dari penerapan standar tersebut.
4. Penggalan faktor-faktor lain penelitian berikutnya dapat memperdalam aspek-aspek yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan SAK EMKM, seperti faktor pendidikan, akses terhadap pelatihan akuntansi, atau dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan.
5. Fokus pada sektor tertentu UMKM terdiri dari berbagai sektor usaha, dan

pemahaman serta penerapan SAK EMKM mungkin berbeda antar sektor. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada sektor-sektor tertentu (misalnya, manufaktur, perdagangan, atau jasa) untuk mendapatkan pemahaman yang lebih spesifik.

Daftar Pustaka

- Aditya, F. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendataan Usaha Mikro Jamu Kota Semarang*. <http://lib.unnes.ac.id/33311/1/7111415105.pdf>
- Agus Sulistiyo, Agus Putranto, & Sri Hartiyah. (2022). Jurnal AKuntansi, Manajemen, & Perbankan Syariah. *Pengaruh Literasi Keuangan, Kompetensi Sumberdaya Manusia, Inovasi Produk, Dan Akses Pemasaran Terhadap Kinerja UMKM Di Kabupaten Wonosobo*, 2, 7.
- Baiq Widiastati, & Denni Hambali. (2020). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM UD Sari Bunga. *Jurnal Accounting, Financing and Auditing*, 2. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/500>
- Delvin Kautsar, & Dewi Rejeki. (2020). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Umkm Dalam Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Di Kelurahan Jakasetia*, 7. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1795735&val=18993&title=FAKTOR-FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20PEMAHAMAN%20UMKM%20DALAM%20PENYAJIAN%20LAPORAN%20KEUANGAN%20BERDASARKAN%20SAK%20EMKM%20PADA%20UMKM%20DI%20KELURAHAN%20JAKASETIA>
- Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi. (2023, August). *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>
- Fiani, L. F., & Sri Opti. (2022). Trilogi Accounting And Business Research. *Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kesiapan Pelaku UMKM Terhadap Implementasi Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM*, 03. <https://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/TABR/article/view/1283>
- Hamsan, Halim Usman, & Abid Ramadhan. (2020). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (Sak Emkm) Terhadap Minat Usaha Kecil Dan Menengah Menyusun Laporan Keuangan Di Kota Palopo*. <http://repository.umpalopo.ac.id/858/1/JURNAL%20SKRIPSI.pdf>
- Hasrani Muliadi. (n.d.). *Analisis Peran Kredit Perbankan Terhadap Pengembangan UMKM Kota Palopo*. 2022 khadijah, & purba, N. m. (2020). Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. *Analisis Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Kota Batam*, 5(1), 51. <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/337/173/1546>
- Pardita, I. W. A., Julianto, I. P., & Kurniawan, P. S. (2019). *Pengaruh Tingkat Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi, Tingkat Pemahaman Akuntansi Dan Tingkat Kesiapan Pelaku Umkm Terhadap Penerapan Sak Emkm Pada Umkm Di Kabupaten Gianyar*, 10. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/22803>
- SAK EMKM. (n.d.). SAK_EMKM. Retrieved July 10, 2024, from https://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_sak/emkm/
- Sarendra, S. A. (Ed.). (2019). *Analisis Sumber Pembiayaan Utama Usaha (Studi pada Sentra Industri Alas Kaki di Kedungkwali Kelurahan Miji Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto)*. Repository BKG. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/165534>

Analisis Kepercayaan Generasi Z Terhadap Dompot Digital (*E-Wallet*) Berdasarkan Prinsip Tata Kelola

Syaufiraina Naura Nadra Rizki¹, Risanti Dwita Puspa Zain^{2*}, Dwi Maharani Putri³, Novita⁴

^{1,2,3,4} *Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi, Jakarta Selatan 12760*

*dwi.mhrnptr22@gmail.com

Abstrak

Kepercayaan terhadap dompet digital (*e-wallet*) menjadi kunci utama bagi generasi Z dalam bertransaksi pada era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepercayaan generasi Z terhadap dompet digital (*e-wallet*). Kepercayaan generasi Z merujuk pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 125 sampel. Hasil penelitian bahwa kepercayaan generasi Z terhadap dompet digital (*e-wallet*) tinggi. Hal ini membuktikan bahwa generasi Z pada dasarnya sudah kepercayaan yang baik terhadap layanan dompet digital (*e-wallet*).

Kata kunci: Kepercayaan, Tata Kelola, Dompot Digital.

Abstract

Trust in digital wallets (*e-wallets*) is the main key for generation Z in making transactions in the current digital era. This study aims to analyse generation Z's trust in digital wallets (*e-wallets*). Generation Z's trust refers to the principles of Good Corporate Governance (GCG) which consists of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. This research uses a quantitative approach. Data collection techniques using questionnaires. The number of samples in this study was 127 samples. The results showed that generation Z's trust in digital wallets (*e-wallets*) is high. This proves that generation Z basically has good trust in digital wallet services (*e-wallets*).

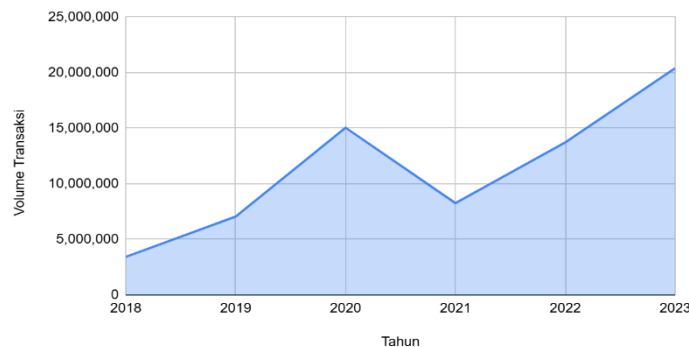
Keywords: Trust, Governance, Digital Wallet.

Pendahuluan

Era digital ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, yang berakibat pada penggunaan teknologi yang semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan teknologi ini telah menggantikan peran uang tunai yang selama ini dikenal oleh masyarakat sebagai alat transaksi, termasuk transformasi dalam sistem pembayaran digital, atau yang sering disebut sebagai pembayaran non-tunai. Saat ini, tanpa disadari masyarakat telah memanfaatkan teknologi finansial (*fintech*), termasuk salah satunya penggunaan produk keuangan berupa uang elektronik (Rahma, 2018).

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) dan peningkatan penggunaan uang elektronik saling berkaitan erat dan menunjukkan perkembangan yang positif, yang merupakan bukti nyata dari dampak positif teknologi finansial (*fintech*) terhadap masyarakat. Sinergi antara *fintech* dan uang elektronik menjadi kunci untuk mewujudkan sistem keuangan digital yang lebih modern dan efisien. Transaksi penggunaan uang elektronik memperlihatkan perubahan antara tahun 2018 sampai dengan 2023. Data jumlah *volume* transaksi uang elektronik tahun 2018–2023 disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Jumlah Volume Transaksi Uang Elektronik Tahun 2018–2023 di Indonesia



Sumber: SPIP Bank Indonesia

Dompot digital, yang dalam bentuk jaringan dikenal dengan istilah *e-wallet*, telah menjadi bagian esensial dari kehidupan modern. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, *e-wallet* menawarkan kemudahan dan keamanan dalam transaksi keuangan. Pengguna dapat menyimpan uang secara digital, melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah, serta mengelola keuangan mereka tanpa perlu membawa uang tunai. *E-wallet* juga mendukung berbagai fitur tambahan seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan, dan pembelian *online*, sehingga semakin memudahkan kehidupan sehari-hari. Kehadiran *e-wallet* mencerminkan perubahan signifikan dalam cara kita bertransaksi, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan mendorong masyarakat menuju ekonomi digital yang lebih efisien.

Generasi Z adalah generasi yang sejak lahir telah terbiasa berinteraksi dengan perkembangan teknologi (Hastini *et al.*, 2020). Generasi Z merupakan mereka yang dilahirkan dalam rentang waktu antara tahun 1995 hingga 2010. Mereka dikenal dengan kemampuan adaptasi tinggi terhadap teknologi, mengingat mereka tidak pernah mengalami dunia tanpa internet dan perangkat *mobile*. Kehidupan sehari-hari mereka sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, media sosial, dan akses informasi yang cepat. Generasi ini tumbuh dengan paparan terhadap berbagai perkembangan global dan budaya yang beragam, yang membentuk pandangan mereka terhadap dunia.

Untuk menarik minat generasi Z, dompet digital harus mampu membangun kepercayaan calon pengguna. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan menunjukkan komitmen nyata dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang terdiri dari transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

harus disajikan secara jelas dan terbuka agar dapat membangun kepercayaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi minat atau niat untuk menggunakan dompet digital. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban, *platform* dompet digital dapat memperkuat hubungan dengan calon pengguna dompet digital. Dengan demikian, kepercayaan yang terbentuk dari implementasi GCG yang konsisten dan terlihat nyata akan memberikan dorongan positif pada keinginan pengguna untuk mengadopsi teknologi dompet digital dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepercayaan generasi Z terhadap dompet digital (*e-wallet*). Penelitian ini akan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kepercayaan tersebut, termasuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh penyedia layanan *e-wallet*. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana *platform* dompet digital dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pengguna dari kalangan generasi Z melalui penerapan praktik-praktik *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik.

Studi Pustaka

Dompet Digital (E-wallet)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 menyatakan bahwa dompet elektronik atau *e-wallet* merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Sedangkan menurut Mulyana & Wijaya (2019) *E-wallet* atau dompet elektronik adalah sarana pembayaran digital yang menggunakan media elektronik berbasis *server*, sehingga memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan melakukan transaksi keuangan secara mudah dan aman.

Pembayaran *e-wallet* dianggap sebagai salah satu metode transaksi yang paling populer karena keunggulan kenyamanan, perlindungan, dan fleksibilitasnya (Uddin, et al., 2014). Pengguna dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu fisik, hanya perlu menggunakan perangkat elektronik seperti *smartphone*. Fleksibilitas *e-wallet* juga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengelola berbagai jenis transaksi, mulai dari pembayaran tagihan, transfer dana, hingga pembelian produk dan layanan secara *online* maupun *offline*.

Tata Kelola

Penerapan tata kelola yang baik merupakan aspek penting dalam bisnis untuk membangun kepercayaan para pemangku kepentingan, termasuk konsumen, dan memastikan perlindungan hak-hak mereka. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) telah merumuskan berbagai pandangan mengenai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG). Dari sekian banyak prinsip, 5 prinsip GCG yang disingkat tarif sebagai berikut.

- a. *Transparency* (transparansi)
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis.
- b. *Accountability* (akuntabilitas)

Suatu perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil.

c. *Responsibility* (tanggung jawab)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan usaha.

d. *Independency* (independensi)

Suatu perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan kekuatan yang memadai, sehingga tidak ada satu organ perusahaan yang mendominasi yang lain dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

e. *Fairness* (kewajaran)

Suatu perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kewajaran.

Tata kelola perusahaan, memainkan peran penting dalam mengendalikan dan mencegah kesalahan dalam strategi perusahaan. Selain itu, tata kelola perusahaan juga memastikan kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki. Menurut (Lukviarman, 2016), tata kelola perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan antara pemangku kepentingan dan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pihak berkuasa dari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan pihak lain.

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik pada *platform* dompet digital (*e-wallet*) diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya Generasi Z, dengan cara memastikan transparansi operasional, keamanan data, dan keterbukaan informasi. Dengan demikian, *platform e-wallet* dapat menjadi pilihan yang lebih dipercaya dan populer di kalangan masyarakat, terutama Generasi Z yang sangat memperhatikan keamanan dan privasi data.

Perilaku Generasi Z

Berdasarkan penelitian, (Mannheim, 1952) bahwa generasi adalah sebuah konsep sosial yang mencakup sekelompok individu dengan usia dan pengalaman historis yang serupa. Menurut (Bencsik, *et al* 2016), terdapatnya perbedaan dari 6 generasi berdasarkan tahun kelahiran, yaitu:

- (1) Generasi Veteran, lahir 1925-1946;
- (2) Generasi Baby Boom, lahir 1946-1960;
- (3) Generasi X, lahir 1960-1980;
- (4) Generasi Y, lahir 1980-1995;
- (5) Generasi Z, lahir 1995-2010;
- (6) Generasi Alpha, lahir 2010-sekarang.

Generasi Z memanfaatkan teknologi digital untuk mengatur keuangan, menabung, dan berinvestasi. Partisipasi berinvestasi generasi Z masih rendah, namun terus meningkat, menunjukkan pemahaman mereka terhadap literasi keuangan. Berdasarkan penelitian (Laturette *et al*, 2021) tingkat literasi keuangan pada Generasi Z hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata pemahaman literatur keuangan generasi Z mengalami kenaikan, maka dapat diartikan bahwa Generasi Z semakin memahami pentingnya mengelola keuangan dengan baik.

Kepercayaan

Kepercayaan adalah elemen utama dalam penerapan teknologi baru, termasuk dompet digital (*e-wallet*). Generasi Z, sebagai kelompok yang tumbuh bersama dengan perkembangan teknologi digital, menunjukkan perilaku dan sikap yang berbeda dalam menggunakan dompet digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan Generasi Z terhadap *e-wallet*.

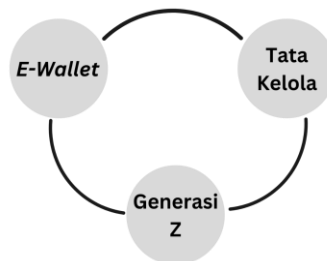
Kepercayaan dalam konteks finansial teknologi didefinisikan sebagai keyakinan pengguna terhadap teknologi yang aman, dapat diandalkan, dan mampu melindungi data pribadi mereka. Menurut (McKnight *et al*, 2002), kepercayaan terhadap teknologi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti reputasi penyedia layanan, pengalaman pengguna, dan keamanan sistem. Penelitian (Kim *et al*, 2008) menemukan bahwa reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan *online*. Penyedia layanan dengan reputasi yang baik dan memiliki dukungan pelanggan yang kuat akan lebih dipercaya oleh para pengguna.

Beberapa penelitian juga menunjukkan kepercayaan konsumen terhadap dompet digital dipengaruhi oleh kualitas layanan, persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan promosi. Oleh karena itu, Generasi Z lebih berhati-hati memilih teknologi finansial dengan mempertimbangkan ulasan dan rekomendasi dari media sosial mereka.

Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan kajian pustaka, kerangka berpikir penelitian disusun sebagai berikut.

Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian



Kerangka pemikiran yang ditampilkan pada Gambar 2 menggambarkan arah penelitian yang akan dilakukan saat ini. Dengan mempertimbangkan perkembangan pesat dompet digital (*e-wallet*) pada masa kini, peneliti bermaksud untuk membahas bagaimana tingkat kepercayaan Generasi Z terhadap penggunaan dompet digital (*e-wallet*). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan mendalam mengenai persepsi dan sikap Generasi Z terhadap dompet digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana data dikumpulkan melalui skala likert untuk mengukur variabel. Populasi penelitian ini adalah Generasi Z Jakarta Selatan yang memiliki rentang usia 15 sampai dengan 29 tahun pada tahun 2024 yang menggunakan dompet digital (*e-wallet*). Roscoe (1975, dalam Sekaran, 2006) yang

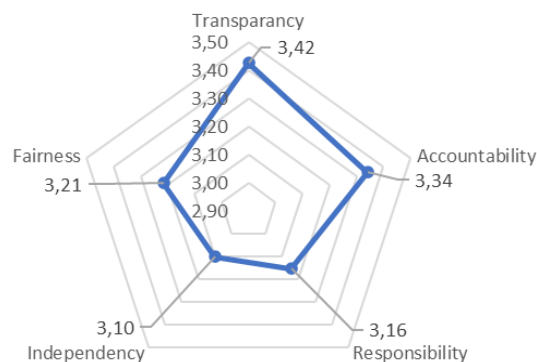
menyatakan bahwa ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Menurut (Sugiyono, 2017) teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 125 orang, dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan metode sampel jenuh. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak Excel Office 2019. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip tata kelola diukur dalam skala 1 hingga 5, dimana semakin besar nilainya berarti semakin tinggi dan nyata dukungan yang diberikan. Berdasarkan hasil tanggapan responden, setiap prinsip tata kelola memiliki nilai diatas 3,0. Hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Generasi Z setuju prinsip tata kelola sudah diterapkan dengan baik pada dompet digital (*e-wallet*). Diantara prinsip tata kelola yang membentuk kepercayaan Generasi Z, terdapat prinsip transparansi (*transparency*) yang memiliki nilai sangat tinggi yaitu 3,42.

Gambar 3. Radar Chart 5 Prinsip Tata Kelola



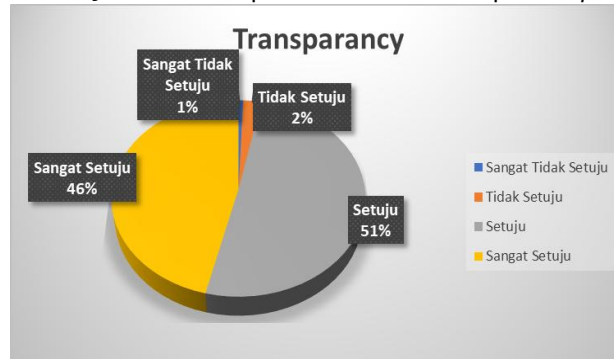
Sumber : Hasil olah data excel, 2024

Prinsip transparansi (*transparency*) membantu responden merasa lebih aman dan percaya bahwa transaksi serta data pribadi mereka dikelola dengan baik. Kepercayaan yang tinggi terhadap prinsip transparansi menjadi indikasi bahwa pengguna Generasi Z cenderung lebih memilih layanan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam operasional mereka seperti menyampaikan informasi mengenai layanan secara jelas dan pemrosesan data transaksi menjadi transparan dan mudah dilacak.

Terdapat nilai yang rendah pada prinsip tata kelola yaitu prinsip independen (*independency*) dengan nilai yaitu 3,10. Rendahnya tingkat kepercayaan dalam prinsip independen (*independency*) mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut dalam memperkuat pentingnya prinsip independen (*independency*) dalam tata kelola. Untuk meningkatkan kepercayaan prinsip *independency*, platform dompet digital (*e-wallet*)

harus menerapkan kebijakan seperti dalam proses pengambilan keputusan bersifat objektif.

Gambar 4. Jawaban Responden Pada Prinsip *Transparency*

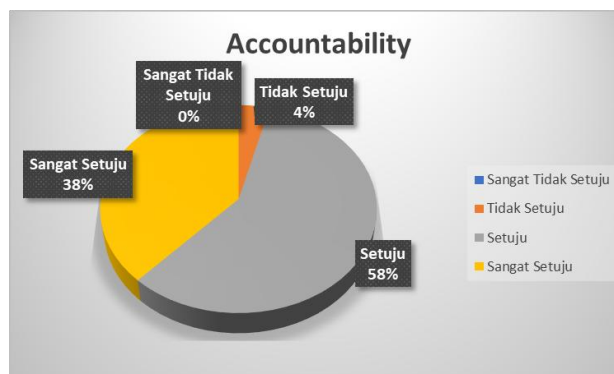


Sumber : Hasil olah data excel, 2024

Berdasarkan Gambar 4 dapat disimpulkan bahwa terdapat tingkat kepercayaan yang tinggi dari generasi Z terhadap dompet digital (*e-wallet*) pada prinsip transparansi (*transparency*). Transparansi (*transparency*) memastikan bahwa pengguna dapat mengetahui bagaimana data dikelola, yang menciptakan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan. Mayoritas pengguna menilai terdapatnya kemudahan akses, kejelasan, ketepatan waktu, kecukupan, dan transparansi dalam layanan, pemrosesan data transaksi, serta pengelolaan data pengguna.

Pengguna merasa bahwa informasi yang diterima mengenai transaksi dan bagaimana data pribadi dikelola dengan jelas dan mudah diakses. Selain itu, ketepatan waktu dalam penyampaian informasi juga menjadi faktor penting, dimana pengguna selalu merasa bahwa mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru mengenai setiap transaksi yang dilakukan. Implementasi transparansi yang baik menjadi salah satu faktor utama yang membuat generasi Z lebih memilih dan tetap menggunakan layanan dompet digital (*e-wallet*). Hal ini memperkuat hasil penelitian (Octavian *et al*, 2023) yang menyatakan bahwa pengguna dompet digital khususnya generasi Z merasa aman dalam melakukan transaksi yang akan mendorong niat dalam penggunaan dompet digital dan meningkatkan kepercayaan generasi Z terhadap dompet digital (*e-wallet*).

Gambar 5. Jawaban Responden Pada Prinsip *Accountability*



Sumber : Hasil olah data excel, 2024

Berdasarkan gambar 5 menunjukkan bahwa generasi Z memiliki kepercayaan terhadap dompet digital (*e-wallet*) terkait prinsip akuntabilitas (*accountability*). Prinsip akuntabilitas memastikan bahwa layanan dompet digital (*e-wallet*) dikelola secara transparan dan bertanggung jawab, maka dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan memenuhi kepentingan *stakeholder* dengan baik. Prinsip akuntabilitas menggambarkan bahwa dompet digital (*e-wallet*) yang digunakan oleh generasi Z terdapat kemudahan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap terkait layanan yang disediakan, transparansi mengenai kebijakan yang diterapkan, serta konsistensi dalam keputusan yang diambil sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas yang kuat, pengguna dapat yakin bahwa dompet digital tersebut bertanggung jawab atas setiap tindakan dan kebijakan yang diterapkan. Hal ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengguna, tetapi juga memperkuat kepercayaan generasi Z terhadap dompet digital (*e-wallet*). Hal ini sejalan dengan penelitian (Ardianto & Azizah, 2021) yang menyatakan bahwa generasi Z setuju dengan menggunakan dompet digital (*e-wallet*) menjadikan transaksi menjadi efektif, serta mempengaruhi niat menggunakan dompet digital (*e-wallet*).

Gambar 6. Jawaban Responden Pada Prinsip *Responsibility*



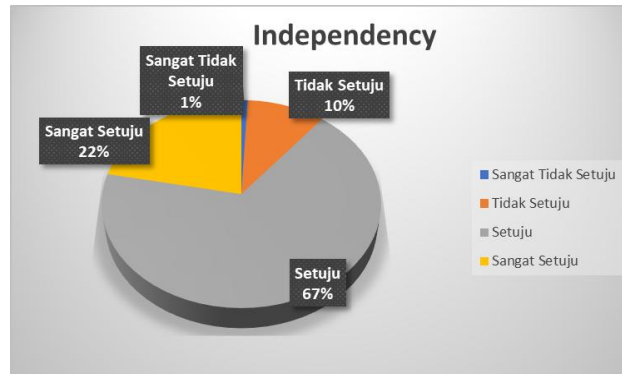
Sumber : Hasil olah data excel, 2024

Gambar 6 menunjukkan bahwa terdapatnya prinsip tanggung jawab (*responsibility*) pada layanan dompet digital (*e-wallet*). Pada prinsip tanggung jawab (*responsibility*) layanan dompet digital (*e-wallet*) harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap pengguna, perlindungan data, serta menjaga operasional yang berkelanjutan dan diakui sebagai penyedia layanan yang bertanggung jawab dan terpercaya.

Sehingga dapat disimpulkan dari hasil tanggapan responden bahwa dompet digital (*e-wallet*) yang digunakan patuh terhadap regulasi, peduli sosial, bertanggung jawab atas layanan, memiliki keamanan data yang kuat, dan komitmen tinggi untuk privasi pengguna. Dengan demikian, layanan dompet digital (*e-wallet*) tidak hanya diakui sebagai penyedia layanan yang bertanggung jawab, tetapi juga menjadi pilihan utama bagi pengguna yang mengutamakan keamanan, keandalan, dan keterpercayaan dalam pengelolaan transaksi keuangan secara digital. Hal ini sejalan dengan penelitian (D'Alessandro et al, 2012) yang menunjukkan bahwa pengurangan risiko yang dirasakan oleh pengguna dapat meningkatkan kepercayaan pada perilaku penggunaan dompet

digital (*e-wallet*).

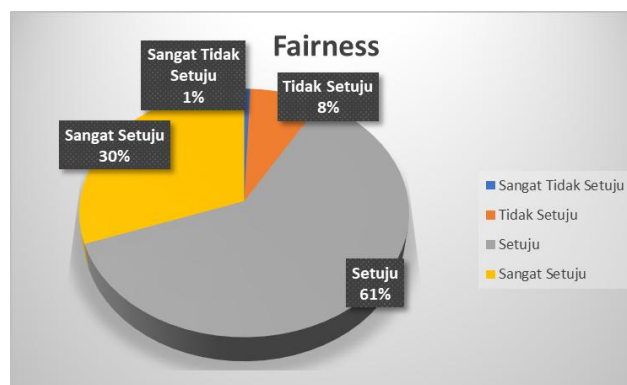
Gambar 7. Jawaban Responden Pada Prinsip *Independency*



Sumber : Hasil olah data excel, 2024

Pada Gambar 7 menunjukkan bahwa mayoritas responden menunjukkan persetujuan terhadap prinsip *independency* yang terdapat dalam tata kelola terhadap dompet digital (*e-wallet*). Berdasarkan hasil tanggapan tersebut, mayoritas responden setuju bahwa prinsip *independency* dalam penggunaan dompet digital (*e-wallet*) sangat penting. Mereka percaya bahwa *independency* ini mampu melindungi kepentingan semua pengguna secara menyeluruh dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Kepercayaan ini dibangun karena generasi Z memiliki beberapa kekhawatiran utama terkait dompet digital (*e-wallet*). Generasi Z sangat peduli dengan privasi data dan ingin memastikan data pribadi mereka aman dari penyalahgunaan. Serta, generasi Z ingin diperlakukan adil dan memiliki kontrol penuh atas keuangan mereka tanpa pengaruh oleh pihak ketiga. Hal ini sejalan dengan penelitian (Ardianto & Azizah, 2021) yang menyatakan bahwa generasi Z masih terdapat beberapa kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data yang perlu di *addressed* oleh penyedia layanan dompet digital (*e-wallet*).

Gambar 8. Jawaban Responden Pada Prinsip *Fairness*



Sumber : Hasil olah data excel, 2024

Berdasarkan Gambar 8 mayoritas responden setuju dengan prinsip *fairness* dalam tata kelola terhadap dompet digital (*e-wallet*). Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z percaya bahwa prinsip *fairness* penting untuk diterapkan dalam tata kelola penggunaan

dompet digital (*e-wallet*). Sehingga mengindikasikan bahwa para pengguna merasakan adanya perlakuan adil, kesempatan untuk memberikan masukan dan kritik, serta penanganan keluhan yang baik dalam penggunaan dompet digital (*e-wallet*) yang mereka gunakan.

Selain itu, dompet digital (*e-wallet*) juga berhasil menciptakan lingkungan yang transparan dan inklusif, di mana para pengguna merasa didengar dan diperlakukan dengan hormat. Respons yang cepat dan solusi yang efektif terhadap keluhan pengguna menunjukkan komitmen dompet digital (*e-wallet*) dalam menjaga kepuasan dan kepercayaan penggunanya. Dengan demikian, dompet digital (*e-wallet*) tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi yang praktis, tetapi juga sebagai platform yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan penggunanya. Hal ini memperkuat hasil penelitian (Paulus A, 2022) yang menyatakan bahwa penilaian pengguna terhadap layanan dompet digital seperti kualitas layanan yang dapat dievaluasi dapat meningkatkan minat maupun kepercayaan generasi Z terhadap dompet digital (*e-wallet*).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan menunjukkan bahwa generasi Z memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap dompet digital (*e-wallet*) pada prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness*. Namun, tingkat kepercayaan terhadap prinsip *independency* masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memperkuat pentingnya prinsip *independency* dalam tata kelola dompet digital (*e-wallet*).

Untuk meningkatkan kepercayaan generasi Z terhadap dompet digital (*e-wallet*), dapat dilakukan dengan memperkuat perlindungan terhadap kepentingan semua pengguna secara menyeluruh, dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Dengan menerapkan hal-hal tersebut akan menjadikan dompet digital (*e-wallet*) lebih terpercaya dan diminati oleh generasi Z.

Daftar Pustaka

- Ardianto, K., & Azizah, N. (2021). Analisis Minat Penggunaan Dompet Digital Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Pengguna di Kota Surabaya. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 23(1), 13. <https://doi.org/10.33370/jpw.v23i1.511>
- D'Alessandro, S. (2012, Juni). *Perceived Risk and Trust as Antecedents of Online Purchasing Behaviour in the USA Gemstone Industry*. <http://dx.doi.org/10.1108/13555851211237902>
- Hastini, L. Y., Fahmi, R., & Lukito, H. (2020, April). Apakah Pembelajaran Menggunakan Teknologi dapat Meningkatkan Literasi Manusia pada Generasi di Indonesia? *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 10(1). <https://doi.org/10.34010/jamika.v10i1.2678>
- Kim, D. J., Ferrin, D. L., & Rao, H. R. (2008). A trust-based consumer decision-making model in electronic commerce: The role of trust, perceived risk, and their antecedents. *Decision Support Systems*, 44(2), 544-564.
- Kupperschmidt's. (2000). Generation X and the Public Employee. *Public Personnel Management*.
- Laturette, K., Widianingsih, L. P., & Subandi, L. (2021). Literasi Keuangan Pada Generasi Z. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 9(1). <https://doi.org/10.26740/jpak.v9n1.p131-139>

- Mannheim, K. (1952). The Problem of Generations. In *Essays on the Sociology of Knowledge* (InP. Kecskemeti ed., pp. 276 - 320). London: Routledge and Kegan Paul.
- McKnight, D. H., Choudhury, V., & Kacmar, C. (2002). Developing and Validating Trust Measures for e-Commerce: An Integrative Typology. *Information Systems Research*, 13(3), 334-359.
- Muhammad, P.W. (2022). Analisis Penggunaan E-Wallet Kalangan Generasi Z di Yogyakarta dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM).
- Mulyana, A., & Wijaya, H. (2018, Oktober). Perancangan E-Payment System Pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android. *Jurnal Sistem Komputer*, 7(2), 63-69. 10.34010/komputika.v7i2.1511
- Octavian, H. S., & Soedargo, B. P. (2023, April). Perilaku Penggunaan Dompot Digital Pada Generasi Z di Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(1), 119-128. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i1.1727>
- Paulus, A. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keamanan, Dan Pengalaman Terhadap Minat Generasi Z Menggunakan Sistem Pembayaran E-Wallet.
- Rahma, T. I. F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology. *Jurnal At-Tawassuth*, 3(1), 642-661. <http://dx.doi.org/10.30821/ajei.v3i1.1704>
- Sekaran, Uma. 2006. Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Strauss, W., & Howe, N. (1991). *Generations : the history of America's future, 1584-2069*. Morrow.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Uddin, M. S., & Akhi, A. Y. (2014). E-Wallet System for Bangladesh an Electronic Payment System.

Pengaruh *Intellectual Capital*, *Capital Structure* Terhadap *Firm Performance* dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderator

Nelli Novyarni^{1*}, Rizkha Fadhillah², Reni Harni³, Kartijo⁴

^{1,2} *Ekonomi dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, 13220*

^{3,4} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sali Al-Aitaam, Bandung, 40287*

*sweetynovyarni@gmail.com

Abstrak

Banyak kinerja perusahaan tidak mencapai target pada 1 tahun terakhir, sehingga dapat dikatakan berkinerja buruk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital* dan *capital structure* terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang diambil 80 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020–2023, metodologi yang digunakan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan Eviews 12, dan temuan penelitian secara umum *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, *capital structure* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital* dan *capital structure* terhadap kinerja perusahaan. Kesimpulan penelitian ini adalah *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital* dan *capital structure* terhadap kinerja perusahaan.

Kata kunci: *intellectual capital*, *capital structure*, *good corporate governance*, kinerja perusahaan.

Pendahuluan

Beberapa sektor usaha terhadap kinerja perusahaan, mempunyai cara untuk membuat kegiatan bisnis yang mampu bersaing antar global adalah meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri. Untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik maka harus di uji coba untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas yang diinginkan, untuk itu memerlukan faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan seperti *capital structure*, *intellectual capital*, *good corporate governance*, dan faktor lainnya lagi. Taouab & Issor (2019). kinerja perusahaan dapat di lihat dengan bantuan menggunakan perusahaan manufaktur dimana perusahaan manufaktur sendiri dikenal sebagai sektor yang menguntungkan pendapatan terbesar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kinerja keuangan merupakan suatu kapasitas organisasi di dalam pengendalian serta pengelolaan yang dimiliki berkaitan dengan sumber daya yang ada. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam mengelola kinerja keuangan agar stabil dan meningkat adalah *intellectual capital*, *good corporate governance*, struktur modal, dan total *asset turn over* (Suzan & Khadrinur, 2023). Adapun keberadaan industri inovatif mampu menghasilkan nilai tambah yang menjamin daya saing bagi perusahaan. Dalam rangka pengimplementasian industri 4.0 di Indonesia untuk menghadapi persaingan global daya

saing Indonesia sudah cukup kuat dan sejalan. Dalam *Competitive Industrial Performance (CIP) Index* tahun 2019 berdasarkan dari hasil laporan *Industrial Development Report*, pencapaian Indonesia berada di peringkat ke-38 dari 150 Negara, dan hal ini merupakan pencapaian serta prestasi karena naik satu peringkat dari tahun sebelumnya (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2020). Baik buruknya kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya *intellectual capital* atau modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan. Kinerja keuangan merupakan gambaran perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek perhimpunan dana maupun penyaluran dana serta menjelaskan penurunan atau perkembangan dari suatu perusahaan (Maulidia & Fahlevi, 2022).

Modal intelektual adalah sebuah sumber pengetahuan yang eksklusif dan bernilai tinggi (Arriba et al., 2021). Modal intelektual merupakan faktor pendorong dalam keunggulan kompetitif dan penciptaan nilai di industri 4.0. Dunia industri 4.0 merupakan industri yang mendorong perusahaan untuk bersaing secara global (Khasanah & Harjito, 2020). Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan pergeseran paradigma bisnis yang berbasis tenaga kerja ke bisnis yang berbasis pada teknologi, sains, dan pengetahuan (Silviani & Noekent, 2020). *Intellectual capital* sendiri terdiri dari berbagai komponen yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki, berbagai kemampuan dalam melakukan pengelolaan teknologi, membangun relasi dengan pihak-pihak luar yang mana nantinya berbagai komponen tersebut tentu dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Pengukuran *intellectual capital* pada penelitian ini menggunakan metode *value added intellectual coefficient* yang dikembangkan oleh Pulic (1997) dalam Saragih (2017) yang menyajikan informasi mengenai aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Kinerja perusahaan erat kaitannya dengan struktur modal, dimana perusahaan menggunakan struktur modal dalam rangka daya saing dan mampu bertahan untuk kelangsungan hidupnya. Teori dasar *intellectual capital* yaitu teori pemangku kepentingan (*stakeholder*). Ketika *stakeholder* berusaha dalam mengatur sumber daya yang ada pada organisasi, arah mereka adalah untuk peningkatan kesejahteraannya sendiri, kekayaan ini dicapai melalui pendapatan yang lebih tinggi yang diperoleh perusahaan (Aryanti & Mertha, 2022).

Kinerja keuangan merupakan hasil pencapaian serangkaian tindakan dan keputusan untuk mencapai tujuan keuangan (Nyoman et al., 2022). *Intellectual capital* merupakan faktor penting perusahaan pada era ekonomi berbasis pengetahuan ini, sumber daya tidak berwujud perusahaan yakni keahlian internal dan pengalaman unik dari orang-orang yang ada di perusahaan dapat mendasari penciptaan inovasi, kompetensi dan kesuksesan sebuah bisnis dan menjadi langkah penting dalam menciptakan keuntungan bisnis. Laporan keuangan sebuah perusahaan atau organisasi banyak yang tidak menunjukkan bahwa *intellectual capital* dapat mewakili proporsi yang signifikan dari nilai total aset sebuah organisasi (Krisyadi et al, 2024).

Apabila struktur modal dapat menyeimbangkan kinerja dan dapat menerapkan pengelolaan hutang dengan baik, maka dapat dikatakan struktur modal sudah optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hutang dan ekuitas perusahaan memiliki sumber permodalan yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Permodalan perusahaan yang digunakan dari laba ditahan dianggap

sebagai keputusan yang paling mudah dan murah, namun jumlahnya yang tidak banyak serta laba tersebut akan dijadikan dividen kemudian akan dibayar kepada investor.

Peningkatan nilai perusahaan menjadi salah satu cara yang dapat diterapkan oleh manajemen perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham perusahaan. Nilai perusahaan adalah hal yang perlu untuk dipertahankan dan dikembangkan. Mempertahankan dan mengembangkan nilai perusahaan adalah hal fundamental yang dilakukan untuk menambah kekayaan dari para investor dan pemangku kepentingan perusahaan (Robiyanto et al., 2021). Investor pasar modal akan menghargai keunggulan *intellectual capital* perusahaan dengan melakukan investasi didalamnya, sehingga menyebabkan peningkatan nilai perusahaan. Kenaikan nilai perusahaan berhubungan secara langsung dengan pengelolaan *intellectual capital*, dimana jika kinerja dan pencapaian *intellectual capital* meningkat, nilai perusahaan juga akan meningkat (Putri et al., 2019). *Intellectual capital* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja perusahaan dimana kinerja perusahaan secara langsung akan meningkatkan nilai perusahaan (Robiyanto et al., 2021).

Pada penelitian Badawi (2018) menemukan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *firm performance*. Mahardika dan Salim (2019) menemukan *intellectual capital* tidak berpengaruh signifikan pada *firm performance*. Ningsih dan Utami (2020) menemukan bahwa *capital structure* berpengaruh positif signifikan terhadap *firm performance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Addison dan Tjakrawala (2021) yang menyatakan bahwa *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *capital structure* terhadap *firm performance*. *Corporate governance* memoderasi pengaruh antara *capital structure* dan *firm performance*, Ahmed et al (2018).

Hasil penelitian dilakukan oleh Haidar (2019) menemukan struktur utang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja perusahaan. Basit & Hasan (2018), yang menyatakan bahwa *capital structure* berpengaruh positif terhadap *firm performance*. Kinerja keuangan merupakan salah satu fungsi strategis manajemen yang bertujuan untuk memuaskan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kinerja harus dicapai melalui hal-hal seperti uji coba, evaluasi, efisiensi, efektivitas, dan kualitas, (Taouab & Issor 2019). Peningkatan kinerja perusahaan tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan salah satunya adalah *intellectual capital*, munculnya ekonomi berbasis pengetahuan banyak perusahaan telah mengubah cara mereka melakukan bisnis dari mengandalkan lebih banyak pada modal fisik sekarang mulai bergeser ke modal intelektual demi menciptakan kinerja perusahaan yang optimal dan dapat unggul dari para pesaing dengan cara perusahaan harus memperhatikan informasi dan pengetahuan, (Isanzu 2015).

Rionald Silaban (2023) selaku Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mengungkapkan bahwa penahanan PMN itu dilakukan karena penjualan yang dilakukan Waskita Karya tidak mencapai target. Terlebih penjualan Waskita Karya ditargetkan mencapai Rp26 triliun hingga Rp28 triliun. Beliau menjelaskan bahwa awalnya pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp3 triliun untuk injeksi modal ke Waskita. Namun, kinerja kontrak baru korporasi jauh di bawah perkiraan bahwa kondisi perusahaan memburuk. Pemilihan struktur modal yang tepat dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Pemilihan struktur modal penting tidak hanya dari sudut pandang

maksimalisasi pengembalian, tetapi juga keputusan ini memiliki dampak besar pada kemampuan perusahaan untuk berhasil beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif.

Menurut Iqbal & Javed (2017), jika perusahaan-perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan ada lebih banyak peluang dan kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan hutang sehingga mampu melunasi iuran, bunga dan hutang mereka tepat waktu. Menurut Malik & Naz (2016), *corporate governance* menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan karena meningkatnya permintaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya di seluruh Negara. Perkembangan pengetahuan informasi mengubah nilai perusahaan dari aset tetap berwujud menjadi aset tidak berwujud. Perusahaan memiliki sumber daya yang unik sehingga tidak mudah perusahaan lain untuk menirunya, maka dari itu perusahaan harus meningkatkan inovasi pada strategi bisnisnya, dengan pengetahuan sumber daya salah satunya adalah *intellectual capital* pada tenaga kerja yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, Hamdan et al (2017).

Hal tersebut menjadikan perusahaan sulit untuk mendapatkan keuangan agar menjaga operasi perusahaan terus tetap berjalan dan likuiditas perusahaan, Malik & Naz (2016). *Capital structure* terdiri dari utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai permodalan atau operasional suatu perusahaan dan *capital structure* yang optimal salah satu opsi yang akan meminimalkan biaya modal perusahaan diiringi dengan memaksimalkan nilai perusahaan, oleh karena itu *capital structure* memiliki pengaruh yang besar pada kesuksesan perusahaan dan nilai pasar, Ahmed et al (2018). Kasus ketika Pandemi COVID-19 menyebabkan krisis keuangan ekonomi secara global dimana pasar saham beraksi pada arus kas perusahaan karena adanya resiko yang sangat besar yang akan dihadapi. Bahkan pasar saham sangat bereaksi di Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Inggris, China, Filipina, dan Thailand akibat pengumuman COVID-19 (Khanthavit, 2020).

Adapun fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya pada industri pariwisata dan perhotelan merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup berat. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan perjalanan serta persyaratan sangat ketat untuk menggunakan transportasi umum, karena meningkatnya kasus COVID-19 membuat masyarakat tidak ingin berpergian. Pandemi membuat pemerintah sempat menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang membuat mobilitas masyarakat turun drastis, dan menyebabkan pendapatan dan laba perusahaan di sektor transportasi merugi. Wabah COVID-19 menyebabkan penurunan *return* saham di pasar saham global terutama untuk Negara-Negara Asia (Liu et al, 2020).

Egbunike dan Okerekeoti (2018) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan merupakan *predictor* yang valid untuk memeriksa ketahanan perusahaan terhadap krisis eksternal yang tidak terduga, seperti COVID-19. Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2023) mengungkapkan kinerja keuangan tahun 2023 Pemprov Sulawesi Selatan tidak sehat setelah Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin menyebut ada defisit keuangan sebesar Rp1,5 triliun. Situasi ini menyebabkan Pemprov bermasalah soal aspek likuiditas atau kesulitan membayar hutang. Yustinus Prastowo (2023) selaku staf khusus Kemenkeu mengungkapkan "Hasil analisis LKPD 2022 dan LRA 2023 Pemprov Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas".

Hasil penelitian dari Ramli et al (2018) mengungkapkan struktur hutang signifikan dan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Haidar (2019), Ahmed et al (2018) mengungkapkan bahwa struktur hutang

mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja perusahaan. Intellectual capital karena dianggap sebagai sumber daya yang membantu perkembangan kinerja perusahaan itu sendiri, Rompas et al (2019). Dengan kemajuan teknologi yang canggih serta informasi yang cepat membuat setiap perusahaan akan terus berusaha dalam menaikkan sumber kapabilitas perusahaan menjadi lebih baik lagi, Devi et al (2017).

Good corporate governance mengacu pada mekanisme, proses, dan hubungan, yang perusahaan dikendalikan dan diarahkan untuk memastikan bahwa perusahaan bertindak untuk kepentingan investor, Haidar (2019). Dengan demikian setiap perusahaan mengindikasikan bahwa investor dapat memperoleh kembali modalnya dengan tingkat pengembalian yang optimal atas investasi mereka serta meminimalkan risiko, Ahmed et al (2018). Namun hasil penelitian Haidar (2019), *corporate governance* tidak memoderasi pengaruh antara *capital structure* terhadap *firm performance*. Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai kemampuan perusahaan dalam menjaga dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Namun, terkadang dalam memaksimalkan kinerja perusahaan terdapat asimetri informasi sehingga munculah konflik kepentingan (Iqbal & Javed, 2017).

Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor yang menyangkut kinerja perusahaan agar tidak terjadinya asimetri informasi, karena merupakan hal yang penting untuk mendeskripsikan prestasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dalam periode tertentu agar tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan diantara struktur modal dan tata kelola perusahaan (Naimah & Hamaidah 2017). Penelitian Leonard dan Tjakrawala (2021) juga menemukan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *firm performance*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rompas et al (2019) dan Tania (2020) yang menemukan *corporate governance* tidak memoderasi pengaruh antara *intellectual capital* terhadap *firm performance*.

Ida Fauziah (2020) selaku Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), mengemukakan sehubungan dengan rekomendasi dari WHO, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di Indonesia melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020. Penerapan PSBB salah satunya berdampak kepada operasional perusahaan karena menyebabkan penurunan, bahkan pemberhentian, aktivitas ekonomi perusahaan selama pandemi. Kemnaker (2020) juga melakukan survei untuk mengetahui implikasi dari pandemi terhadap perusahaan. Di Indonesia terdampak pandemi yang mengakibatkan perusahaan umumnya dalam keadaan merugi.

Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi. Nasution et al (2020) menyatakan bahwa pandemi COVID-19 membawa pasar modal ke arah yang cenderung negatif akibat rendahnya sentimen investor terhadap pasar. Dari fenomena dan hasil penelitian tersebut dapat memengaruhi hasil pengukuran nilai perusahaan. Nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan, Dengan demikian, jika terjadi penurunan harga saham dan kinerja keuangan perusahaan, hasil pengukuran nilai perusahaan dapat mengalami penurunan juga (Ningsih dan Hariyati (2020).

Erick Thohir (2022) selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara mengemukakan terkait perusahaan pelat merah (kendaraan instansi pemerintah yakni memiliki dasar merah dan

angka atau nomornya berwarna putih) yang memiliki kinerja buruk mulai dari tersangkut kasus hukum yang merusak kinerja keuangan sehingga terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada para karyawannya. Sehingga, pihaknya memutuskan untuk melakukan transformasi hingga program bersih-bersih BUMN. Tujuannya untuk menciptakan perusahaan Negara yang dapat berkontribusi kepada masyarakat pada kondisi kesenjangan seperti pandemi dan kenaikan harga komoditas. Contohnya ketika harga tiket pesawat mahal, Garuda Indonesia sendiri sedang dalam kondisi tidak sehat karena harus masuk PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), sehingga belum bisa membantu intervensi harga.

Intellectual capital dengan *firm performance*. Dengan kemajuan teknologi yang canggih serta informasi yang cepat membuat setiap perusahaan akan terus berusaha dalam menaikkan sumber kapabilitas perusahaan menjadi lebih baik lagi, Devi et al (2017). Melalui keunggulan yang dimiliki perusahaan karena kepemilikan teknologi, aset, serta kapabilitas karyawan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan hal ini ditegaskan dalam teori *resource based value* dimana apabila perusahaan mampu melakukan pengelolaan sumber daya dengan efisien, perusahaan akan mendapatkan nilai tambah dan mendapat kinerja yang memuaskan.

Hasil penelitian sejalan dengan Leonard dan Tjakrawala (2021) yang juga menemukan *intellectual capital* berpengaruh positif signifikan terhadap *firm performance*. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Agustiana (2020) dimana *intellectual capital* memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada *firm performance*. *Capital structure* dengan *firm performance*. *Capital structure* terdiri dari utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai permodalan atau operasional suatu perusahaan dan *capital structure* yang optimal salah satu opsi yang akan meminimalkan biaya modal perusahaan diiringi dengan memaksimalkan nilai perusahaan.

Oleh karena itu, *capital structure* mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan perusahaan dan nilai pasar suatu perusahaan, Ahmed et al (2018). Hasil penelitian dari Ramli et al (2018) mengungkapkan struktur hutang signifikan dan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini bertentangan dengan Ningsih dan Utami (2020) dimana *capital structure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *firm performance*. Namun hasil penelitian dilakukan oleh Haidar (2019), Ahmed et al (2018) menemukan struktur hutang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja perusahaan.

Good corporate governance memoderasi pengaruh *capital structure* terhadap *Firm performance*. *Good corporate governance* mengacu pada mekanisme, proses, dan hubungan, yang perusahaan dikendalikan dan diarahkan untuk memastikan bahwa perusahaan bertindak untuk kepentingan investor, Haidar (2019). Dengan demikian setiap perusahaan mengindikasikan bahwa investor dapat memperoleh kembali modalnya dengan tingkat pengembalian yang optimal atas investasi mereka serta meminimalkan risiko, Ahmed et al (2018). Fenomena terjadinya penurunan laba serta kinerja keuangan yang terjadi di berbagai jenis usaha serta menimbulkan terjadinya krisis ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 telah dianalisa oleh pemerintah.

Krisis ekonomi global tahun 2008 juga menyebabkan sektor manufaktur mengalami kesulitan keuangan hingga ke titik rendahnya. Data Badan Pusat Statistik mencatat hampir 13% sektor industri pengolahan mengalami kebangkrutan di tengah krisis

ekonomi 2008. Krisis ekonomi global tahun 2008 mengguncang kondisi keuangan perusahaan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Negara maju seperti Amerika Serikat (Wulandari et al, 2021). Kemudian fenomena tertekannya harga acuan batubara (HBA) sejak awal tahun diperkirakan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan tambang emas hitam di Indonesia (Bisnis.com JAKARTA, 2020).

Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) mengungkapkan kejatuhan harga acuan batu bara akibat pandemi Virus Corona (COVID-19) menimbulkan pertanyaan serius terhadap kinerja keuangan 6 dari 11 produsen batu bara Indonesia. Gheee Peh (2020) selaku penulis laporan dan Analis Keuangan IEEFA mengemukakan harga acuan batu bara Newcastle telah menurun dari harga US\$70 per ton pada Januari ke US\$58 per ton merupakan pukulan berat bagi pelaku industri asal Indonesia.

Hasil penelitian Haidar (2019), *corporate governance* tidak memoderasi pengaruh antara *capital structure* terhadap *firm performance*. Addison dan Tjakrawala (2021) yang menyatakan *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *capital structure* pada *firm performance*. Pengaruh *intellectual capital* terhadap *firm performance* dengan moderasi *good corporate governance*. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh *intellectual capital* terhadap *firm performance* dengan *corporate governance* sebagai moderasi tidak berpengaruh signifikan, atau dapat dikatakan *corporate governance* tidak dapat memoderasi, sehingga H3 pada penelitian ini yang menyatakan *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital* terhadap *firm performance* ditolak.

Hal ini didukung juga oleh teori *resource based value* dimana perusahaan yang mampu memanfaatkan sumber daya efisien maka dapat berpengaruh pada penciptaan nilai tambah pada perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Badawi (2018) menemukan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *firm performance*. Mahardika dan Salim (2019) menemukan *intellectual capital* tidak berpengaruh signifikan terhadap *firm performance*. Ningsih dan Utami (2020) menemukan bahwa *capital structure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *firm performance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Addison dan Tjakrawala (2021) menemukan bahwa *good corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *capital structure* terhadap *firm performance*.

Penelitian Leonard dan Tjakrawala (2021) menemukan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *firm performance*. Agustiana, (2020) juga menemukan *intellectual capital* tidak berpengaruh signifikan terhadap *firm performance*. Fenomena kinerja keuangan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) gagal menunjukkan kinerja terbaiknya. Baik pendapatan maupun laba emiten saham pelat merah ini kompak mengalami penurunan. Sepanjang 2021, SMGR mencatat penurunan pendapatan 0,6% secara tahunan menjadi Rp34,96 triliun dari sebelumnya Rp35,17 triliun. Tetapi, SMGR mencatat beban pokok Rp24 triliun.

Angka ini naik 2.8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp 23,35 triliun dan akhirnya SMGR mencatat penurunan laba kotor menjadi Rp 10,95 triliun dari sebelumnya Rp 11,82 triliun. Penurunan pendapatan dan naiknya beban pokok menjadi penyebab merosotnya kinerja keuangan SMGR, karena efisiensi di sejumlah pos keuangan juga tidak mampu mengkompensasi kombinasi penurunan pendapatan ditambah kenaikan beban pokok (CNBN Indonesia, 2021). Manajemen MSGR (2021) mengungkapkan turunnya pendapatan menjadi salah satu faktor utama melemahnya

kinerja keuangan. Turunnya pendapatan ini dikatakan akibat persaingan yang ketat. Penurunan itu ada kaitannya dengan bertambahnya jumlah karyawan industri semen yang agresif menurunkan harga menggunakan strategi price reduction.

Saham konsumen PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) ditutup turun 1.28% ke level Rp 3.850 per lembar dengan seiring investor memberi tanggapan negatif atas turunnya kinerja keuangan perseroan selama 2021. Selama seminggu, saham UNVR sudah turun 3.75% dan sejak awal tahun sudah melemah 6.33% (CNBN Indonesia, 2022). Ira Novianti (2022) selaku Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk mengungkapkan bahwa gelombang kasus COVID-19 setelah libur tahun baru dan idul fitri, serta munculnya varian terbaru COVID-19 mengakibatkan PPKM diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia pada beberapa bulan di tahun 2021, telah mempengaruhi daya beli konsumen terutama pada segmen pasar dimana Unilever Indonesia beroperasi. Selain itu, berbagai harga komoditas yang menjadi bahan baku juga mengalami lonjakan harga yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2020.

Erick Thohir (2021) selaku menteri BUMN mengemukakan pendapatan yang diperoleh seluruh perusahaan BUMN tahun 2020 sebesar 1.200 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan total pendapatan 1.600, pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 25% yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi perusahaan BUMN dalam keadaan tidak stabil. Pandemi ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar, sehingga perusahaan ditantang untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan membuat strategi baru dalam mengatasi permasalahan di masa pandemi ini (CNN Indonesia, 2021).

Destiawan Soewardjono (2021) selaku Direktur Utama Waskita Karya mengemukakan bahwa kinerja keuangan PT. Waskita Karya Persero Tbk buruk dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2019, kinerja pendapatan perusahaan sudah mengalami penurunan. Kondisi lebih buruk terjadi setelah adanya pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Adanya pandemi COVID-19, Waskita Karya mengalami penurunan kinerja, baik perolehan nilai kontrak, pendapatan, dan posisi keuangan yang alami penurunan sejak 2018.

Studi Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Agency Theory

Teori ini pertama kali diperkenalkan Jensen dan Meckling pada tahun 1976 melalui penelitiannya yang menjelaskan bahwa agen memiliki hubungan kerja dengan *principal*, dimana keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam mencapai tujuan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Dari definisi tersebut, pihak yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan, dimana dalam hal ini yaitu *principal*, cenderung mendapatkan informasi tidak sebanyak pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan (agen), sehingga dapat menimbulkan adanya asimetri informasi antara agen dan *principal*. Dari hubungan agensi dan *principal* akan menimbulkan suatu biaya yang disebut biaya agensi atau dikenal dengan *agency cost*. Biaya agensi terdiri dari 3 macam biaya, yaitu *bonding cost*, *monitoring cost*, dan *residual loss*.

Teori ini menjelaskan mengenai dua orang dalam perekonomian yang tujuannya saling *bertentangan* yaitu *principal* dan *agent*. Menurut Jensen & Meckling (1976) menyebutkan bahwa seorang manajer dalam sebuah perusahaan adalah sebagai "agen"

dan pemegang saham dalam sebuah perusahaan adalah seorang "*principal*". Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada penelitian ini, H2 menyatakan bahwa *good corporate governance* memoderasi secara positif hubungan antara *intellectual capital* terhadap *firm performance* ditolak, CG tidak memoderasi hubungan antara *intellectual capital* dengan *firm performance*. Artinya perusahaan telah dapat memanfaatkan *intellectual capital* secara maksimal dan efisien sehingga tidak diperlukan pengawasan dari pihak institusi.

Konsep teori keagenan (*agency theory*) menurut Supriyono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa *dimana principal* memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *principal* dengan mengutamakan adanya kepentingan dalam mengoptimalkan keuntungan bagi *principal*. Teori keagenan dalam perusahaan adalah pemberian wewenang oleh pemilik perusahaan (pemegang saham) kepada pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, jika kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan nilai perusahaan maka manajemen akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Teori agensi memandang juga bahwa pendelegasian tugas kepada *principal* bisa menghasilkan pencapaian tujuan yang tidak sempurna, bisa saja terdapat kekurangan dalam hasil kerja agen (Matsui, 2018). Teori agensi menjelaskan bahwa dalam pemberlakuannya terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Menurut Fama de Jensen dalam Ghazali (2020), dalam *agency theory* yaitu agen yang berperilaku *self interest*, bertentangan dengan kepentingan *principal* yang membuat *principal* mengawasi agen supaya menahan perilaku oportunistik dan mengikuti kehendak *principal*.

Signalling Theory

George Akerlof pada tahun 1970 melalui tulisannya "The Market Lemons" mengemukakan bahwa apabila pembeli tidak begitu memahami spesifikasi dari suatu produk yang dibelinya, maka produk tersebut cenderung dinilai pada harga yang sama (Akerlof, 1970). Tulisan George Akerlof kemudian dikembangkan oleh Michael Spence pada penelitian yang berjudul "Job Market Signaling" Spence (1973) mengemukakan bahwa perusahaan akan menunjukkan sinyal, baik sinyal positif maupun negatif kepada investor, namun setiap perusahaan pasti menginginkan untuk memberikan informasi positif kepada investor, sehingga investor dapat menginterpretasikan sebagai sinyal positif dan mengurangi asimetri informasi yang ada, dan mampu melakukan penilaian yang baik atas prospek perusahaan di masa depan dan mengurangi persepsi risiko yang dimilikinya. Menurut Brigham & Houston (2019:499), *Signaling theory* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan manajemen perusahaan menginstruksikan investor cara manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan juga berharap melalui sinyal yang diberikan dapat memberikan respon positif dan memberikan keunggulan kompetitif serta mampu memberikan nilai lebih bagi perusahaan. Teori Sinyal pertama kali diperkenalkan dalam penelitian yang berjudul Job Market Signaling oleh Spence (1973). Menurut Brigham & Houston (2019:500), teori sinyal merupakan tindakan yang dilakukan

oleh manajemen perusahaan yang dapat memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan.

Menurut Brigham & Houston (2019:499) pada kenyataannya informasi yang dimiliki oleh manajer perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan pihak luar, sehingga terjadi kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi yang dapat menjadi salah satu faktor terjadinya manajemen laba. Dalam teori ini menjelaskan bahwa perusahaan melakukan suatu tindakan memberikan sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) yang ditunjukkan kepada pemilik (*principle*). Pihak manajemen berupaya memelihara dan mempertahankan reputasi organisasi, agar dapat memberikan sinyal yang positif untuk meningkatkan nilai pasar saham sehingga mendapatkan keuntungan di pasar modal. Sinyal ini juga diwujudkan dalam pengungkapan informasi laporan keuangan untuk memberikan sinyal positif kepada para *stakeholder*, sehingga mampu menciptakan serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam mengambil keputusan investasi, investor memperhatikan kelengkapan informasi, relevansi, ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan. Informasi yang dipublikasikan akan memberikan sinyal kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Teori ini memberi sinyal kepada pemangku kepentingan dengan adanya keterbukaan informasi mengenai aktivitas manajemen dalam mewujudkan keinginan principal (pemilik atau pemegang saham). (D.P.Rahayu, 2019). Hal ini dilakukan untuk mengurangi informasi asimetris karena adanya informasi yang lebih diketahui oleh dibandingkan dengan pihak yang akan berinvestasi, hal ini dikemukakan juga oleh Spence (1973) yang menyatakan teori ini berfungsi untuk meminimalisasi asimetri informasi. Perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi tersebut dengan menyampaikan laporan keuangan untuk mengetahui kondisi perusahaan kepada investor (Rangkuti et al., 2020).

Resource Based View Theory (RBV)

Teori ini dipelopori Wernefelt pada tahun 1984. Kepemilikan sumber daya serta kemampuan perusahaan sangatlah penting, hal ini dikarenakan keunggulan bersaing perusahaan dapat diperoleh bila perusahaan memiliki sumber daya yang tidak dimiliki kompetitor. (Wernefelt, 1984). Perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada produk pengganti atau substitusi dari pandangan konsumen untuk memastikan bahwa perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif dan berapa lama waktu yang dibutuhkan pesaing untuk dapat bersaing dengan produk yang dimiliki perusahaan (Saragih, 2017). Perusahaan dapat menggunakan strategi menyatukan maupun memanfaatkan aset berwujud maupun tidak berwujud. Teori *Resource Based View* (RBV) pertama kali di pelopori oleh Wernerfelt (1984). Teori ini menjelaskan bahwa sumber daya dan kemampuan suatu perusahaan merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan.

Teori RBV memandang bahwa sumber daya dan kemampuan perusahaan penting bagi perusahaan, karena pokok atau dasar dari kemampuan daya saing serta kinerja perusahaan (Bhandari et al., 2020). Asumsi dari teori RBV yaitu mengenai bagaimana suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain, dengan mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan (Campbell & Kubickova, 2020). Teori RBV yang berlaku untuk semua perusahaan, menganjurkan bahwa

keunggulan kompetitif berkelanjutan kinerja dari suatu perusahaan berasal dari pemanfaatan yang efisien baik sumber daya berwujud maupun tidak berwujud. Metodologi *Value Added Intellectual Coefficient* (VAIC) didasarkan pada teori RBV, yang menyatakan bahwa perusahaan menciptakan *value added* dengan menggunakan fisik dan IC, dan *value added* ini merupakan indikator kinerja perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari hasil pengujian yang dilakukan variabel independen *intellectual capital* berpengaruh positif signifikan terhadap *firm performance*.

Dari hasil tersebut H1 penelitian yaitu terdapat pengaruh positif pada hubungan antara *intellectual capital* dengan *firm performance* tidak ditolak, *intellectual capital* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *firm performance*. RBV adalah kerangka kerja manajerial perusahaan yang digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya strategis perusahaan (Ghozali, 2020), teori ini dikembangkan oleh Jay B. Barney (1991). RBV berfokus pada manajerial sumber daya internal perusahaan guna mengidentifikasi aset, kapabilitas, dan kompetensi yang memiliki potensi untuk memberikan keunggulan kompetitif yang unggul. Menurut teori RBV, perusahaan dapat memperoleh keunggulan apabila secara efektif mampu meningkatkan sumber daya (Dasuki, 2021).

Teori ini menjelaskan bahwa keunggulan dalam sumber daya superior membuat perusahaan lebih efisien dan efektif, sehingga bisa memproduksi dengan biaya yang ekonomis dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Hal itu menjadikan nilai tambah tersendiri bagi perusahaan. Selain itu RBV menekankan pada keunggulan kompetitif berkelanjutan yang harus dimiliki perusahaan mengingat adanya pasar bisa jenuh dan perkembangan teknologi serta tidak menutup kemungkinan pesaing lainnya bisa meniru keunggulan kompetitif perusahaan tersebut. Oleh karena itu, teori ini menjelaskan kaitan manajemen aset sebagai keunggulan kompetitif (Judgev, Mathur, & Fung, 2020)

Hasil Penelitian sesuai dengan teori RBV yang menyatakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan merupakan sumber utama untuk menciptakan nilai tambah dan dengan pengelolaan yang efisien akan membuat perusahaan menjadi lebih unggul. *Intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *firm performance*. Hasil penelitian yang berdasarkan teori RBV, jika perusahaan memberikan *value added* yang cukup efektif dan efisien bagi sumber daya karyawan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan yang optimal dan beragam yang akan berdampak pada performa atau kinerja perusahaan juga.

Trade-off Theory

Teori ini menjelaskan banyaknya hutang dan ekuitas perusahaan untuk menyeimbangi timbal balik antara biaya yang dikeluarkan dengan keuntungan yang didapatkan. Menurut teori *trade off theory* menunjukkan bahwa struktur modal dapat dioptimalkan dengan menyeimbangkan pengaruh pajak, biaya agensi, biaya kebangkrutan, dan biaya lainnya. Untuk menilai apakah struktur modal sudah optimal dapat ditentukan dari biaya keagenan perusahaan. Biaya agen ini dapat dikurangi dengan memiliki saham dan utang yang telah ditentukan sebelumnya, Jensen dan Meckling dalam Alipour et al (2015).

Menurut Brigham & Houston (2019:498), *trade off theory* adalah teori dimana perusahaan memperdagangkan atau menukar manfaat pajak dari pembiayaan hutang

dengan masalah yang disebabkan oleh potensi kebangkrutan. Maksudnya adalah dengan adanya bunga yang harus dibayarkan perusahaan membuat hutang lebih murah daripada saham biasa atau preferen, sehingga hutang perusahaan dapat memberikan perlindungan pajak dan juga penggunaan hutang dapat menyebabkan lebih banyak pendapatan operasi perusahaan yang mengalir ke investor. Brigham & Houston (2019:498) juga mengemukakan bahwa perusahaan membatasi penggunaan hutangnya untuk menekan biaya terkait kebangkrutan, sehingga ada batasan tertentu seberapa besar perusahaan dapat memperoleh dana untuk operasional atau ekspansi perusahaan dari berhutang tetapi tidak menyebabkan kebangkrutan.

Jika perusahaan ingin mencapai keuntungan, harus menetapkan target rasio utang yaitu memperhatikan rasio yang lebih tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, maka tingkat kebangkrutannya juga menjadi lebih rendah juga dan menyebabkan penghematan pajak yang besar, Haidar (2019). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa capital structure berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *firm performance*. Hasil penelitian yang sesuai dengan *trade-off theory*, manajemen perusahaan yang baik memperhatikan struktur modalnya, dengan cara memperhitungkan manfaat dan pengeluaran biaya yang akan mengurangi laba perusahaan secara signifikan dan memberikan dorongan untuk bangkrut atau pailit.

Resource-Based Theory

Menurut Mavridis (2005) *intellectual capital* merupakan aset tidak berwujud yang memiliki kemampuan memberikan dan meningkatkan nilai kepada perusahaan dan masyarakat meliputi paten, hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, dan waralaba. Menurut Martinez dan Garcia-Meca (2005) mendefinisikan bahwa *intellectual capital* sebagai pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual, serta pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. Sebaliknya menurut Heng (2001), modal intelektual dalam suatu perusahaan merupakan aset berbasis pengetahuan dalam perusahaan yang mendasari kompetensi inti suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan keunggulan kompetitifnya. *Structural capital* didefinisikan sebagai pengetahuan yang akan tetap berada di dalam perusahaan (Artiah, 2011).

Keberhasilan perusahaan dapat dilihat dari kuat lemahnya sumber daya yang dimiliki serta kapabilitas perusahaan dalam mengubah, memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mendapatkan nilai tambah. Perusahaan dapat menggunakan strategi menyatukan maupun memanfaatkan aset berwujud maupun tidak berwujud. Investor akan tertarik apabila mengetahui perusahaan memiliki hal lain untuk diungkapkan dan hal tersebut akan berdampak parah bagi operasional perusahaan.

Stakeholder Theory

Teori yang mendasari penelitian ini adalah *stakeholder theory*. Teori ini lebih mempertimbangkan posisi *stakeholder* yang dianggap *powerfull* atau berkuasa. Kelompok *stakeholder* ini yang menjadi prioritas bagi perusahaan untuk diungkapkan atau tidak diungkapkan di dalam laporan keuangan. Menurut teori *stakeholder*, perusahaan memiliki *stakeholders*, bukan hanya sekedar *shareholder* (Riahi Belkaoui, 2003). Kelompok-kelompok '*stake*' tersebut, menurut Riahi Belkaoui, meliputi pemegang saham,

karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Dalam konteks teori *stakeholder* muncul kesepakatan bahwa laba akuntansi hanyalah ukuran pengembalian pemegang saham (*shareholder*), sementara *value added* adalah jumlah yang lebih akurat dan tepat yang diciptakan oleh *stakeholders* dan kemudian didistribusikan kepada *stakeholders* yang sama (Meek dan Gray, 1988 dalam Ulum, 2009) yang dianggap lebih akurat memiliki akurasi lebih tinggi dihubungkan dengan *return* atau pengembalian yang dianggap sebagai ukuran bagi *shareholder*. Dengan demikian keduanya (*value added* dan *return*) dapat menjelaskan kekuatan teori *stakeholder* dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja organisasi.

Menurut Nirmalasari (2020) menyatakan bahwa teori *stakeholder* muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki stakeholder, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Sembiring dalam Naek dan Tjun Tjun (2020) menyatakan teori *stakeholder* berpendapat jika keberadaan perusahaan ditentukan pemegang saham. Friedman dan Afifah et, al., (2021) menyimpulkan bahwa tujuan sebenarnya dari perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingannya.

Legitimacy Theory

Teori legitimasi berhubungan erat dengan teori *stakeholder*. Menurut teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk memastikan bahwa aktivitas dan operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat (Deegan, 2004 dalam Ulum, 2009). Menurut Deegan (2004 dalam Ulum, 2009), dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi sangat erat hubungannya dengan pelaporan IC (*Intellectual Coefficient*) dan juga erat kaitannya dengan penggunaan metode *content analysis* sebagai ukuran pelaporan tersebut. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan batasan nilai dan norma serta harapan yang ditentukan masyarakat, maka akan melahirkan *legitimacy gap* (Pratama, 2022).

Intellectual Capital

Steward memaknai *intellectual capital* sebagai segala sesuatu yang terdapat pada perusahaan yang berperan membantu perusahaan dalam bersaing di pasar. Aset ini mencakup *intellectual material* (pengetahuan, informasi, pengalaman) dan *intellectual property* yang dapat diciptakan untuk mewujudkan kesejahteraan. Andriessen berpendapat bahwa *intellectual capital* adalah aset tak berwujud yang menjadi keunggulan daripada perusahaan serta dapat menciptakan keuntungan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa *intellectual capital* dimaknai sebagai aset tidak berwujud mencakup sumber daya dan pengetahuan yang mampu meningkatkan kinerja dan kemampuan bersaing perusahaan.

Intellectual capital merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja perusahaan. *Intellectual capital* merupakan aset, sumber daya, kapasitas, kompetensi karyawan yang dapat menciptakan nilai dan meningkatkan kinerja perusahaan. Kehadiran *intellectual capital* dapat menciptakan inovasi bagi perusahaan dan meningkatkan kinerja perusahaan (Rompas, et al., 2019). Modal intelektual secara umum

dibagi menjadi 3 elemen penting, yaitu *capital employed* yang terdiri dari hubungan yang dimiliki perusahaan dengan mitranya, *human capital* yang terdiri dari kemampuan, keterampilan yang dimiliki oleh pegawai perusahaan, dan *structural capital* yang terdiri atas infrastruktur yang dimiliki perusahaan (Yahaya dan Tijani, 2020).

Intellectual capital dapat memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan dengan adanya aset, kemampuan, teknologi, serta kompetensi karyawan dalam menjalankan sistem, proses organisasi. Perusahaan tentu dapat menyusun strategi yang baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori *resource based value* dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa perusahaan yang mampu melakukan pengelolaan pada sumber daya yang dimilikinya dengan baik maka dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga perusahaan mampu unggul dalam bersaing dan memberikan kinerja yang baik.

Human Capital

Human capital dapat diartikan sebagai aset tidak berwujud yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen baik berupa barang ataupun jasa, selain itu juga memiliki peran dalam memberikan solusi dari permasalahan pelanggan. Selain itu, human capital adalah aset tidak berwujud yang berasal dari sumber daya manusia atau karyawan dengan kompetensi, komitmen, motivasi, serta loyalitas tinggi terhadap perusahaan.

Structural Capital

Structural capital dimaknai sebagai struktur beserta kecakapan perusahaan maupun organisasi dalam memenuhi operasional perusahaan yang dapat mendukung karyawan guna mengoptimalkan hasil dari kinerja intelektual serta kinerja bisnis secara menyeluruh. *Structural capital* mencakup budaya organisasi, proses *manufacturing*, sistem operasional perusahaan dan filosofi manajemen perusahaan.

Customer Capital

Customer capital dimaknai sebagai hubungan baik perusahaan dengan para mitranya (*stakeholder*). Hubungan ini dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, pelanggan yang merasa puas, sehingga loyal terhadap perusahaan serta dari *pemasok* yang berkualitas.

Intellectual capital adalah aset non keuangan (tidak berwujud) yang terdiri atas modal terkait dengan wawasan, keahlian, komitmen, tanggung jawab atas kewajiban. IC mampu memberikan pengaruh guna meningkatkan nilai suatu perusahaan (Agustin et al., 2022). Perhitungan *Value Added Intellectual Capital Coefficient* (VAIC) menjadi proksi IC dengan tahap perhitungannya adalah sebagai berikut (D.S. Rahayu, 2021). Model penghitungan IC yang dikembangkan oleh Pulic dimulai dengan mengukur tingkat *value added* (VA) yang dapat diciptakan oleh perusahaan. *Value added* adalah indikator yang paling objektif dalam menilai kesuksesan bisnis serta mampu memaparkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan nilai.

$$VA = OUT - IN$$

Keterangan :

VA : *Value Added*

OUT : Jumlah Penjualan dan Pendapatan Lainnya (keseluruhan)

IN : Biaya yang digunakan untuk aktivitas penjualan dan biaya lain kecuali
Biaya karyawan (jumlah keseluruhan biaya (di luar biaya tenaga kerja)

Model ini dirumuskan oleh Pulic pada tahun 1998. Pulic mengklaim bahwa fokus dari VAIC adalah penciptaan nilai tambah pada perusahaan. Penciptaan nilai pada sebuah perusahaan harus diukur dan alat ukur tersebut harus memantau efisiensi dari sumber daya dalam menciptakan nilai.

Keunggulan dari metode VAIC adalah data yang digunakan untuk penghitungan kinerja *intellectual capital* relatif mudah diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan. Data yang dibutuhkan untuk menghitung rasio tersebut adalah angka-angka keuangan yang standar dan umumnya tersedia pada laporan keuangan perusahaan.

Tahap selanjutnya untuk mengukur *intellectual capital* dengan VAIC dengan model penghitungan yang meliputi 3 komponen, yaitu :

1. Value Added Human Capital (VAHU)

Human capital adalah pengetahuan mengenai perusahaan yang mencakup keahlian, pengalaman, kemampuan beserta keterampilan dari karyawan pada sebuah perusahaan.

$$VAHU = VA - HC$$

Keterangan :

VA : Nilai tambah atau *value added*

HC : Biaya atau beban karyawan (total biaya gaji tenaga kerja) atau *human capital*

2. Structural Capital Value Added (STVA)

Structural capital adalah sebagai sebuah proses, struktur beserta sistem dari perusahaan yang meliputi strategi bisnis, proses manajemen, struktur perusahaan dan basis data.

$$STVA = (VA - HC)/VA$$

Keterangan:

VA : Nilai tambah

HC : Biaya atau beban karyawan

SC : VA-HC

3. Value Added Capital Employed (VACA)

Capital employed sebagai total dari seluruh aset tetap dan aset lancar yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Nilai tambah yang dihasilkan oleh perusahaan melibatkan peran dari *capital employed*. Tanpa *capital employed* pada sebuah perusahaan, maka *intellectual capital* tidak akan bisa menciptakan nilai tambah.

$$VACA = VA/CE$$

Keterangan:

VA : Nilai tambah

CE : Jumlah ekuitas (hal pemilik perusahaan atas asset setelah dikurangi kewajiban) atau *Capital Employed*

Maka dapat diketahui kinerja *intellectual capital*. Berikut rumus kinerja *intellectual capital* menurut Pulic :

$$VAIC = VAHU + STVA + VACA$$

Keterangan :

VAHU : *Value Added Human Capital*

STVA : *Structural Capital Value Added*

VACA : *Value Added Capital Employed*

Satu metode yang sering dipakai untuk penaksiran nilai kekayaan pengetahuan yaitu modal intelektual (IC), yang telah menjadi sorotan dalam beragam disiplin ilmu seperti manajemen, akuntansi, sosiologi (Hapsari et al., 2021). IC adalah suatu pengetahuan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan apabila dikelola dan dipelihara dengan baik (Rangkuti et al., 2020). IC memegang peranan penting bagi suatu perusahaan dalam berkompetisi dengan para pesaingnya. Nilai IC yang besar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan (D.S. Rahayu., 2021). IC diproksikan dengan VAIC yang dikembangkan oleh Pulic. IC dimulai dengan kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan nilai tambah (VA) yang dipengaruhi oleh modal manusia (HC), modal struktur (SC) juga modal yang digunakan untuk tenaga kerja (CE). Ketika diterapkan, aspek ini memiliki potensi untuk meningkatkan nilai perusahaan (Agustin et al., 2022).

Capital Structure

Struktur modal mampu mengindikasikan kapabilitas perusahaan mengelola modalnya untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan apabila perusahaan memilih kebijakan pendanaan yang akurat (Asiti & Imbayani, 2022). Berikut rumus perhitungan DER :

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$$

Struktur modal sangat penting dalam mengambil keputusan pendanaan perusahaan. Untuk memaksimalkan struktur modal, risiko dan pengembalian harus seimbang. Hutang untuk modal usaha dapat dikatakan kondisi yang baik jika perusahaan mampu memaksimalkan operasional usahanya sehingga perusahaan mengalami perkembangan untuk mendapat return yang sesuai harapan, sehingga investor berasumsi bahwa perusahaan tersebut kedepannya terdapat peluang prospek usaha yang baik (Pradani, (2018), Agustin (2022), Rosalia (2019)).

Struktur modal (DER) dapat memberikan dampak pada kenaikan atau penurunan nilai perusahaan, ialah pendanaan operasi perusahaan melalui hutang sebagai pembayarannya. Peminjaman hutang yang semakin besar maka angsuran serta bunga yang harus dibayarkan akan membesar, hal ini meningkatkan risiko perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut (Irawan & Kusuma, 2019). Struktur modal menjadi parameter menentukan nilai perusahaan, antara modal asing dibandingkan dengan modal pemilik. Penggunaan DER yang besar membawa dampak bagi finansial perusahaan serta bagi nilai perusahaan. Maka, perusahaan perlu memperhatikan struktur modal.

Struktur modal merupakan suatu gabungan modal, utang, dan juga ekuitas. Melihat dari pengertian tradisional, struktur modal tidak menekankan pada bagian hutang yang bersifat jangka pendek, sehingga diartikan sebagai kombinasi dari hutang jangka panjang, modal, dan modal ekuitas (Ngatno, et al., 2021). Struktur modal dapat dikatakan

optimal apabila perusahaan mampu menjamin profitabilitas telah dimaksimalkan sebaik mungkin. Struktur modal diketahui biasa digunakan dalam rangka mendanai pengembangan bisnis perusahaan, dimana pengaruhnya bersifat langsung pada risiko dan pengembalian yang mampu dilakukan oleh perusahaan. Manajemen struktur modal diperlukan karena hal ini berpengaruh pada prospek jangka panjang perusahaan.

Firm Performance

Kinerja perusahaan pada umumnya merupakan gambaran kondisi perusahaan yang menunjukkan baik buruknya kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan pengukuran hasil kerja manajemen perusahaan dari hasil pengimplementasian strategi yang dimilikinya (Anthony, 1998 dalam Saragih, 2017). Dalam kinerja perusahaan, perusahaan dapat melakukan evaluasi kinerja yang membantu perusahaan untuk mengambil keputusan, menilai kinerja perusahaan dari data, indikator, informasi yang telah dikumpulkan.

Kinerja perusahaan ini nantinya dapat digunakan oleh investor dalam melakukan penilaian apakah perusahaan layak untuk diberikan pendanaan atau tidak, dimana kinerja perusahaan ini akan tercermin pada harga saham perusahaan (Badawi, 2018). Kinerja perusahaan adalah tolak ukur untuk mengetahui seberapa baik perusahaan menggunakan model bisnisnya untuk menghasilkan laba dengan tujuan untuk memberikan pengembalian saham yang maksimal terhadap investor (Shibutse et al, 2019). Kinerja perusahaan seringkali diproksikan dengan rasio ROA dan ROE. ROA memungkinkan pengguna untuk menilai seberapa baik mekanisme *corporate governance* perusahaan adalah untuk mengamankan dan memotivasi manajemen perusahaan yang efisien. ROA didefinisikan sebagai laba sebelum pajak dibagi dengan jumlah aset pada akhir periode akuntansi. Adapun rumus dari *Return On Total Aset* (ROA) adalah sebagai berikut :

$$ROA = \frac{EAT}{Total Asset}$$

Keterangan :

Earning After Tax (EAT) = Keuntungan/Laba Setelah Pajak
Total Asset = Total Aset

$$ROE = \frac{Laba Bersih Setelah Pajak}{Total Ekuitas} \times 100\%$$

Keberhasilan finansial suatu organisasi diukur dengan seberapa baik organisasi itu memenuhi tujuan, sasaran, dan visinya sebagai akibat langsung dari upaya yang dilakukan untuk mencapai hal-hal tersebut. Sementara itu, analisis kinerja keuangan melihat seberapa baik suatu perusahaan mengikuti pedoman pelaksanaan keuangan yang telah ditetapkan (Fahmi, 2018). Istilah "Kinerja Keuangan" sebagaimana didefinisikan oleh Sudiyatno dan Fatmawati (2019) mengacu pada hasil akhir dari operasi perusahaan.

Good Corporate Governance

Good corporate governance merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana eksternal. Kepemilikan institusional diproksi dengan menggunakan proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh institusi, seperti pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun. Dengan demikian, kepemilikan institusional diproksikan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\sum \text{Saham yang dimiliki oleh institusi}}{\sum \text{Saham yang beredar akhir tahun}}$$

Dewan komisaris independen diproksi dengan menggunakan proporsi jumlah komisaris independen terhadap total dewan komisaris yang ada di perusahaan sehingga dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Total Dewan Komisaris}}$$

Dewan direksi adalah anggota perseroan yang berwenang dan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kepengurusan bank. Dewan direksi diukur dengan jumlah anggota yang ada di dalam perusahaan.

$$\text{Dewan Direksi} = \sum \text{Anggota Direksi}$$

Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan, audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal.

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

Corporate governance memiliki peran penting dalam mengurangi permasalahan yang dialami oleh perusahaan. *Corporate governance* sendiri dilakukan agar tujuan organisasi dapat dicapai dan terkendali. Mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, pelaksanaan rencana. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat memberikan dampak signifikan bagi *intellectual capital* terhadap *firm performance*. Hal ini dikarenakan pada *corporate governance* yang diwakilkan dengan proksi kepemilikan institusional biasanya memiliki porsi yang cukup besar dalam suatu perusahaan, sehingga mempunyai peran penting pada suatu perusahaan.

Institusi pada umumnya akan lebih senang jika perusahaan memiliki modal intelektual yang besar, karena itu merupakan senjata utama perusahaan dalam bersaing dengan kompetitor dan berdampak positif bagi peningkatan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik dapat memberikan pengaruh signifikan dalam hubungannya dengan *capital structure* terhadap *firm performance*. Pada perusahaan dengan tata kelola yang baik, mendapatkan pinjaman hutang lebih mudah dibandingkan perusahaan yang tidak menjalankan.

Daniel dan Viriany Tahun 2021 *Faculty of Economics & Business*, Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia, Jurnal Ekonomi, SPESIAL ISSUE. November 2021: 265-284 dengan judul Pengaruh *Intellectual Capital*, *Capital Structure* terhadap *Firm Performance* dengan Moderasi *Corporate Governance* dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana hasil penelitian menunjukkan *intellectual capital* berpengaruh positif signifikan pada *firm performance*, *capital structure* berpengaruh negatif signifikan pada *firm performance*, *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital* pada *firm performance*, *corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh *capital structure* pada *firm performance*.

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Pengaruh Intellectual Capital terhadap firm performance

Sesuai dengan teori *RBV* dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa perusahaan mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik maka akan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga perusahaan tersebut mampu bersaing dan memberikan kinerja serta hasil yang baik. Penelitian Leonard dan Tjakrawala (2021) juga menemukan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *firm performance*.

H1: *Intellectual capital* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *firm performance*.

Pengaruh Capital structure Memiliki Pengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Firm Performance

Sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan pendanaan, sebaiknya pihak manajemen mengukur apakah perusahaan dapat memanfaatkan hutang tersebut dengan sebaik mungkin, apakah perusahaan saat ini berada dalam tingkat batas hutang yang wajar dan dapat diterima, karena hal ini akan berdampak pada kebangkrutan perusahaan jika tidak dikelola dengan baik, dan investor dapat kecewa dengan keputusan yang diambil perusahaan dengan tidak bijaksana untuk mendapatkan modal dan investor tidak menanamkan modalnya kembali pada perusahaan tersebut. Struktur modal yang baik tentunya dapat menyeimbangkan tingkat pengembalian atau *return* dan risiko yang dapat diambil perusahaan dari adanya hutang tersebut. Jika peningkatan hutang diikuti dengan kemampuan manajemen yang baik, maka perusahaan mempunyai peluang untuk mengelola aset secara optimal sehingga meningkatkan laba perusahaan.

H2: *Capital Structure* Memiliki Pengaruh Positif dan Signifikan Terhadap *Firm Performance*.

Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Firm Performance dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderator

Good corporate governance merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan dengan tujuan yang luas, tidak hanya bagi *shareholder*, tetapi juga bagi *stakeholder*, yang mencakup pelanggan perusahaan, pemasok, karyawan, dan juga masyarakat (Malik dan Naz, 2016). Mulai dari tahap perencanaan, pengendalian atau pengelolaan, pelaksanaan rencana. Dalam sistem pengelolaannya, mengikuti prinsip tata kelola yang baik. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN PER 01/MBU/2011

yang berisi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara, dimana terdapat transparansi dalam menjalankan pengambilan keputusan serta informasi material lain yang harus diungkapkan.

H3: *Good Corporate Governance* Dapat Memoderasi Pengaruh *Intellectual Capital* Terhadap *Firm Performance*

Pengaruh Capital Structure Terhadap Firm Performance dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderator

Konsep tata kelola perusahaan yang baik, memastikan pengelolaan organisasi sebaik mungkin dan dapat mengurangi asimetri informasi antara agen dan *principal*. Perusahaan dengan tata kelola yang baik dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja suatu perusahaan dari segi *capital structure* terhadap *firm performance*. Pada perusahaan dengan tata kelola yang baik, mendapatkan pinjaman hutang lebih mudah dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki tata kelola yang baik. Pendanaan akan digunakan dalam operasional perusahaan, sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Institusi juga akan mengawasi manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan.

H4: *Good Corporate Governance* Dapat Memoderasi Pengaruh *Capital Structure* Terhadap *Firm Performance*

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

Metode Pengambilan Sampel

Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, karena didasarkan pada kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020–2023 berturut-turut.
- b. Perusahaan manufaktur yang melakukan tutup buku tidak pada 31 Desember selama tahun 2020–2023
- c. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2020–2023 secara lengkap
- d. Perusahaan manufaktur yang melakukan delisting (tidak pernah dihapuskan) pada tahun 2020–2023

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang tidak di olah, misalnya melalui dokumen berupa laporan keuangan dan sumber data diperoleh melalui *website* resmi BEI www.idx.co.id dan *website* resmi perusahaan.

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan penguraian variabel penelitian dalam pengukuran. Pada penelitian ini variabel dibagi menjadi tiga yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Variabel independen pada penelitian ini yaitu

intellectual capital dan *capital structure*. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu *firm performance*. Variabel moderasi pada penelitian ini yaitu *good corporate governance*. *Firm performance* diukur dengan ROA. *Intellectual capital* diukur dengan $VAIC = VACA + VAHU + STVA$. *Capital structure* diukur dengan *total debt/total asset*. *Corporate governance* diukur dengan *institutional ownership/outstanding share*.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear Berganda untuk menjelaskan hubungan beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linear berganda pada penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *intellectual capital* dan *capital structure* terhadap *firm performance* dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi. Alat statistik yang digunakan reviews 12.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Chow

Berdasarkan tabel Uji *Chow*, kedua nilai probabilitas *cross section* dan *chi square* yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0,0000 < 0,05$) sehingga menolak H_0 , jadi menunjukkan *fixed effect model*, model yang terbaik digunakan adalah dengan model menggunakan metode *fixed effect*. Menjadikan uji Hausman perlu dilakukan guna mengetahui metode mana yang akan digunakan, apakah metode *Fixed Effect Model* (FEM) ataukah *Random Effect Model* (REM).

Hasil Uji Hausman

Berdasarkan hasil uji, nilai probabilitas pada *Cross-section random* $0,9864 > 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa metode yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM). Maka artinya peneliti perlu melakukan uji selanjutnya yaitu *Lagrange Multiplier* untuk menentukan metode mana yang akan digunakan, apakah metode *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM).

Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)

Dari hasil uji *Lagrange Multiplier* (LM) diatas, nilai P Breusch-Pagan sebesar $0,0000 < 0,05$ sehingga menolak H_0 , maka model yang terpilih yaitu *Random Effect Model*. Jadi, metode yang baik untuk dilakukan penelitian adalah *Random Effect Model* (REM).

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Uji T dilakukan setelah melakukan uji simultan dan digunakan untuk mengetahui apakah model regresi data panel sudah layak digunakan, maka dilakukan Uji Parsial (Uji T) dengan $\alpha = 5\%$ dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing (parsial) variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pada tabel uji T diatas menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki nilai konstanta sebesar 1.422919 dengan nilai t hitung 14.12740 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0000.

Tabel 1. Hasil Uji T atau Parsial

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic
C	-1.160897	4.603248	-0.252191
X1	-1.471	0.007282	-0.202062
X2	-2.213	0.013005	-1.70178
Z	2.984863	5.775353	0.516828
Obs	320		

Sumber : Output Eviews 12

Variabel *intellectual capital* (X1) memiliki t hitung sebesar 0.810692 dengan nilai signifikansi 0.4182. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi diatas 0.05 ($0.4182 > 0.05$). Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap *firm performance* (H1 ditolak).

Variabel *capital structure* (X2) memiliki t hitung sebesar -2.246568 dengan nilai signifikansi 0,0254. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi dibawah 0.05 ($0.0254 < 0.05$). Dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel *capital structure* berpengaruh terhadap *firm performance* (H2 diterima).

Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji ini untuk menilai apakah variabel *good corporate governance* memoderasi hubungan antara variabel independen *intellectual capital*, *capital structure* terhadap *firm performance*. Suatu variabel dapat dinyatakan sebagai variabel moderasi apabila memiliki nilai signifikansi < 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 2 Hasil Uji MRA

Panel A			
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic
C	-1.63427	5.083965	-0.32146
X1	0.001703	0.017184	0.099108
Z	3.560158	6.423503	0.554239
M1	-0.0042	0.020775	-0.2023
Panel B			
C	-1.40115	4.699977	-0.29812
X2	0.003131	0.047351	0.066123
Z	3.191913	5.942101	0.537169
M2	-0.00679	0.05849	-0.11616

Sumber: Output Eviews 12

Pada tabel diatas menginterpretasi dan membahas atas hipotesis penelitian H3, H4 diatas dapat dilihat sebagai berikut :

- e. *Good corporate governance* memperlemah pengaruh *intellectual capital* terhadap *firm performance*

Tabel menunjukkan bahwa dari hasil MRA interaksi antara variabel *intellectual capital* terhadap *firm performance* memiliki nilai signifikansi 0.5349 (> 0.05). Hal ini berarti

good corporate governance memperlemah hubungan antara *intellectual capital* terhadap *firm performance*. Dapat disimpulkan H3 ditolak.

- f. *Good corporate governance* memperlemah pengaruh *capital structure* terhadap *firm performance*

Tabel menunjukkan bahwa dari hasil MRA interaksi antara variabel *capital structure* terhadap *firm performance* memiliki nilai signifikansi 0.7206 (> 0.05). Hal ini berarti *good corporate governance* memperlemah hubungan antara *capital structure* terhadap *firm performance*. Dapat disimpulkan H4 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Intellectual Capital terhadap Firm Performance

Hasil penelitian menunjukkan *intellectual capital* berpengaruh signifikan terhadap *firm performance*, maka H1 pada penelitian ini yang menyatakan *intellectual capital* berpengaruh signifikan terhadap *firm performance* diterima. Dimana melalui keunggulan yang dimiliki perusahaan karena kepemilikan teknologi, aset, serta kapabilitas karyawan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan hal ini ditegaskan dalam teori RBV dimana apabila perusahaan mampu melakukan pengelolaan sumber daya dengan efisien, perusahaan akan mendapatkan nilai tambah, dan mendapatkan kinerja yang memuaskan.

Pengaruh Capital Structure terhadap Firm Performance

Hasil penelitian menunjukkan *capital structure* berpengaruh signifikan terhadap *firm performance*, maka H2 pada penelitian ini yang menyatakan *capital structure* berpengaruh signifikan terhadap *firm performance* diterima. Peningkatan jumlah hutang yang tinggi dengan kemampuan manajemen yang baik membuat kinerja perusahaan baik dan perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mampu mengelola hutangnya dengan baik.

Pengaruh Good Corporate Governance dalam Memoderasi Intellectual Capital terhadap Firm Performance

Hasil penelitian menunjukkan pengaruh *intellectual capital* terhadap *firm performance* dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan, atau dapat dikatakan *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital* terhadap *firm performance* diterima.

Pengaruh Good Corporate Governance dalam Memoderasi Capital Structure terhadap Firm Performance

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk interaksi antara *capital structure* dengan *good corporate governance* memiliki T hitung negatif sebesar -0.110939 dengan tingkat signifikan 0.9120. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikan > 0.05 ($P > 0.05$) ($0.9120 > 0.05$). Berarti hipotesis berbunyi *good corporate governance* tidak dapat memoderasi pengaruh antara *capital structure* terhadap *firm performance* tidak mendukung hipotesis keempat, maka H4 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan *good corporate governance* tidak dapat memoderasi *capital structure* terhadap *firm performance*, sehingga H4 pada penelitian ini yang menyatakan *good corporate*

governance dapat memoderasi pengaruh *capital structure* terhadap *firm performance* ditolak.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *intellectual capital* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Di sisi lain, struktur modal terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, menunjukkan bahwa keputusan terkait struktur modal dapat berdampak langsung pada pencapaian kinerja perusahaan yang optimal. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *good corporate governance* tidak memoderasi pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti bahwa keberadaan *good corporate governance* tidak mampu memperkuat atau melemahkan peranan *intellectual capital* dalam menentukan kinerja perusahaan. Hal serupa juga terjadi pada hubungan antara *capital structure* dan kinerja perusahaan, di mana *good corporate governance* tidak memiliki peran sebagai moderator yang dapat memengaruhi besar kecilnya pengaruh struktur modal terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya struktur modal dalam meningkatkan kinerja perusahaan, sementara *intellectual capital* dan peranan *good corporate governance* sebagai moderator tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam konteks penelitian ini.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas periode penelitian, misalnya menjadi atau 6 tahun, menggunakan perusahaan lain selain perusahaan manufaktur, mengganti pengukuran variabel atau menambah pengukuran lainnya yang bisa membantu menjelaskan variabel penelitian, dan menggunakan variabel independen lainnya yang mampu menghubungkan pengaruhnya terhadap variabel independen kinerja perusahaan dengan variabel moderasi *good corporate governance*. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penelitian ini hanya berfokus pada periode 2020–2023. Kemudian, penelitian ini juga hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dan juga penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu *intellectual capital* dan *capital structure*.

Daftar Pustaka

- Daniel dan Viriany. 2021. Pengaruh *Intellectual Capital*, *Capital Structure* terhadap *Firm Performance* dengan Moderasi *Corporate Governance*. Jurnal Ekonomi.
- Destiawan Soewardjono. 2021. Dirut Jadi Tersangka, Begini Kinerja Keuangan dan Saham Waskita. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230429142809-17-433234/dirut-jadi-tersangka-begini-kinerja-keuangan-saham-waskita>
- Erick Thohir. 2022. PMN Disebut Untuk BUMN Sakit. Ini Kata Erick Thohir. Available at: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240705181953-17-552221/pmndisebut-untuk-bumn-sakit-ini-kata-erick-thohir>.
- Ida Fauziyah. 2020. Manaker Kampanyekan Gerakan Pekerja Sehat Cegah Penyebaran Pandemi Covid 19. Available at: https://temank3.kemnaker.go.id/page/detail_news/7/e818d137a7b9961e8fe3c316818048b9

- Leonard, Dandy Angger dan Tjakrawala, F.X Kurniawan. 2021. Pengaruh *Intellectual Capital* terhadap *Firm Performance* dengan *Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Multiparadigma Akuntansi. Volume III No.2, 804-813.
- Novanti dan Tjakrawala, F.X Kurniawan. 2021. Pengaruh *Capital Structure* dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Perusahaan dengan Moderator GCG. Jurnal Multiparadigma Akuntansi. Volume III No.4
- Ronald Silaban. 2023. Tandatangani Perjanjian Kinerja, Dirjen KN: Tahun 2023, Tantangan DJKN Semakin *Challenging*. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/31147/Tanda-Tangani-Perjanjian-Kinerja-Dirjen-KN-Tahun-2023-Tantangan-DJKN-Semakin-Challenging.html>
- Silvia, Su Lian dan Rasyid, Rosmita. 2020. Pengaruh *Intellectual Capital* dan *Capital Structure* terhadap *Firm Performance*, Perusahaan Manufaktur. Jurnal Multiparadigma Akuntansi. Volume 2.
- Siregar, Nuzly Camelia; Putra, Rosid Nur Anggara dan Arifah, Nur. 2022. Pengaruh Struktur Modal dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Perusahaan Dimoderasi *Corporate Governance*. Jurnal Studi Ekonomi. Volume 13 No.1
- Tania, Vimala dan Tjakrawala, F.X Kurniawan.2020.Pengaruh *Intellectual Capital*, *Capital Structure* terhadap *Firm Performance: Corporate Governance* Variabel Moderasi. Jurnal Multiparadigma Akuntansi. Volume 2 No.4

Penetapan Materialitas Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Pada Lembaga Tinggi XYZ Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI

Andi Wira Alamsyah¹, Vinola Herawaty^{2*}, Ayu Aulia Oktaviani³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, DKI Jakarta, 11440

*vinola.herawati@trisakti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penetapan materialitas atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Tinggi XYZ oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memahami secara mendalam proses penetapan materialitas dalam perencanaan dan pelaporan audit keuangan. Metode yang digunakan mencakup observasi langsung, analisis dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan materialitas melibatkan tahapan evaluasi risiko, penentuan dasar materialitas, dan penyesuaian selama audit. Proses yang sistematis ini penting untuk efektivitas dan efisiensi audit. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disarankan untuk terus meningkatkan prosedur audit dan kapasitas sumber daya manusia.

Kata kunci: Materialitas, Laporan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Tinggi XYZ, Audit Keuangan.

Pendahuluan

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, salah satu tugas utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP merupakan tanggung jawab gubernur, bupati, atau walikota atas pelaksanaan APBN pada tahun anggaran berkenaan. LKPP disusun secara sistem akuntansi keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Salah satu jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LKPP. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPP. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan, "opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian *intern*".

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrua, pemerintah diharuskan menyajikan laporan keuangan sebelum tahun 2015. Semua pemerintah daerah membuat laporan keuangan berbasis akrual yang terdiri dari tujuh bagian: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, yang kemudian LKPP tersebut merupakan pertanggungjawaban Presiden selaku Kepala Negara atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun berkenaan. Sementara bentuk pertanggungjawaban Menteri/Pimpinan Lembaga atas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga berupa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). LKPP/LKKL harus dilakukan audit dengan tujuan agar laporan keuangan tersebut disajikan dengan wajar, tidak mengandung unsur kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut (Mulyadi, 2014) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian setara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan audit yang dilakukan dimaksud dalam penelitian ini adalah audit atas laporan keuangan suatu kementerian/lembaga.

Auditor harus merencanakan dan merancang metodologi audit, melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif, serta prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Hasilnya adalah laporan audit dengan opini auditor. Ambang batas materialitas adalah krusial dalam merancang metodologi audit. Badan Pemeriksa Keuangan RI mengacu pada SPKN dalam menentukan materialitas. Materialitas penting untuk menilai risiko kesalahan, prosedur audit lanjutan, dan koreksi kesalahan material. Tingkat materialitas diatur dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN. Penelitian ini menekankan pentingnya penetapan materialitas dalam audit keuangan pada Lembaga Tinggi XYZ oleh BPK RI. Berdasarkan literatur yang ada, konsep materialitas ini sudah sering dibahas dalam konteks audit, tetapi penerapannya dalam berbagai jenis organisasi, terutama di lembaga pemerintah, masih menjadi topik yang memerlukan penelitian lebih lanjut (Arens, 2014; IFAC). Banyak studi yang berfokus pada penetapan ambang batas materialitas secara teori, namun hanya sedikit yang membahas tentang bagaimana ambang batas ini diterapkan dalam proses audit sebenarnya pada lembaga pemerintah (Mulyadi, 2014). Hal ini membuka celah penelitian terkait bagaimana BPK menerapkan materialitas dalam audit keuangan lembaga seperti Lembaga Tinggi XYZ, dan bagaimana standar serta praktik yang digunakan dapat mempengaruhi hasil audit.

Meskipun sudah ada standar pemeriksaan berbasis risiko yang dilakukan oleh BPK, masih terdapat celah dalam pemahaman mengenai bagaimana risiko tersebut dinilai pada tingkat entitas dan akun secara spesifik. Apakah pendekatan yang digunakan oleh BPK dalam menilai risiko dan menetapkan materialitas telah optimal atau masih ada peluang perbaikan? Studi ini dapat memperjelas proses dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi.

Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti yang dikutip dari Arens, Loebbecke, Mulyadi (2014), telah membahas pentingnya materialitas dalam konteks audit, namun tidak secara spesifik menyoroti bagaimana dinamika dan kompleksitas penetapan materialitas diterapkan di lembaga pemerintahan yang berbeda-beda. Studi yang lebih baru masih diperlukan untuk memahami sejauh mana pendekatan-pendekatan baru dalam audit materialitas dapat meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan lembaga pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penetapan materialitas dalam perencanaan dan pelaporan audit keuangan pada Lembaga Tinggi XYZ yang dilakukan oleh BPK RI. Tujuan spesifik penelitian ini adalah: (1) Menganalisis penetapan tingkat materialitas perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Tinggi XYZ; (2) Menganalisis penetapan tingkat materialitas pelaporan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Tinggi XYZ.

Studi Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Audit

Audit adalah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti tentang pernyataan kegiatan dan kejadian ekonomi. Audit bertujuan menilai kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta melaporkan temuan kepada pihak terkait. Jenis audit utama meliputi audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional (Arens dan Loebbecke, 2000). Audit laporan keuangan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Audit kepatuhan memastikan entitas mematuhi peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2002), sedangkan audit operasional menilai efisiensi dan efektivitas operasi suatu organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuan dengan mengevaluasi dan meningkatkan manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (Sawyer, 2012). Audit adalah penting dalam tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan kepercayaan *stakeholder*.

Materialitas

Materialitas dalam konteks audit merujuk pada besarnya informasi atau kesalahan penyajian yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi dianggap material jika penghapusannya atau salah saji secara individu atau keseluruhan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan (Arens, 2014). Materialitas adalah konsep yang bersifat relatif, tergantung pada ukuran dan sifat kesalahan serta konteks informasi.

Menurut International Federation of Accountants (IFAC), materialitas adalah besarnya informasi yang menyebabkan perubahan signifikan dalam laporan keuangan suatu entitas jika informasi tersebut dihilangkan atau disajikan secara keliru. Ini berarti bahwa auditor harus mempertimbangkan seberapa besar kesalahan penyajian yang dapat mempengaruhi pandangan pengguna laporan keuangan.

Penetapan materialitas dilakukan melalui proses evaluasi risiko dan bukti audit. Menurut Mebsier et al. (2017), auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam

menetapkan materialitas, termasuk karakteristik entitas yang diaudit, pengguna laporan keuangan, dan jenis transaksi atau saldo akun. Auditor menggunakan tingkat materialitas untuk merencanakan prosedur audit, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, serta mengevaluasi hasil audit.

Evaluasi materialitas dilakukan pada setiap tahap audit. Dalam perencanaan audit, auditor menetapkan tingkat materialitas yang akan digunakan sebagai dasar pengujian. Selama pelaksanaan audit, auditor menilai apakah kesalahan yang ditemukan signifikan secara material. Pada tahap pelaporan, auditor mengevaluasi dampak keseluruhan dari kesalahan yang ditemukan dan memutuskan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Implementasi Materialitas dalam Pemeriksaan Keuangan Publik

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

BPK RI dalam menentukan tingkat materialitas mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN PSP 200 menyatakan “pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang cukup tentang entitas dan informasi yang diperiksa untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan materialitas, risiko, jenis, sumber bukti, serta auditabilitas”.

Panduan Teknis Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN

Penentuan tingkat materialitas dalam pelaksanaan audit sektor publik diatur secara rinci dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN Nomor 7/K/I-XIII.2/6/2020 tanggal 26 Juni 2020. Panduan ini memberikan arahan bagi auditor dalam menetapkan materialitas dan memastikan bahwa proses audit berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Panduan ini mencakup penentuan tingkat materialitas awal, penyesuaian materialitas selama audit berlangsung, dan evaluasi materialitas pada akhir audit. Selain itu, panduan ini juga mengatur tentang penggunaan materialitas untuk mengevaluasi dampak kesalahan dan penyajian laporan keuangan serta komunikasi temuan audit kepada manajemen entitas yang diaudit.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus pada Lembaga Tinggi XYZ. Pendekatan ini sesuai karena penelitian bertujuan untuk memahami proses penetapan materialitas secara mendalam dan mengevaluasi implementasi pendekatan pemeriksaan berbasis risiko oleh BPK RI. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penggunaan observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen akan membantu dalam mengumpulkan informasi kualitatif yang relevan untuk memahami konteks dan proses audit.

Studi kasus dilakukan untuk mengamati dan menganalisis proses penetapan materialitas oleh BPK RI di Lembaga Tinggi XYZ. Dengan demikian, penetapan materialitas yang dilakukan oleh BPK RI di Lembaga Tinggi XYZ menjadi fokus utama dalam penelitian ini, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teori dan standar audit diterapkan dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-eksploratif karena bertujuan untuk menggambarkan dan mengeksplorasi proses penetapan materialitas konteks audit keuangan lembaga pemerintah. Desain ini akan memberikan gambaran rinci tentang praktik audit yang dilakukan oleh BPK RI serta bagaimana pendekatan pemeriksaan berbasis risiko diterapkan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Tinggi XYZ

Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Tinggi XYZ. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi Satuan Kerja (SATKER) dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

- a. Proses penganggaran diperankan oleh modul penganggaran.
- b. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul komitmen (meliputi sub-modul manajemen supplier dan sub-modul manajemen komitmen), modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, dan modul pembayaran.
- c. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan pelaporan.

Basis Akuntansi

Lembaga Tinggi XYZ menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Tinggi XYZ dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi Lembaga Tinggi XYZ menyatakan bahwa, "Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Tinggi XYZ adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- c. Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- d. Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- e. Aset
Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang, dan aset lainnya.
 - 1) Aset lancar;
 - 2) Aset tetap;
 - 3) Piutang jangka panjang;
 - 4) Aset lainnya.
- f. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- g. Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode, pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.
- h. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

i. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Prosedur Penelitian

Salah satu tim penulis merupakan auditor BPK RI yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan pada lembaga tinggi XYZ atas TA 2023. Berikut prosedur penelitian studi kasus yang dilakukan:

a. Pemahaman Entitas dan Proses Bisnis

Auditor melakukan pemahaman mendalam terhadap entitas yang akan diaudit, dalam hal ini lembaga tinggi XYZ, termasuk proses bisnis dan lingkungan operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang berpotensi memiliki risiko kesalahan penyajian material.

b. Penentuan Dasar Materialitas

Auditor menentukan dasar (basis) perhitungan materialitas. Dalam konteks lembaga tinggi XYZ, dasar yang digunakan adalah total realisasi belanja tahun sebelumnya. Basis ini dipilih karena lembaga tinggi XYZ merupakan *expenditure center*.

c. Penentuan Tingkat Materialitas

Auditor menetapkan tingkat materialitas dengan menggunakan persentase tertentu dari dasar yang telah ditentukan. Misalnya, persentase ini bisa sebesar 3.5% dari total realisasi belanja. Tingkat materialitas ini penting untuk mengidentifikasi area yang berisiko tinggi dan menentukan ukuran sampel pemeriksaan.

d. Penilaian Risiko dan Penyesuaian Materialitas

Auditor melakukan penilaian risiko untuk setiap akun dalam laporan keuangan. Penilaian ini melibatkan identifikasi dan evaluasi risiko inheren serta risiko pengendalian untuk menentukan apakah tingkat materialitas awal perlu disesuaikan.

e. Perhitungan Nilai Materialitas Awal

Nilai materialitas awal (*planning materiality*-PM) ditetapkan berdasarkan penilaian risiko yang telah dilakukan. Auditor juga menentukan kesalahan yang dapat ditoleransi (*tolerable misstatement*-TM), yang merupakan batas toleransi auditor terhadap kesalahan yang ditemukan selama audit.

f. Pengujian Pengendalian dan Evaluasi Risiko

Selama pelaksanaan audit, auditor melakukan pengujian pengendalian untuk memastikan efektivitas pengendalian internal entitas yang diaudit. Hasil pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi kembali tingkat risiko yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan.

g. Penyesuaian Materialitas Selama Audit

Auditor melakukan penyesuaian terhadap tingkat materialitas berdasarkan temuan selama audit. Jika ditemukan indikasi kecurangan atau kesalahan signifikan, materialitas awal yang telah ditetapkan dapat direvisi untuk memastikan cakupan audit yang lebih ketat.

h. Dokumentasi dan Persetujuan

Setiap penyesuaian materialitas dan pertimbangan profesional yang digunakan dalam perhitungan materialitas harus didokumentasikan dengan jelas. Auditor memastikan bahwa seluruh perubahan materialitas disetujui oleh Pengendali Teknis atau Penanggung Jawab pemeriksaan dan dikomunikasikan secara tertulis.

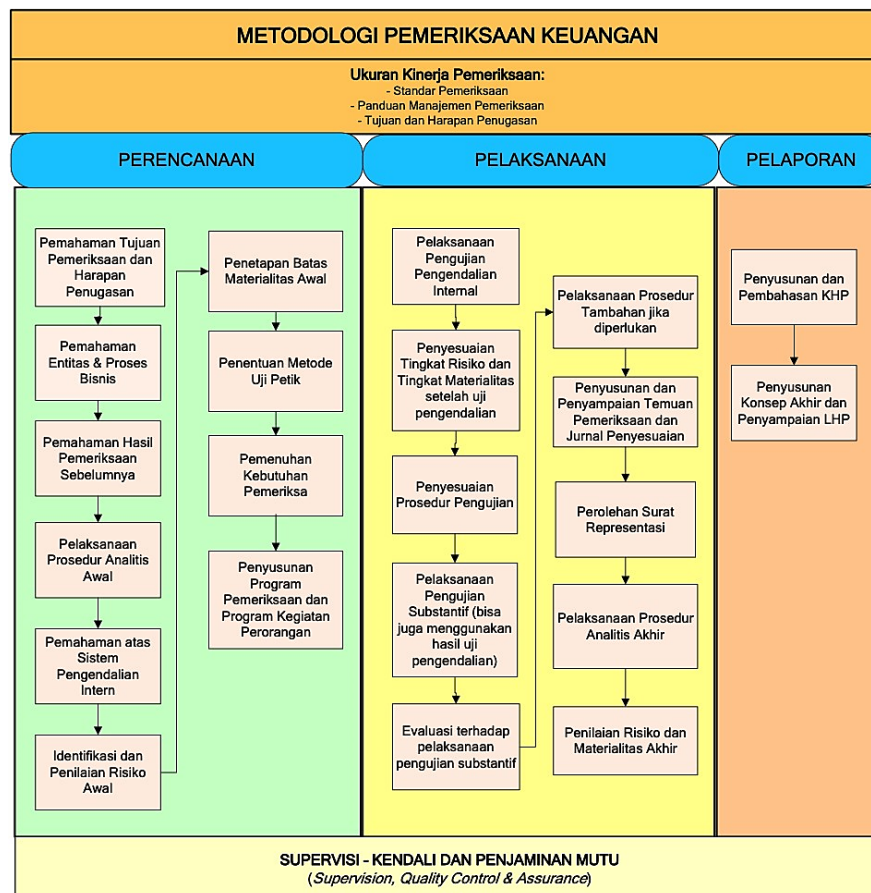
i. Pelaporan Hasil Audit

Pada tahap akhir, auditor menyusun laporan hasil audit yang mencakup penetapan materialitas dan temuan audit. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Hasil dan Pembahasan

Metodologi pemeriksaan keuangan menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Agar pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis, maka pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dengan pendekatan berbasis risiko ini memberikan fokus perhatian pada area-area berisiko tinggi. Penilaian risiko tersebut dilakukan pada tingkat entitas, siklus, kemudian diturunkan pada tingkat akun sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah dalam metodologi pemeriksaan keuangan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Metodologi Pemeriksaan Keuangan



Sesuai dengan SPKN, pemeriksaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pemeriksaan dilakukan untuk mempersiapkan Program Pemeriksaan (P2) yang akan digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

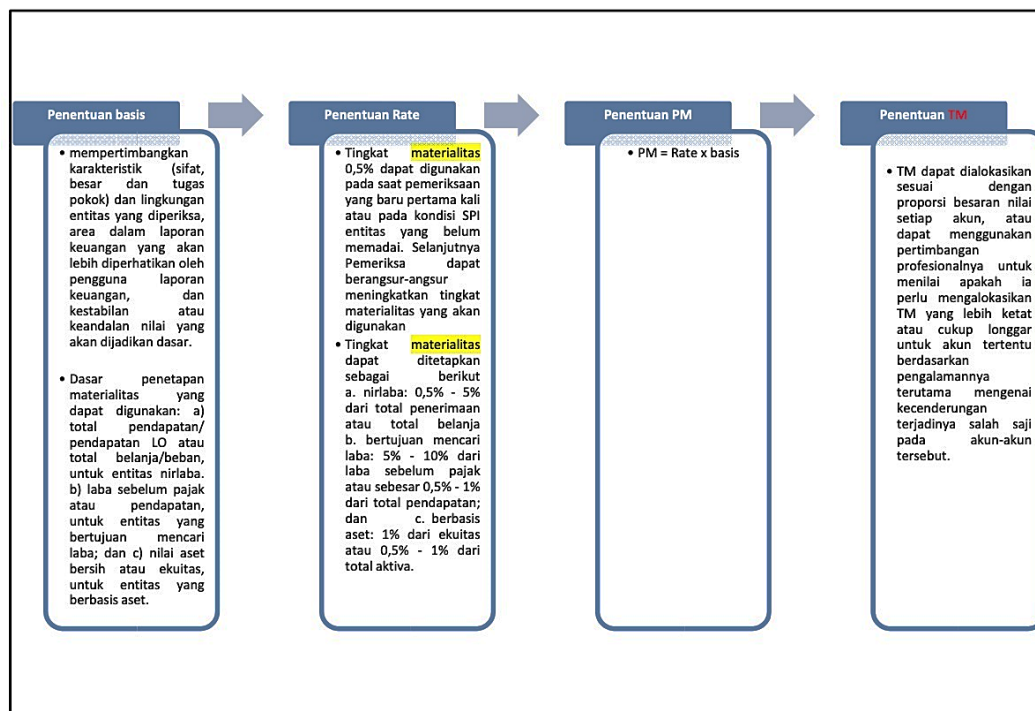
Tahap perencanaan pemeriksaan meliputi 10 (sepuluh) langkah kegiatan, yaitu:

1. Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan;
2. Pemahaman atas Entitas dan Proses Bisnis;
3. Pemahaman Hasil Pemeriksaan Sebelumnya;
4. Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal;
5. Pemahaman atas Sistem Pengendalian Internal;
6. Identifikasi dan Penilaian Risiko Awal;
7. Penetapan Batas Materialitas Awal (PM dan TM);
8. Penentuan Metode Uji Petik;
9. Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa; dan
10. Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kegiatan Perorangan.

Penetapan Materialitas Perencanaan

Planning materiality (PM) dan *tolerable misstatement* (TM) memengaruhi prosedur pemeriksaan dalam audit laporan keuangan. Besarnya PM dan TM mempengaruhi jumlah bukti pemeriksaan atau ukuran sampel yang diperlukan. Materialitas berkaitan dengan bukti/ukuran sampel, semakin tinggi materialitas, semakin sedikit bukti yang diperlukan. PM dan TM berdasarkan risiko pemeriksaan, entitas dengan risiko tinggi memiliki materialitas lebih rendah. Langkah-langkah penetapan materialitas melibatkan dasar, tingkat, nilai awal, dan toleransi kesalahan.

Gambar 2. Penetapan Materialitas Perencanaan



Sesuai dengan juknis pemeriksaan, penetapan materialitas meliputi 4 (empat) langkah, yaitu:

- Penentuan dasar (basis) penetapan materialitas;
- Penentuan tingkat (*rate*) materialitas;
- Penetapan nilai materialitas awal (PM); dan
- Penetapan kesalahan yang dapat ditoleransi.

Langkah-langkah secara ringkas penetapan materialitas dapat dilihat pada gambar 2. Berikut beberapa panduan dalam penetapan PM dan TM pada tahap perencanaan pemeriksaan lembaga tinggi XYZ:

- Penentuan basis untuk lembaga tinggi XYZ dapat menggunakan realisasi belanja, karena lembaga tinggi XYZ umumnya merupakan *expenditure center*. Namun bisa juga ditetapkan lain. Misalnya untuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, pendapatan dapat digunakan sebagai dasar karena sifat pekerjaannya lebih banyak pada perolehan pendapatan.
- Basis yang digunakan dalam perencanaan pemeriksaan lembaga tinggi XYZ menggunakan angka dalam laporan keuangan tahun sebelumnya.
- Penentuan tingkat materialitas juga dapat mempertimbangkan opini hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, kondisi yang diperoleh pada saat interim, pemberitaan, atau dokumen lainnya dapat mempengaruhi keputusan pemilihan tingkat materialitas. Pertimbangan opini terhadap penetapan tingkat materialitas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3. Pertimbangan Opini

Opini Tahun Sebelumnya	Perkembangan Terakhir dari Audit Interim, Dokumen, dan Pemberitaan	%
Adverse/ Disclaimer	Akan mempengaruhi % PM yang akan digunakan Tim Pemeriksa	0,5% - 1%
WDP		1% - 3%
WTP		3% - 5%

Penetapan TM di tahap perencanaan dilakukan dengan mengalokasikan PM secara proporsional ke seluruh akun yang diperiksa. Namun demikian, terdapat akun yang tidak perlu mendapatkan alokasi dalam pemeriksaan atas LKPP/LKKL/LKBUN sebagai berikut.

- Akun-akun yang sifatnya residual dan hanya merupakan penyeimbang seperti akun ekuitas yang merupakan penyeimbang aset dan kewajiban.
- Akun-akun yang tidak signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, akun tidak signifikan jika nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) PM. Secara kualitatif, akun yang nilainya tidak signifikan bisa menjadi signifikan berdasarkan pertimbangan profesional, misalnya transaksi yang besar.
- Sesuai dengan juknis, setelah pemeriksa melakukan pengalokasian TM secara proporsional, selanjutnya alokasikan kembali TM tersebut dengan pertimbangan

kualitatif. Pertimbangan kualitatif yang digunakan dalam persiapan pemeriksaan lembaga tinggi XYZ diantaranya adalah hasil penilaian risiko atas setiap akun. Penilaian risiko tersebut bisa merupakan penilaian risiko pada saat pemeriksaan keuangan tahun sebelumnya atau penilaian pada Saat pemeriksaan interim atau hasil penilaian pada saat persiapan pemeriksaan.

Sesuai dengan juknis materialitas, nilai TM disesuaikan dengan menggunakan pertimbangan kualitatif pemeriksa, di antaranya:

- Risiko inheren dari akun;
- Risiko pengendalian tingkat siklus;
- Waktu yang mungkin diperlukan untuk memverifikasi akun tersebut;
- Akun signifikan dalam laporan keuangan yang diperiksa.
- Faktor-faktor kualitatif lainnya.

Kesimpulan atas tingkat risiko pemeriksaan tersebut memiliki kontribusi terhadap tingkat (*rate*) materialitas, sehingga perhitungan *rate* PM menjadi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1. Perhitungan *Rate* PM

No.	Hasil Penilaian Tingkat Risiko	% Kontribusi Risiko Level Entitas Terhadap PM	% AR	Rate PM
1	6	10,00%	5%	0,50%
2	7	17,50%	5%	0,88%
3	8	25,00%	5%	1,25%
4	9	32,50%	5%	1,63%
5	10	40,00%	5%	2,00%
6	11	47,50%	5%	2,38%
7	12	55,00%	5%	2,75%
8	13	62,50%	5%	3,13%
9	14	70,00%	5%	3,50%
10	15	77,50%	5%	3,88%
11	16	85,00%	5%	4,25%
12	17	92,50%	5%	4,63%
13	18	100,00%	5%	5,00%

Penetapan materialitas pada tahap perencanaan Lembaga Tinggi XYZ didokumentasikan dan disetujui oleh pengendali teknis dan/atau penanggung jawab. Berikut perhitungan PM lembaga tinggi XYZ Tahun Anggaran 2023.

Gambar 4. Perhitungan PM Lembaga Tinggi XYZ

 Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Lembaga Tinggi XYZ Tahun 2023	
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	
Perhitungan Materialitas Awal Lembaga Tinggi XYZ Tahun 2023	
Entitas yang Diperiksa	: Laporan Keuangan Lembaga Tinggi XYZ
Periode Laporan Keuangan	: Tahun 2023
Dasar Perhitungan Materialitas	: Total Realisasi Belanja TA 2022
Jumlah Yang Mendasari	: Rp10.798.163.737.172,00
Prosentasi Materialitas	: 3,50%
Materialitas	: Alasan penetapan rate tersebut adalah berdasarkan hasil dari Tabel Penetapan Nilai Risiko Untuk Penilaian Materialitas Tingkat Laporan (Reff: A.14)
	: $3,50\% \times \text{Rp}10.798.163.737.172,00 = \text{Rp} 377.935.730.801,02$

Penetapan Materialitas Pelaporan pada Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

Setelah pengujian pengendalian, pemeriksa harus mengevaluasi kembali risiko dengan mempertimbangkan hasil pengujian. Evaluasi dilakukan pada pemeriksaan interim/pendahuluan. Risiko pengendalian dan deteksi dapat berubah dan harus diperbarui sesuai hasil pengujian. Jika pengendalian efektif, risiko sesuai dengan yang ditetapkan pada perencanaan. Jika tidak efektif atau ada kecurangan, risiko harus dipertimbangkan ulang. Penyesuaian risiko juga berpengaruh pada risiko deteksi. Materialitas perlu dinilai lagi dan dapat diubah jika perlu, terutama jika ada ketidakpatuhan atau indikasi kecurangan yang signifikan. Materialitas awal bisa direvisi saat pekerjaan lapangan karena perubahan ruang lingkup atau informasi tambahan tentang entitas yang diperiksa selama berlangsungnya pekerjaan lapangan, misalnya ditemukan adanya indikasi terjadi kecurangan. Berikut, penentuan materialitas pelaporan lembaga tinggi XYZ.

Tabel 2. Penentuan Materialitas Pelaporan Lembaga Tinggi XYZ

Entitas yang diperiksa	Laporan Keuangan Lembaga Tinggi XYZ
Periode Laporan Keuangan	Tahun 2023
Dasar Perhitungan Materialitas	Total Realisasi Belanja
Jumlah Yang Mendasar	Rp. 15.952.184.596.199,00
<i>Prosentasi Materialitas</i>	3,50% Alasan penetapan <i>rate</i> tersebut adalah berdasarkan hasil dari tabel penetapan nilai risiko untuk penilaian materialitas Tingkat Laporan (reff: A.14)
Materialitas	$3,50\% \times \text{Rp. } 15.952.184.596.199,00 = \text{Rp. } 558.326.460.866,97$

Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dan asas konservatisme untuk menurunkan tingkat materialitas lebih rendah dari tingkat materialitas awal yang telah ditetapkan sebelumnya, dan setiap perubahan tersebut harus disetujui oleh penanggung jawab dan dikomunikasikan secara tertulis kepada pemberi tugas. Lebih lanjut, pemeriksa harus mendokumentasikan setiap pertimbangan profesional beserta cara perhitungan yang dilakukannya dalam menetapkan tingkat materialitas. Dokumentasi tersebut diperlukan dalam proses reviu dan persetujuan dari pengendali teknis dan penanggung jawab pemeriksaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penetapan materialitas pada lembaga tinggi XYZ oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun Anggaran 2023, menunjukkan bahwa penetapan materialitas dalam pemeriksaan keuangan lembaga tinggi XYZ tahun anggaran 2023 dilakukan melalui tahapan perencanaan dan pelaporan yang sistematis. Pada aspek penetapan materialitas dalam perencanaan terlihat bahwa materialitas berdasarkan total belanja tahun sebelumnya sebesar 3.5%. Nilai materialitas awal digunakan untuk identifikasi area berisiko tinggi dan sampel pemeriksaan. Kesalahan yang dapat ditoleransi ditetapkan untuk mengukur toleransi auditor terhadap kesalahan yang

ditemukan selama audit. Penilaian risiko dan penyesuaian materialitas dilakukan untuk memastikan bahwa audit mencakup area yang paling kritis.

Pada aspek Penetapan materialitas dalam pelaporan terlihat bahwa evaluasi hasil pengujian pengendalian dilakukan untuk menentukan apakah risiko yang dinilai pada tahap perencanaan tetap berlaku atau perlu disesuaikan. Penyesuaian materialitas berdasarkan temuan audit dilakukan untuk memastikan cakupan audit yang lebih ketat jika ditemukan adanya kecurangan atau kesalahan signifikan. Materialitas awal yang ditetapkan pada tahap perencanaan dapat direvisi pada tahap pelaporan berdasarkan temuan audit untuk memastikan laporan keuangan disajikan dengan wajar. Setiap penyesuaian materialitas harus didokumentasikan dengan jelas dan disetujui oleh pengendali teknis atau penanggung jawab pemeriksaan.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana teori materialitas diterapkan dalam praktik oleh BPK RI, khususnya pada lembaga tinggi XYZ. Hasilnya diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi auditor lain dalam menerapkan konsep materialitas dalam audit sektor publik, yang berbeda dengan sektor swasta.

Daftar Pustaka

- Arens, A. A. et al. (2014). *Auditing and Assurance Services* (15th ed.). England: Pearson Education Limited.
- Arens, Alvin & James K Loebbecke. (2000). *Auditing An Integrated Approach*. New Jersey : Prentice-Hall
- Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP- 132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
- Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2017). *Auditing & assurance services: A systematic approach* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- Mulyadi. 2014. *Auditing*. Edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
- Petunjuk Teknis Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN Nomor 7/K/I-XIII.2/6/2020 Tanggal 26 Juni 2020
- Sawyer, L. B. (2012). *Sawyer's internal auditing: Enhancing and protecting organizational value*. 6th ed. The Institute of Internal Auditors.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk.

Nia Renita Christin¹, Tegar Apriansyah Wismajaya Putra^{2*}, Exsa Alfika³

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon*

*tegarapriansyah88@gmail.com

Abstrak

PT Unilever merupakan salah satu yang masuk dalam daftar gerakan pemboikotan oleh komunitas *Boycott, Divestment, Sanctions* (BDS). Sebagai entitas yang tidak terpisahkan dari unilver global, unilever Indonesia juga terkena dampak tersebut. Sebelum adanya perang yang meledak pada 7 Oktober 2023, saham UNVR masih dikisaran 3.800. Namun kini menurun 270 poin (7,1%) ke 3.530 (Winosa 2023). Pengunduran direksi dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sebuah perusahaan. Penelitian ini dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak pengunduran direksi, pengembangan kebijakan publik, dan mendorong penelitian lebih lanjut tentang *Good Corporate Governance*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Sumber data penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan PT Unilever, website, serta jurnal terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan PT Unilever Tbk. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengunduran direksi dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sebuah perusahaan.

Kata Kunci: *Corporate Governance, Good Corporate Governance, Kinerja Perusahaan, Pengunduran Direksi.*

Pendahuluan

Dua direktur PT. Unilever Tbk telah mengajukan pengunduran diri kepada perusahaan dan pemberitahuan resmi diteruskan kepada Bursa Efek Indonesia. Pengunduran diri ini sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) No.31/POJK.04/2015 tentang keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan public dan peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan public (Hikam 2023). Pengunduran para direksi UNVR satu persatu ini ada keterkaitannya dengan isu krisis merek perusahaan asal inggris tersebut dan menyusul perang Israel-hamas, organisasi militer yang tidak ada kaitannya atau independent dari pemerintah palestina. Unilever merupakan salah satu yang masuk dalam daftar gerakan pemboikotan oleh komunitas *Boycott, Divestment, Sanctions* (BDS). Sebagai entitas yang tidak terpisahkan dari unilver global, unilever Indonesia juga terkena dampak tersebut. sebelum adanya perang yang meledak pada 7 Oktober 2023, saham UNVR masih dikisaran 3.800. namun kini menurun 270 poin (7,1%) ke 3.530 (Winosa 2023).

Pengunduran direksi dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sebuah perusahaan. Pengunduran direksi secara tiba-tiba dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam perusahaan, gangguan komunikasi dalam perusahaan serta dapat merusak reputasi dan citra perusahaan. Hal ini dapat mengganggu jalannya bisnis perusahaan, menurunkan kepercayaan *stakeholder*, dan dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan publik sehingga dapat mengganggu penerapan *Good Corporate Governance*.

Pengunduran direksi yang tidak terkendali atau tidak terduga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam manajemen perusahaan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap *Good Corporate Governance*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengunduran direksi dapat menciptakan kekosongan informasi dan visi, mengakibatkan pergeseran prioritas atau bahkan perubahan strategi organisasi. Hal ini dapat merugikan keseimbangan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, mengarah pada ketidakefektifan sistem pengendalian manajemen sehingga akan mempengaruhi tata kelola perusahaan (Ramadhan and Hwihanus 2024).

PT Unilever Indonesia Tbk (perusahaan) didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zeepfabrieken N.V. Lever dengan akta No. 33 yang dibuat oleh Tn.A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia, tertanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh dan produk- produk kosmetik. PT Unilever selalu menekankan pada integritas dan kualitas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. (Abdul Kadir 2018).

PT Unilever Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh publik bahwa terdapat isu boikot terhadap produk- produk PT Unilever Indonesia Tbk yang diduga terafiliasi dengan Israel. Seruan boikot terhadap produk-produk Unilever ini memberikan dampak terhadap penjualan produk dan reputasi perusahaan. Hal ini menjadikan Unilever sebagai objek penelitian yang menarik untuk mempelajari bagaimana pengaruh pengunduran direksi terhadap penerapan *Corporate Governance*.

Penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan bagi ilmu pengetahuan, praktik bisnis, dan kebijakan publik. Penelitian ini dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak pengunduran direksi, pengembangan kebijakan publik, dan mendorong penelitian lebih lanjut tentang *Good Corporate Governance*.

Kajian Pustaka

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori keagenan adalah konsep dalam ekonomi dan manajemen yang mengkaji hubungan antara pemilik suatu perusahaan (prinsipal) dan pihak yang dipekerjakan untuk mengelola perusahaan tersebut (agen), Hal yang mendasari konsep teori keagenan muncul dari satu individu menjadi dua individu. Salah satu individu sebagai agen untuk yang lain disebut principal. Agen merupakan pembuat sebuah kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi principal. Sedangkan principal merupakan pembuat kontrak untuk memberikan imbalan bagi para agen (Hendriksen & Breda,

1992). Ini mencakup studi tentang konflik kepentingan di antara kedua pihak dan bagaimana struktur insentif dapat dirancang untuk mengatasi masalah agen. Teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai principal sedangkan manajemen sebagai agen. Manajemen yaitu pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Maka dari itu, manajemen harus mempertanggungjawabkan semua usahanya kepada pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).

Corporate Governance

Corporate governance adalah kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana sebuah perusahaan dijalankan dan diawasi. Hal ini mencakup distribusi tanggung jawab dan hak antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam mengelola perusahaan. Tujuan utama dari *corporate governance* adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemegang saham, dan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Ini juga mencakup prinsip-prinsip etika dan integritas dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) mengacu pada praktik-praktik terbaik yang dirancang untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan dijalankan dengan transparan, etis, dan akuntabel. Prinsip-prinsip GCG mencakup peningkatan kinerja perusahaan, perlindungan kepentingan pemegang saham, pengelolaan risiko yang efektif, pengungkapan informasi yang tepat waktu dan akurat, serta pematuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. GCG juga mempromosikan integritas, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan perusahaan. Dengan menerapkan praktik-praktik GCG yang baik, perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan membangun kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan.

Pengunduran direksi yang tidak terkendali atau tidak terduga dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam manajemen perusahaan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap *Good Corporate Governance*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengunduran direksi dapat menciptakan kekosongan informasi dan visi, mengakibatkan pergeseran prioritas atau bahkan perubahan strategi organisasi. Hal ini dapat merugikan keseimbangan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, mengarah pada ketidakefektifan sistem pengendalian manajemen, sehingga akan mempengaruhi tata kelola perusahaan (Ramadhan and Hwihanus 2024).

PT Unilever Indonesia Tbk (perusahaan) didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zeepfabrieken N.V. Lever dengan akta No. 33 yang dibuat oleh Tn.A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia, tertanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh dan produk-produk kosmetik. PT Unilever selalu menekankan pada

integritas dan kualitas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. (Abdul Kadir 2018).

Dalam kerangka tata kelola terhadap manajemen risiko ialah dapat mengidentifikasi risiko utama pada perusahaan, dapat mengontrol dan menetapkan risiko manajemen secara efektif, sehingga perusahaan tersebut terlihat aman dan terkontrol oleh manajer yang akan bertanggung jawab, mencapai target yang maksimal agar perusahaan menjadi baik, menyediakan saran informasi dan komunikasi yang baik agar target tersebut berjalan dengan lancar. Tata kelola ini berfungsi untuk memonitor dan mengatur serta memastikan bahwa manajer telah melakukan tugas yang dipercayai dan sesuai dengan kemauan pemegang saham Bennaccur dan Kandil. (Audrina, Patricia, and Mukminah Pulungan 2022).

Hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja dijadikan dasar bagi manajemen atau pengelolaan perusahaan untuk perbaiki kinerja pada periode berikutnya dan dijadikan landasan pemberian reward and punishment terhadap manajer dan anggota organisasi. Pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu sangat bermanfaat untuk menilai kemajuan yang telah dicapai perusahaan dan menghasilkan informasi yang sangat Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen: Volume 8, Nomor 6, Juni 2019 4 bermanfaat untuk mengambil keputusan kepada para *stakeholder*. Dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan merupakan kinerja yang harus diukur untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, karena informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan akan sangat bermanfaat bagi banyak pihak dalam berbagai proses pengambilan keputusan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. (Nugroho and Laily 2019).

Tata kelola perusahaan pada hakekatnya berkonsentrasi pada cara-cara yang baik untuk menjamin keputusan-keputusan strategis dapat dilakukan dengan benar dan efektif selain itu dapat mencegah timbulnya konflik kepentingan dari berbagai pihak dalam perusahaan dalam suatu perusahaan kepentingan antara manajemen puncak dan pemegang saham harusnya selalu sejalan dengan kepentingan suatu Perusahaan. (Hutomo et al. 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Objek penelitian ini adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Sumber data penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan PT Unilever, *website*, serta jurnal terdahulu.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Teknik analisis data deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau meringkas karakteristik utama dari sebuah data.

Analisis Data dan Pembahasan

Pernyataan (Prinsip- prinsip GCG, Pelangga ran GCG, Hasil penilaian GCG)	2020	2021	2022
Pelanggaran Kode Etik		1. Perusahaan menerima kasus terkait berita pasta gigi dari pihak orang tua grup memperlmasalahkan/ menuntut pihak Unilever karena dalam kemasan terdapat kata "<i>Strong</i>". 2. Pada bulan Agustus 2021, beberapa karyawan PT Unilever Indonesia menjadi viral di media sosial karena melakukan tindakan yang melanggar etika bisnis. Salah satu karyawan merekam video ketika sejumlah rekan kerjanya membuang limbah pabrik ke sungai. Video tersebut menjadi viral dan mendapat kecaman dari banyak pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah.	1. Kasus pencemaran lingkungan menurut AZWI (salah satu organisasi lingkungan) "Dari 600 <i>Sachet</i> yang kami temukan sampah sachet Unilever paling banyak ditemukan disusul Wings dan Indofood. Perlu tanggung jawab Unilever, Wings dan Indofood untuk membersihkan sampah <i>sachet</i> yang mencemari Ciliwung" kata Daru. 2. Pada 18 Februari 2022 PT Unilever diduga membuang limbah ke areal kawasan ekonomi khusus Sei Mangke, Sumatra Utara. Terdapat genangan air yang diduga bercampur limbah di areal PTPN III yang berdekatan dengan lokasi PT Unilever. Air tersebut berbau dan berwarna tidak seperti layaknya air tanah biasa. Dikatakan juga bahwa ketika diminta penindakan, PT

			Unilever terkesan tutup mata dan mengabaikan dugaan air limbah tersebut.
Hasil Penilaian GCG			
Hasil Penilaian IICD	Pada tahun 2020, IICD memverifikasi skor keseluruhan Perseroan di ASEAN Scorecard yaitu sebesar 106,60.		Pada tahun 2022, IICD memverifikasi skor Perseroan di ASEAN Scorecard. Perseroan mendapatkan status ' <i>Leadership in Corporate Governance</i> ', dengan nilai penerapan GCG berdasarkan ASEAN Scorecard sebesar 107.15
Hasil MSCI ESG	-	Sejak tahun 2021, Perseroan mendapat MSCI ESG <i>rating</i> dengan nilai AA.	Pada tahun 2022, Perseroan mendapat MSCI ESG <i>rating</i> dengan nilai A.
Hasil Penilaian Sustainabilitycs	-	Lampiran Pengumuman BEI No.Peng- 00277/BEI.POP/09-2021 tanggal 13 September 2021, terlihat bahwa peringkat risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan yang diberikan oleh <i>Sustainalytics</i> adalah sebesar 17,42.	Lampiran Pengumuman BEI No.Peng- 00326/BEI.POP/12-2022 tanggal 14 Desember 2022, terlihat bahwa peringkat risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan yang diberikan oleh <i>Sustainalytics</i> adalah sebesar 17,56.

Hasil penilaian tata Kelola perusahaan menurut IICD berdasarkan ASEAN Scorecard dari tahun 2020 sampai tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan yang tidak signifikan. Hasil penilaian MSCI ESG dari tahun 2020 sampai tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan *rating* yang semula pada tahun 2021 mendapatkan rating AA dan pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan *rating* menjadi A. Dikarenakan laba bersih pada tahun 2020 sebesar 7,2T pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,76T, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 5,5T dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,5T. Hasil penilaian *Sustainabilitycs* dari tahun 2021 sampai tahun 2023 menunjukkan adanya kenaikan yang tidak signifikan.

Kriteria

ASEAN Corporate Governance Scorecard: dengan indikator mencakup (i) hak pemegang saham; (ii) perlakuan yang sama terhadap pemegang saham; (iii) peran pemangku kepentingan; (iv) transparansi dan pengungkapan; dan (v) tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perseroan mendapatkan status '*Leadership in Corporate Governance*', yang menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan Perusahaan konsisten dengan standar internasional. Tata kelola perusahaan PT Unilever Indonesia diatur melalui kerangka kerja yang mengatur hubungan antara Perseroan dengan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya, serta hubungan antara Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Kerangka kerja ini mencakup sistem dan kebijakan yang mengatur pengelolaan aset dan risiko, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, pengembangan sumber daya manusia, manajemen keselamatan dan lingkungan, serta pengembangan budaya perseroan, sehingga perusahaan berhasil mempertahankan skor "*leadership in corporate governance*" yang berarti bahwa praktik GCG yang dilakukan oleh perusahaan telah mencerminkan standar internasional. Hasil ini juga jauh di atas skor rata-rata 100 perusahaan publik yang dinilai berdasarkan ASEAN GCG Scorecard.

Sustainability

Sustainability Tahun 2020

Pada tahun 2020 mengikhtisarkan diantaranya:

- a. Kinerja ekonomi PT Unilever dalam pendapatan Rp42,97 T, dengan laba bersih Rp7,2 T.
- b. Kinerja lingkungan, PT Unilever berhasil mengumpulkan sampah plastik dan di proses sebesar 16.402 ton, (13.262.67 ton plastik di kumpulkan melalui jaringan sampah), (3.070.44 ton plastik di daur ulang sebagai alternatif RDF, (68.60 ton didaur ulang untuk kemasan Unilever itu sendiri).

Sustainability Tahun 2021

Pada tahun 2021 merupakan kondisi yang tak pernah terduga karena adanya pandemi covid 19 dengan demikian PT Unilever tetap meningkatkan kinerja dan berusaha memulihkan kondisi yang terpuruk untuk keberlanjutan suatu perusahaan:

- Ikhtisar kinerja ekonomi dalam aspek pendapatan bersih Rp39,5 T dan laba bersih senilai Rp5,76 T.
- Aspek lingkungan dimana pada tahun 2021 PT Unilever adanya pengurangan jumlah plastik 3.800, penurunan emisi Co2, pengurangan konten plastik baru sebanyak 4,700 ton.
- Aspek sosial, adanya pelatihan karyawan sebanyak 26.698,97 jam kemudian adanya kontribusi penanganan covid 19, bantuan nya berupa >375.000 produk makanan dan sabun untuk di pakai, 1.300 vaksin untuk pemulung.

Sustainability Tahun 2022



Ikhtisar ekonomi dari segi pendapatan bersih senilai 41.2 T laba bersih nya 5,5 T Aspek lingkungan pengurangan konten plastik baru sampai sebanyak 5.500 ton

Sustainability Tahun 2023

- Aspek ekonomi dari pendapatan bersih Rp38,4 T dan laba bersihnya Rp4.5 T
- Aspek lingkungan pengurangan konten plastik baru sebanyak 6.800 ton.
- Berhasil mengumpulkan sampah plastik sebanyak 56.159 ton dari bank sampah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian tata kelola perusahaan PT Unilever Indonesia menurut berbagai lembaga, terdapat variasi tren kinerja dari tahun 2020 hingga 2023. Menurut IICD ASEAN Scorecard, tata kelola perusahaan menunjukkan peningkatan, meskipun tidak signifikan. Hal ini mencerminkan konsistensi dalam menjaga standar tata kelola, meskipun tidak menunjukkan lompatan yang berarti.

Penilaian oleh MSCI ESG menunjukkan tren yang berbeda, di mana terjadi penurunan rating dari AA pada tahun 2021 menjadi A pada tahun 2022-2023. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya laba perusahaan, yang memengaruhi dimensi keberlanjutan secara keseluruhan. Sebaliknya, hasil penilaian Sustainability dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan meskipun dalam skala yang

tidak signifikan. Kenaikan ini didukung oleh kinerja ekonomi dan lingkungan perusahaan. Status "Leadership in Corporate Governance" berhasil dipertahankan, yang menegaskan bahwa praktik tata kelola perusahaan telah memenuhi standar internasional.

Kerangka tata kelola perusahaan PT Unilever Indonesia dirancang untuk mengelola hubungan antara pemegang saham, pemangku kepentingan, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Kerangka ini mencakup kebijakan yang mengatur pengelolaan aset, risiko, kepatuhan hukum, pengembangan sumber daya manusia, serta manajemen keselamatan dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mempertahankan status unggul dalam tata kelola tetapi juga melampaui rata-rata skor 100 perusahaan publik yang dinilai berdasarkan ASEAN GCG Scorecard.

Implikasi

Pengunduran direksi dapat menciptakan kesenjangan informasi dan visi, yang berujung pada perubahan prioritas atau bahkan perubahan strategi organisasi. Hal ini dapat melemahkan keseimbangan perencanaan strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, sehingga menyebabkan sistem pengendalian manajemen menjadi tidak optimal, sehingga akan mempengaruhi tata kelola perusahaan. Pengunduran direksi yang tidak terkendali atau tidak terduga dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pengelolaan perusahaan yang dapat berdampak buruk terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Bagi investor hal ini menimbulkan kekhawatiran karena harga saham menurun sehingga berujung pada adanya jual beli saham.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini hanya meneliti satu perusahaan saja yaitu PT Unilever, sehingga penelitian ini tidak dapat membandingkan dengan perusahaan lain yang juga terdampak aksi boikot. Saran untuk penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti PT Unilever saja tetapi membandingkan dengan perusahaan lain yang juga terdampak aksi boikot, pergantian manajemen, dan pengunduran direksi seperti perusahaan McDonald's, Starbucks, Danone, serta Nestle yang muncul dengan dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 126 karyawan.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir. 2018. "Peranan Brainware Dalam Sistem Informasi Manajemen Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi." *Sistem Informasi* 1(September): 60–69. doi:10.31933/JEMSI.
- Audrina, Clarisa, Gracenia Patricia, and Syahidannur Mukminah Pulungan. 2022. "Pengaruh Tata Kelola Terhadap Manajemen Risiko (Studi Kasus PT Unilever Indonesia Tbk)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(10): 3582–90.
- Hikam, Sholahudin Abinawa. 2023. "Ditengah Terpaan Isu Boikot, Direktur Unilever Dikabarkan Mengundurkan Diri." <https://www.pitutor.id/startup/1403324183/ditengah-terpaan-isu-boikot-direktur-unilever-dikabarkan-mengundurkan-diri?page=1>.
- Hutomo, Arry, Theresia Marditama, Nandan Limakrisna, Ilham Sentosa, John Lee, and Kean Yew. 2020. "Green Human Resource Management, Customer Environmental Collaboration and the Enablers of Green Employee Empowerment: Enhancing an Environmental Performance." 1(2): 358–72. doi:10.38035/DIJEFA.

- Indonesia, CNN. 2023a. "Alasan Petinggi Unilever Mundur Berjamaah." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231125173730-92-1028982/alasan-petinggi-unilever-mundur-berjamaah>.
- Indonesia, CNN. 2023b. "Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi Yang Mundur Berjamaah." <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231125173730-92-1028982/alasan-petinggi-unilever-mundur-berjamaah>.
- Nugroho, Amanda Ertica, and Nur Laily. 2019. "Pengaruh GCG Dan CSR Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Barang Dan Konsumsi Di BEI." *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen* 8: 6.
- Ramadhan, Charisma Bayu, and Hwihanus Hwihanus. 2024. "Jauh Dibalik Pandangan, Menilik Sistem Pengendalian Manajemen Perusahaan PT. Unilever Indonesia." 2(2): 127–35. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1445>.
- Winosa, Yosi. 2023. "Tiga Direksi Unilever Indonesia (UNVR) Undur Diri, Imbas Krisis Merek Di Tengah Konflik Israel-Palestina?" <https://www.akurat.co/rill/1303324499/tiga-direksi-unilever-indonesia-unvr-undur-diri-imbis-krisis-merek-di-tengah-konflik-israel-palestina>.